

**PENERAPAN *INCOME SMOOTHING* DALAM PERSPEKTIF  
AKUNTANSI SYARIAH DAN FIKIH KONTEMPORER**

Disusun Oleh:

**Widatul Khusniah**

NIM. 145020300111005

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih

Derajat Sarjana Ekonomi



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2021**

“Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari”.

~ Iman Syafi'i ~





## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan skripsi ini terutama untuk keluarga yang telah lama menantikan terselesaikannya kewajiban studi S1 saya. Tak lupa pula saya menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:*

*Allah SWT. Sang Penggerak hati yang selalu memberikan petunjuk. Rahman, RahimNya. Rasa Syukur atas segala bentuk pendewasaan dalam hidup ini. Yaa Rabb.*

*Keluarga, orang tuaku Kholil Isma'il dan Junda, Mertua dan Suami Efwan Hasby Rizaldy, serta Putra Kesayangan A. Zayn Raffasya.*

*Dr. Aji Dedi Mulawarman, pembimbing skripsi yang telah susah payah memberikan saran-saran dan kritik membangun mengenai skripsi ini.*

*Tempat berproses terbaik, Organisasi Asisten Dosen Akuntansi (OADA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2016-2017. Terima kasih atas proses belajarnya.*

*Para Informan, Baik Akademisi, Praktisi, dan Ulama' yang bersedia memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Teman-teman yang selalu membantu sampai akhir kelulusan dan yang memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih atas pertanyaan "Kapan Lulus?"*

*Dan untuk anda—para pembaca—, karya tulis ini tak akan pernah bermakna jika tak pernah dibaca. Maka peneliti sampaikan terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca karya sederhana ini.*

خير الناس انفعهم للناس

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

### PENERAPAN *INCOME SMOOTHING* DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DAN FIKIH KONTEMPORER

Yang disusun Oleh:

Nama : Widatul Khusniah

NIM : 145020300111005

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.

NIP. 196912312009121002

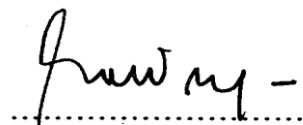
(Dosen Pembimbing)



2. Dr. Drs. Rosidi, Ak., MM.

NIP. 195403121984031001

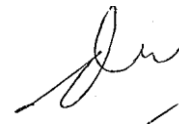
(Dosen Penguji I)



3. Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak.

NIP. 197511052003122001

(Dosen Penguji II)



Malang, 20 Mei 2021

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Dra. ARUM PRASTIWI, M.Si., Ak.

NIP. 196707142005012001



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

### **PENERAPAN *INCOME SMOOTHING* DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DAN FIKIH KONTEMPORER**

Yang disusun Oleh:

Nama : Widatul Khusniah

NIM : 145020300111005

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

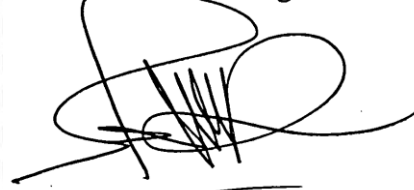
Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal : 03 Mei 2021

Dosen Pembimbing



**Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.**

**NIP. 196912312009121002**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widatul Khusniah

NIM : 145020300111005

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

### **PENERAPAN *INCOME SMOOTHING* DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DAN FIKIH KONTEMPORER**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 04 Mei 2021

Pembuat Pernyataan,



Widatul Khusniah

NIM 145020300111005



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Widatul Khusniah**

Pasuruan, 17 Maret 1995

Islam

Komp. Griya Mertapada Asri Blok D No.8 RT/RW 001/006 Mertapada Wetan

Kec. Astanajapura Kab. Cirebon Jawa Barat

089601450992

[widatulkhusniah@gmail.com](mailto:widatulkhusniah@gmail.com)

### FORMAL EDUCATIONAL BACKGROUNDS

- S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2014-2021
- MAN Insan Cendekia Serpong 2011-2014
- MTs Al-Yasini Wonorejo Pasuruan 2008-2011
- SDN Kebotohan Keraton Pasuruan 2001-2007
- TK PGRI Kebotohan Keraton Pasuruan 2000-2001

### NON FORMAL EDUCATIONS AND TRAININGS

- Professional Competency Training and Assessment Microsoft Office Desktop Application by Trust Training Partners, Microsoft Learning Partner and Universitas Brawijaya 2018 (Excellent Grade)

- Pelatihan Dasar Audit dalam rangkaian kegiatan workshop audit dan Post test audit Universitas Brawijaya 2018 (Lulus)
- Introduction to SAP® ERP class supported by SAP® ERP as offered by Department of Accounting-Faculty of Economics and Business 2015/2016
- TOEFL Preparation at Excellent Program by Economics and Business Faculty Brawijaya University 2014, Total Prediction Score 460
- English Explosion Learning Center (Excellent Program), Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya Malang 2014, Score 79

---

### SCHOLARSHIP

- Beasiswa Bidikmisi Tahun 2014-2018
- Beasiswa Kementerian Agama Tahun 2011-2014

---

### INTERNSHIP

- PT HOLLAND FOR WATER: Bagian Administrasi dan Keuangan, serta Warehouse Tahun 2017

---

### ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

- Staff Divisi Kewirausahaan Organisasi Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. (2016)
- Sekretaris Divisi Kewirausahaan Organisasi Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. (2017)
- Divisi Administrasi dan Bendahara Acara *Upgrading dan Communication Skill* Organisasi Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. (2016)
- Koordinator Divisi Konsumsi Acara *Open Recruitment* Organisasi Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. (2017)
- Koordinator Divisi Konsumsi Acara *Training Organisation* Organisasi Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. (2017)
- Divisi Humas Acara *Upgrading Data Base Management System* Organisasi



## ACHIEVEMENTS

- Tutor Organisasi Asisten Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Tahun 2016-2017
- Top 75 Best Abstract "Islamic Paper Competition" Teknik Kimia FTI ITS, 2016

## PERSONAL SKILLS

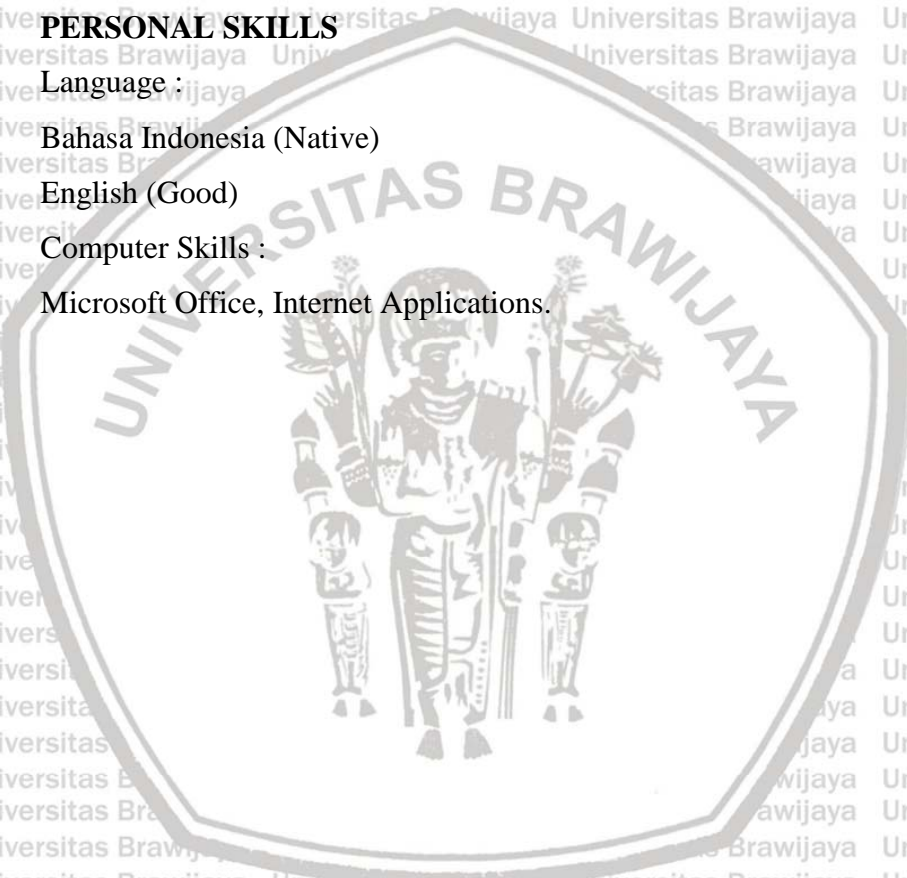
Language :

Bahasa Indonesia (Native)

English (Good)

Computer Skills :

Microsoft Office, Internet Applications.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Penerapan *Income Smoothing* Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Dan Fikih Kontemporer**”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Tak lupa penulis sampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang membantu selama proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA., selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Nurkholis, M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Roekhudin, Ak., CSRS., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
4. Keluarga terkasih yang senantiasa memberi doa dan motivasi
5. Teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi.

Demikian yang penulis sampaikan, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya dalam bidang keilmuan akuntansi.

Malang, 4 Mei 2021

Peneliti



## ABSTRAK

**PENERAPAN *INCOME SMOOTHING* DALAM PERSPEKTIF  
AKUNTANSI SYARIAH DAN FIKIH KONTEMPORER**

Oleh:

Widatul Khusniah

Dosen Pembimbing: Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik *income smoothing* yang banyak dilakukan saat ini, tidak peduli entitas yang berlabel syariah maupun konvensional. Nyatanya, konsep dan teori akuntansi terlebih lagi regulasi yang digunakan masih mengakomodir kepentingan terbatas dan mengarah kepada manipulasi laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan akuntansi syariah dan fikih terhadap implementasi *income smoothing* di entitas syariah dan konvensional. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dan CIMB Niaga Cabang Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisis komparatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara terhadap Akademisi, Praktisi, dan Ulama serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *income smoothing* masih sarat akan *tadlis* dan *gharar*. Terbukti dari implementasinya baik dalam entitas syariah atau konvensional di Indonesia masih mempunyai kesamaan logika yaitu *self interest*. Implikasinya, Akuntansi syariah mengenai *income smoothing* yang tercermin dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 masih memiliki celah penyimpangan syariah sehingga dalam praktiknya lebih baik tidak dilakukan. Lebih jauh lagi, konsep *tazkiyah* perlu diterapkan, baik dalam tataran teoritis maupun praktis mengenai *income smoothing* yaitu dengan cara berfokus melakukan *upgrading* diri dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah sehingga terbentuk karakter pebisnis yang jujur, amanah, dan transparan melaporkan hasil bisnisnya tanpa ada unsur penipuan di dalamnya.

**Kata Kunci: *Income Smoothing, Tadlis, Gharar, Fikih, Self Interest, Tazkiyah***



## ABSTRACT

# THE IMPLEMENTATION OF INCOME SMOOTHING IN THE PERSPECTIVE OF SHARIA ACCOUNTING AND CONTEMPORARY FIQH

By:

Widatul Khusniah

Supervision: Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.

This research is initiated by the practice of income smoothing by both sharia and conventional entities. The accounting concepts and theories, not to mention the regulations used, still accommodate limited interests and lead to financial statement manipulation. This study aims to determine the sharia and accounting fiqh perspectives on the implementation of income smoothing in sharia and conventional entities, conducted in Bank Muamalat Indonesia and CIMB Niaga Malang Branch. This study employs descriptive qualitative with comparative analysis. The data are collected through interviews with academics, practitioners, and *Ulama*, and literature studies. The results reveal that the implementation of income smoothing is evidently regarded as *tadlis* and *gharar* practice as it is based on the self-interest logic. It implies that income smoothing in sharia accounting embodied in the *fatwa* of the National Sharia Council No. 87/DSN-MUI/XII/2012 allows sharia deviations, thus it is strongly recommended to avoid the practice. As such, it is necessary to apply the concept of *tazkiyah* where one's fear of God and moral upgrades lead them to be an honest, trustworthy businessman who transparently report their business financial without committing fraud.

**Keywords:** *Income Smoothing, Tadlis, Gharar, Fiqh, Self Interest, Tazkiyah.*



## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PERSEMBAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAKSI**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penelitian

1.4. Manfaat Penelitian

1.5. Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR**

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Agency Theory*

2.1.2 Manajemen Laba

2.1.3 *Income Smoothing*

2.1.4 Esensi dan Konsepsi Akuntansi Syariah

i

ii

iv

vi

vii

viii

1

1

9

9

10

11

13

13

13

16

21

23

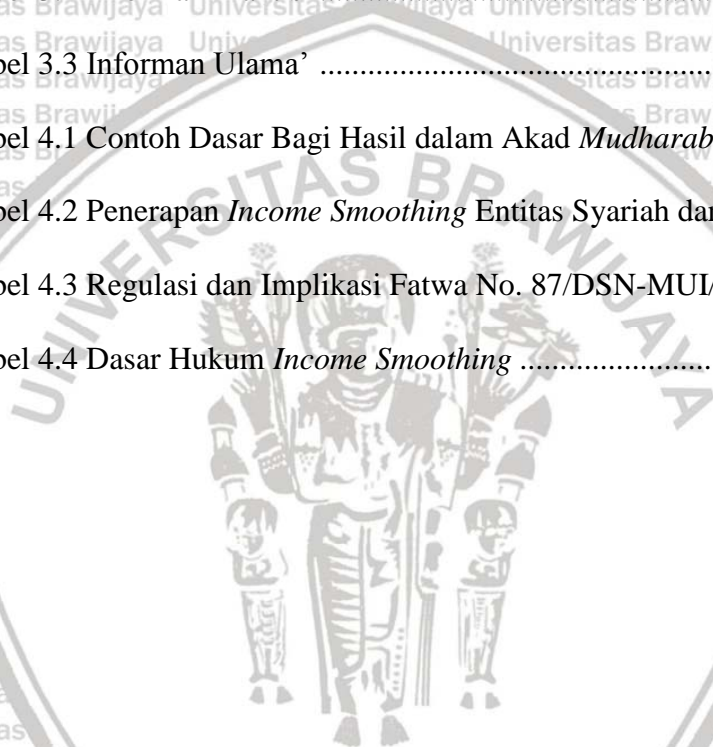
iv

|  |     |
|--|-----|
| 2.1.5 <i>Income Smoothing</i> dalam Akuntansi Syariah di Indonesia .....                                   | 28  |
| 2.1.5 Konsep Fikih Muamalah .....  | 31  |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....   | 36  |
| 2.3 Batasan Penelitian dan Kerangka Berfikir .....   | 37  |
| <b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b> .....  | 39  |
| 3.1. Jenis Penelitian .....  | 39  |
| 3.2. Lokasi Penelitian .....   | 40  |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data .....   | 41  |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....  | 42  |
| 3.5. Teknik Uji Keabsahan Data .....   | 48  |
| 3.6 Teknik Analisis Data .....   | 50  |
| <b>BAB IV: PEMBAHASAN</b> .....  | 52  |
| 4.1 Penerapan <i>Income Smoothing</i> pada entitas syariah dan konvensional .....                          | 52  |
| 4.1.1 Praktik <i>Income smoothing</i> pada Entitas Syariah di Indonesia .....                              | 52  |
| 4.1.2 Praktik <i>Income smoothing</i> pada Entitas Konvensional di Indonesia .....                         | 67  |
| 4.2 Penerapan <i>Income Smoothing</i> dalam Perspektif Akuntansi Syariah dan Fikih Kontemporer .....       | 79  |
| 4.2.1 Penerapan <i>Income Smoothing</i> : Regulasi dan Implikasinya dalam Perspektif Fikih .....           | 81  |
| 4.2.2 Penerapan <i>Income Smoothing</i> : Jenis, Pengukuran, dan Pengungkapan dalam Perspektif Fikih ..... | 87  |
| 4.3 <i>Grand Desaign</i> Penerapan <i>Income Smoothing</i> yang Sesuai <i>Maqashid</i> Syariah .....       | 91  |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | 101 |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 101 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian .....  | 102 |
| 5.3 Saran .....  | 102 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 103 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  | 110 |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Teknik-Teknik Manajemen Laba.....                                       | 18 |
| Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....   | 36 |
| Tabel 3.1 Informan Akademisi.....   | 44 |
| Tabel 3.2 Informan Praktisi.....  | 45 |
| Tabel 3.3 Informan Ulama'.....  | 47 |
| Tabel 4.1 Contoh Dasar Bagi Hasil dalam Akad <i>Mudharabah</i> .....              | 54 |
| Tabel 4.2 Penerapan <i>Income Smoothing</i> Entitas Syariah dan Konvensional..... | 78 |
| Tabel 4.3 Regulasi dan Implikasi Fatwa No. 87/DSN-MUI/XII/2012.....               | 82 |
| Tabel 4.4 Dasar Hukum <i>Income Smoothing</i> .....                               | 96 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Metode Perataan Penghasilan DPK dengan Cadangan.....  | 29 |
| Gambar 2.2 Metode Perataan Penghasilan DPK Tanpa Cadangan.....   | 30 |
| Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....  | 38 |
| Gambar 4.1 Laporan Laba/Rugi Bank Muamalat Indonesia Tbk.....  | 55 |
| Gambar 4.2 Indikasi <i>Rate of Return</i> Bank Muamalat Indonesia.....                                       | 62 |
| Gambar 4.3 Proyeksi Bank Muamalat Indonesia.....   | 64 |
| Gambar 4.4 Laporan Posisi Keuangan PT CIMB NIAGA 2019.....   | 75 |
| Gambar 4.5 Laporan Laba/Rugi PT CIMB NIAGA 2019.....   | 76 |
| Gambar 4.8 Kerangka Desain Penerapan <i>Income Smoothing</i> Selaras dengan<br><i>Maqashid Syariah</i> ..... | 99 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| Lampiran 1  | Draf Wawancara Akademisi di Bidang Akuntansi Syariah, Prof Iwan Triyuwono, SE, Ak, MEc, PhD, Guru Besar Universitas Brawijaya (UB).....   | 110 |
| Lampiran 2  | Draf Wawancara Akademisi di Bidang Akuntansi Syariah, Achmad Zaky, SE., MSA., Ak., Dosen Universitas Brawijaya (UB) .....   | 115 |
| Lampiran 3  | Draf Wawancara Akademisi di Bidang Ekonomi Syariah, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A., Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim .....                                  | 120 |
| Lampiran 4  | Draf Wawancara Akademisi di Bidang Ekonomi Syariah, Dr. Dra. Asfi Manzilati, ME. Dosen Universitas Brawijaya (UB) .....   | 126 |
| Lampiran 5  | Draf Wawancara Praktisi di Bidang Akuntansi yang Berprofesi sebagai Staff Akuntansi Keuangan di PT Bumi Asri Situbondo .....  | 134 |
| Lampiran 6  | Draf Wawancara Praktisi di Bidang Akuntansi yang Berprofesi sebagai FAT ( <i>Finance, Accounting, Tax</i> ) Manager di PT Budi Karya Raharja .....  | 137 |
| Lampiran 7  | Draf Wawancara Praktisi di Bidang Akuntansi/Perbankan Syariah, yang Berprofesi sebagai <i>Marketing Funding Manager</i> Bank Muamalat Indonesia (BMI) .....   | 140 |
| Lampiran 8  | Draf Wawancara Praktisi di Bidang Akuntansi/Perbankan Syariah, yang Berprofesi sebagai <i>Market Risk and Model Validation Head</i> Bank CIMB NIAGA.....  | 145 |
| Lampiran 9  | Draf Wawancara Ulama' di Bidang Fikih, Dr. Habib Segaf Bin Hasan Baharun, M.H.I., Pengasuh Pondok Pesantren Banat DALWA (Darullughah Wadda'wah) dan Rektor Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah ..... | 147 |
| Lampiran 10 | Draf Wawancara Ulama' di Bidang Fikih, K. Muhammad Abdullah Syukri, S. IP, MA, Pengasuh Ma'had As-Syakiroh 2 YLPI Buntet Pesantren dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren .....            | 151 |
| Lampiran 11 | PSAK 105: Akuntansi Mudharabah .....  | 154 |
| Lampiran 12 | FATWA DSN No. 87: Metode Perataan Penghasilan ( <i>Income smoothing</i> ) Dana Pihak Ketiga.....  | 167 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu fungsi utama laporan keuangan yang tertera dalam kerangka dasar penyusunan dan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai kinerja perusahaan menyangkut posisi keuangan, informasi laba, arus kas, dan perubahan modal perusahaan. Informasi-informasi ini sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan terutama informasi mengenai laba. Laba dianggap sebagai informasi potensial dalam laporan keuangan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal dalam menilai kinerja manajemen, estimasi kemampuan menghasilkan laba dalam jangka panjang, dan menaksir risiko investasi atau peminjaman dana. Melihat pentingnya informasi mengenai laba ini, tidak jarang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan manajemen melakukan metode akuntansi dengan tujuan yang berhubungan dengan pencapaian laba perusahaan. Tindakan manajemen dalam memilih metode akuntansi untuk tujuan tertentu inilah yang disebut manajemen laba (Rachmawati, et.al, 2006).

Manajemen laba merupakan produk yang lahir dari suatu *agency theory* yang lebih identik dengan paham kapitalisme dalam bisnis. Kelahiran *agency theory* sendiri tidak bisa dilepaskan dari pemikiran kaum profesional kapitalis untuk mengurangi konflik dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari kontrak tersebut. Teori ini juga dianggap sebagai penjelasan dari praktik teori akuntansi konvensional atau



lebih dikenal dengan teori akuntansi positif dalam suatu realitas yang berhubungan dengan keagenan yaitu hubungan antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen) (Scott, 2003). Manajemen sebagai penerima kerja harus melaporkan tanggung jawab atas dana yang telah diamanatkan kepadanya, sedangkan pihak *principal* sebagai pemberi kerja atau pemberi amanah memberikan kompensasi atas apa yang telah dilakukan oleh manajemen dengan insentif baik berupa fasilitas finansial maupun non finansial. Perbedaan persepsi dan sikap mengenai pemberian informasi yang akan digunakan untuk pemberian insentif dari kedua pihak yang mengadakan hubungan tersebut dengan sendirinya akan menimbulkan suatu masalah. Di sisi lain sebagai agen, manajer secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi pengguna eksternal, terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi paling besar ketidakpastiannya. Salah satu bentuk tindakan manajemen untuk mewujudkan tanggungjawabnya adalah tindakan perataan laba (*income smoothing*).

Praktik *income smoothing* ini bisa dilakukan dengan cara penentuan waktu pengakuan pendapatan dan beban secara hati-hati untuk memperoleh laba yang



dilaporkan sesuai dengan yang diinginkan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Adanya perubahan informasi atas laba bersih suatu perusahaan melalui berbagai cara akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap tindak lanjut para pengguna informasi yang bersangkutan. Tindakan manajemen untuk melakukan perataan laba umumnya didasarkan atas berbagai alasan diantaranya untuk memuaskan kepentingan pemilik perusahaan seperti menaikkan nilai perusahaan sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki risiko ketidakpastian yang rendah, menaikkan harga saham perusahaan sehingga lebih mudah mendapatkan pinjaman dari kreditur dan menarik investor, dan untuk memuaskan kepentingan manajer, seperti mendapatkan kompensasi dan mempertahankan posisi jabatan.

Adanya tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba di perusahaan telah menimbulkan sejumlah skandal dalam pelaporan keuangan perusahaan. Skandal pelaporan keuangan telah menjadikan kekhawatiran tersendiri bagi para pengguna laporan keuangan. Adanya laporan yang disajikan dengan tujuan untuk mengelabui para pengguna menyebabkan tidak transparannya suatu laporan keuangan perusahaan. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia seperti kasus salah saji laporan keuangan yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk (Sulistiawan, 2011). Pada tahun 2002 ditemukan penggelembungan laba bersih pada laporan keuangan PT Kimia Farma Tahun buku 2001. Hal tersebut berawal dari temuan akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) soal ketidakwajaran dalam laporan keuangan kurun semester I tahun 2001. Mark up senilai Rp. 32.7 Milyar, karena dalam laporan keuangan yang seharusnya laba Rp



99,6 milyar ditulisnya Rp. 132,3 milyar, dengan nilai penjualan bersih Rp. 1,42 trilyun. Pihak Bapepam selaku pengawas pasar modal mengungkapkan tentang kasus PT. Kimia Farma dan berhasil memperoleh buktinya. Sesuai pasal 5 huruf N UU no. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal maka Direksi lama PT. Kimia Farma periode 1998 sampai dengan Juni 2002 diwajibkan membayar denda sejumlah Rp 1 milyar untuk disetor ke kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan Per 31 Desember 2001. Selain kasus tersebut, PT Lippo Tbk juga pernah mengalaminya (Nurseto, 2009). Kasus ini berawal dari deteksi adanya manipulasi dalam laporan keuangan Per 30 September 2002 yang diterbitkan perusahaan tersebut. Akibatnya, reputasi akuntan publik jadi tercoreng di mata masyarakat, dan para investor mulai meragukan informasi berupa laporan keuangan yang disajikan manajemen. Kasus serupa juga dialami PT. Agis, Tbk, dimana manajemen perusahaan melakukan *fraudulent financial reporting* terhadap Laporan Keuangan Per 31 Maret 2007 berupa penyajian keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya sehingga mempengaruhi harga efek perusahaan di bursa efek. Pihak direksi PT. Agis, Tbk yang terlibat dalam kesalahan tersebut telah dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya ([www.tempo.com](http://www.tempo.com), 2012). Tidak hanya berkaca pada kasus-kasus tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2002) terhadap bank konvensional *go public* ternyata memang mempraktikkan manajemen laba dengan menggunakan teknik perataan laba.

Lantas yang menjadi menarik yaitu mengenai pandangan akuntansi syariah terhadap *income smoothing* sebagai salah satu wujud tindakan manajemen laba.



Penelitian yang dilakukan oleh Padmantyo (2010) menyebutkan bahwa meskipun secara teoritis perbankan syariah melakukan operasi sistem bagi hasil, tetapi dalam praktiknya terdapat kemungkinan bahwa bank syariah melakukan kebijakan manajemen laba yaitu *smoothing of profit and lost sharing deposit returns* dengan cara insentif berupa *return* kepada IAH atau *Investment Account Holder* yang menyamai nilai pasar dengan patokannya atau *benchmark*. Selain itu, kebijakan ini juga sering dilakukan dengan cara manajemen bank membentuk dana cadangan yang diambil dari porsi alokasi IAH dari periode akuntansi. Praktik ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Cahyati (2013) yang menyebutkan bahwa bank syariah melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil *Discretionary Accrual* selama dua tahun yang bernilai positif dan negatif. Nilai *Discretionary Accrual* yang telah dianalisis dalam 11 bank syariah tersebut masih berkisar dibawah angka 0 (nol). Hal ini berarti bank syariah melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba yang mengindikasikan bahwa bank syariah membentuk suatu cadangan. Akan tetapi, tidak serta merta praktik *income smoothing* ini dikatakan menyalahi aturan mengingat bahwa terdapat fatwa yang mengatur mengenai perataan laba yaitu fatwa DSN-MUI NO. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga. DSN MUI juga berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat *income smoothing* menjadi tidak diperbolehkan, seperti pencadangan keuntungan pada saat keuntungan riil berada di bawah keuntungan yang diproyeksikan. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai fatwa ini karena secara implisit ada inkonsistensi dalam



penyampaian fatwa tersebut. Mengingat bahwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang ditugaskan untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, khususnya perbankan, dijalankan secara maksimal dengan membawa ketinggian nama Islam, maka, yang menjadi pertanyaan adalah apakah fatwa mengenai *income smoothing* ini sudah mengakomodir dari pemenuhan prinsip syariah tersebut?

Kenyataan yang penulis paparkan di atas seolah membantah persepsi masyarakat yang menunjukkan anggapan bahwa praktik antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah berbeda. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan perbankan syariah yang ada sekarang masih mengadopsi pendekatan-pendekatan akuntansi positif seperti konvensional. Seperti yang dikemukakan oleh Mulawarman (2013) yang menyatakan bahwa *Predictor* ekonomi Islam/Syariah masih menggunakan *Positivistic Approach* yang mengedepankan matematis dan kuantitatif serta *Outward Looking*. *Positivistic Approach* ini menurut Mulawarman (2013) hanya mengedepankan model: *to explain and to predict*. Dalam model ini ekonomi islam baik dalam domain akuntansi syariah maupun bisnis syariah masih mengedepankan logika pertumbuhan (kinerja) hanya didasarkan pada prediksi dan proyeksi statistik semata. Implikasinya, bisa terlihat pada laporan keuangan yang dipublikasikan tiap tahun akan menunjukkan angka-angka yang menakjubkan yang membuat persepsi investor mengenai kinerja perusahaan yang mengagumkan sesuai yang diproyeksikan dan ditargetkan oleh perusahaan (dalam hal ini perbankan syariah). Dalam konteks *income smoothing* ini, maka perusahaan akan berlomba-lomba untuk memberikan kesan yang menakjubkan mengenai kinerja



yang stabil untuk memberikan kesan kepada investor bahwa perusahaan tersebut minim risiko. Sehingga investor akan sangat mungkin dibuat terkesima melihat laporan keuangan yang disajikan dan kemudian berinvestasi di perusahaan tersebut.

Namun, apakah angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut hanya 'semu' atau memang 'real' itu tidak menjadi perhatian utama dari investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya. Maka yang menjadi pertanyaan besar dari kenyataan ini adalah bagaimana sesungguhnya implementasi yang ada di kedua perbankan yang penulis paparkan tersebut? Oleh karena itu peneliti mengambil objek penelitian Bank Muamalat KC Malang dan CIMB Niaga KC Malang untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai implementasi *income smoothing* pada masing-masing kategori bank syariah dan konvensional. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya sehingga bank ini dianggap menjadi *role model* dalam menerapkan transaksi-transaksi yang berbasis syariah. Di sisi lain, Bank CIMB Niaga merupakan bank dengan cabang ritel di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia ([www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)), sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara holistik mengenai topik penelitian ini.

Pada dasarnya penelitian-penelitian mengenai topik *income smoothing* ini sudah pernah dilakukan (lihat tabel 2.2), akan tetapi tidak secara holistik memberikan analisis komparasi antara praktik di perbankan syariah dan konvensional. Selain itu, objek dari penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Di sisi lain dilihat dari hasil penelitian sebelumnya masih terdapat pro dan kontra mengenai pandangan *income smoothing* ini. Sehingga penulis



mengambil perspektif fikih untuk menganalisis fenomena praktik *income smoothing* sebagai wujud pemurnian pemahaman terhadap tujuan syariah itu sendiri (*maqashid as-syar'iyah*) dengan tujuan memperoleh kejelasan hukum dari praktik yang terjadi.

Selain itu, praktik *income smoothing* ini merupakan praktik muamalah dalam hukum islam sehingga harus menggunakan fikih dalam mengambil suatu hukum.

Kaidah fikih menyebutkan (Djazuli, 2010) bahwa "*al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad dhalilu 'ala tahrimiha*" yang artinya hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam. Efek yang timbul dari kaidah fikih muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, ini juga bisa jadi berarti suatu transaksi yang baru muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut dianggap diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.

Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya fikih memandang praktik *income smoothing* yang menjadi objek penelitian?

Kondisi dan kenyataan-kenyataan yang mengarah pada pertanyaan-pertanyaan besar tersebut kemudian menjadi menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian pada bank syariah dan konvensional untuk menganalisis praktik *income smoothing* yang ada pada keduanya ditinjau dari

perspektif akuntansi syariah, baik itu regulasi maupun *treatment* akuntansinya.

Lantas dilakukan kajian fikih terhadap praktik yang ada dengan berpegang teguh pada kerangka tauhid untuk menghasilkan ide dan desain mengenai praktik *income smoothing* yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Oleh karena itu, peneliti membuat suatu penelitian yang berjudul “Penerapan *Income Smoothing* dalam Perspektif Akuntansi Syariah dan Fikih Kontemporer” untuk menemukan kepastian hukum *income smoothing* tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *income smoothing* pada perusahaan syariah dan konvensional?
2. Bagaimana pandangan akuntansi syariah dan fikih terhadap *income smoothing*?
3. Bagaimana *grand design* penerapan *income smoothing* yang sesuai *maqashid syariah*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan *income smoothing* di perusahaan syariah dan konvensional.
2. Mengetahui pandangan akuntansi syariah terhadap *income smoothing*.
3. Mengetahui *grand design* penerapan *income smoothing* yang sesuai *maqashid syariah*.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, sebagai berikut :

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memperkaya literatur tentang praktik *income smoothing* dengan memperhatikan kesesuaian nilai-nilai Islam dalam akuntansi syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran keTuhanan. Akuntansi syariah diharapkan tidak semata-mata berorientasi terhadap keuntungan, tetapi juga memajukan kesejahteraan sosial.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi:

###### 1. Akuntan dan Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi profesi akuntan dan investor untuk menambah wawasan mengenai praktik manajemen laba agar dapat menegakkan perilaku etis (kebenaran, kejujuran, dan keadilan) dalam laporan keuangan, yang tidak hanya mementingkan utilitas manajer tetapi juga melihat dari kepentingan seluruh *stakeholders* yaitu Tuhan, manusia, dan alam yang sesuai dengan spirit Islam. Spirit Islam dalam manajemen laba dilakukan dengan cara mengorientasikan tujuan manajemen laba kepada utilitas yang tidak hanya

bersifat materi tetapi juga utilitas non materi, sehingga upaya memaksimalkan keuntungan sebagai sebagai satu-satunya tujuan manajemen laba.

## 2. Pembuat Standar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan pembuat standar akuntansi syariah dalam dalam rangka merekonstruksi ulang sistem akuntansi syariah yang ada di Indonesia khususnya, agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## 3. Umat Muslim

Penelitian ini diharapkan ikut menambah *hasanah* ilmu yang dapat dijadikan landasan berpikir umat muslim yang kritis dan rasional dengan berpijak pada *nash-nash syara'* dan ikut andil dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat muslim di dunia.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, BATASAN PENELITIAN, DAN KERANGKA BERFIKIR**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitan terdahulu tentang manajemen laba, *income smoothing*, dan pandangan akuntansi syariah serta fikih kontemporer mengenai *income smoothing*.

Dalam bab ini juga dikemukakan mengenai batasan penelitian dan kerangka pemikiran untuk membahas rumusan masalah yang diteliti.



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

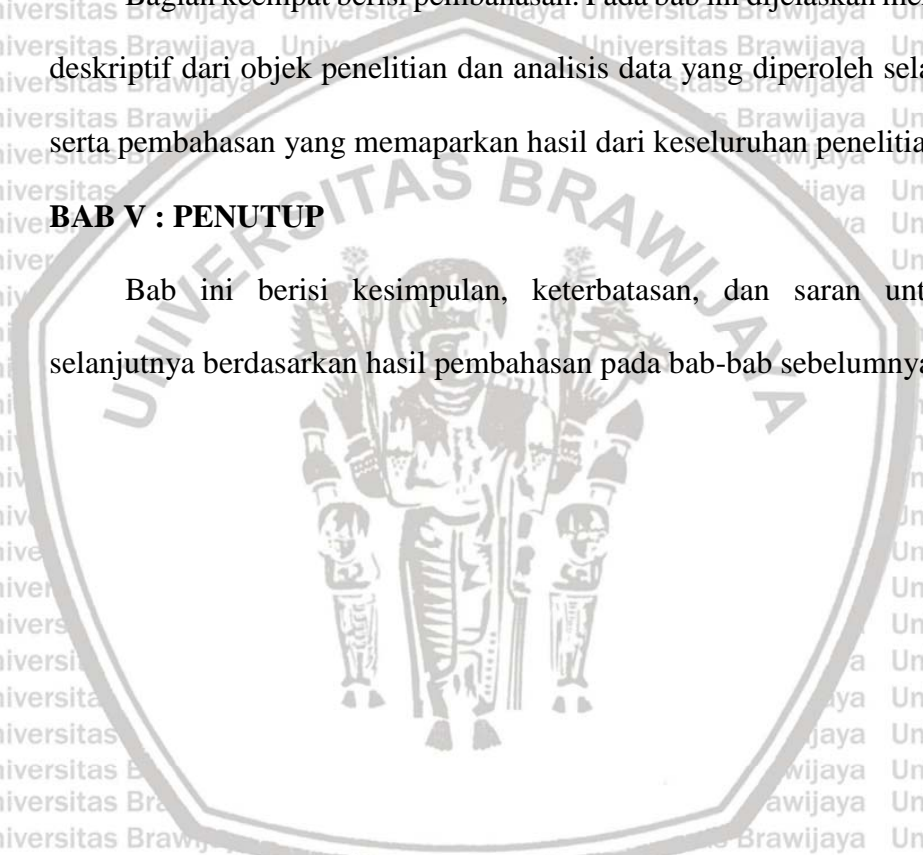
Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional. Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian keempat berisi pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian serta pembahasan yang memaparkan hasil dari keseluruhan penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengadopsi dari beberapa teori akuntansi yang sudah ada yaitu sebagai berikut :

##### 2.1.1 *Agency Theory*

*Agency theory* lahir sekitar tahun 1970-an yang digagas oleh pakar-pakar akuntansi Amerika Serikat. Hal ini berawal dari adanya bentuk perusahaan yang memisahkan dengan tegas antara kepemilikan perusahaan dengan kontrol atau dengan kata lain ada pemisahan yang jelas antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Semakin rumit dan besarnya suatu perusahaan membuat pihak pemilik tidak bisa secara intensif mengelola perusahaannya, sehingga meminta pihak manajemen untuk mengelola kelangsungan hidup perusahaan dalam usahanya mendapatkan profit. Selanjutnya manajemen dianggap sebagai "*Agent*" dan pemilik dianggap sebagai "*Principal*". Hubungan tersebut oleh banyak ahli disebut dengan hubungan keagenan (*agency relationship*).

Asumsi dasar dari *Agency Theory* adalah bahwasanya pihak-pihak yang ada dalam hubungan keagenan tersebut adalah individu-individu yang berusaha untuk memaksimalkan tingkat kepuasan/kepentingan masing-masing melalui sumber dayanya yang memadai dan inovasinya dalam bertindak atau *utility maximisers* (Kiswara, 1999). Konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam *agency relationship* merupakan akibat dari asumsi yang dipakai dalam *Agency Theory* ini.



Asumsi yang dipakai dalam *Agency Theory* sebenarnya merupakan perefleksian dari ideologi kapitalisme. Marx dalam bukunya *Capital* volume III, telah memberi suatu pandangan bahwa adanya suatu pemisahan yang tegas antara kepemilikan dengan kontrol dalam perusahaan merupakan transformasi dari nilai-nilai kapitalisme. Marx seperti yang dikutip Roslender (1992) mengatakan:

The actually functioning capitalist [is transformed] into a mere manager, administrator of other people's capital and the owner of capital into mere owner, a mere money capitalist. The total profit (for salary of the manager is, or should be simply the wage of a specific type of skilled labour) is henceforth. Mere compensation for owning capital that now is divorced from the function in the actual process of reproduction, just as this function in the person of the manager is divorced from ownership of capital.

Asumsi tersebut memberikan alasan bagi *principal* sebagai pemilik perusahaan untuk tidak mempercayai komitmen agen dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan terbaik dari *principal*. Sehingga *principal* demi menjaga kekayaan yang ada dalam otoritas agen akan membuat batasan agar manajemen sebagai agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* atau paling tidak mengurangi penyimpangan yang dilakukan oleh agen terhadap kepentingan *principal*. Dalam hal ini *principal* dapat melakukan tiga hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat untuk menjamin dilaksanakannya segala amanah yang telah didelegasikan kepada agen salah satunya dengan ancaman pengambil alihan, pemecatan, dan program insentif dengan berdasarkan prestasi kerja agen.

Sementara di sisi lain dalam konsepsi Islam diberikan suatu kejelasan mengenai hubungan yang berkaitan dengan suatu bentuk kerjasama antara manajer (*Agent*) dan pemilik (*Principal*). Bentuk relasi yang mendasari keberadaan



hubungan tersebut muncul dari konsep dasar amanah dalam kerangka kemutlakan tunggal atas kuasa Ilahi. Triyuwono (1997) menjelaskan bahwa amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan semestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki kewajiban penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah.

Pemberi amanah dalam hal ini adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kekuasaan Tuhan menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi atau *khalifatullah fil ardh*. Merujuk apa yang diutarakan oleh Triyuwono diatas, berarti nilai kemutlakan yang muncul dalam interaksi antara pengamanah dan yang diberi amanah adalah semata-mata atas kuasa Illahi. Dengan kata lain ketika terjadi suatu kontrak antara manajer (*Agent*) dengan pemilik (*Principal*) maka esensi yang terjadi pada kedua belah pihak bahwa mereka sama-sama mengemban amanah atas suatu kepemilikan yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka sebagai bentuk manifestasi atas fungsi manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*. Dalam hubungannya dengan eksistensi manusia sebagai tersebut diatas, maka tujuan utama dari keberadaan manusia adalah sebagai pengemban amanah sehingga implikasinya dalam konteks hubungan antara manajer dan pemilik dalam konsepsi Islam tidak ada alasan untuk mengarahkan tujuan tersebut ke dalam kekuasaan nafsu untuk mengejar keuntungan belaka.

Pemaparan mengenai *agency theory* di atas memberikan pemahaman bahwa perbedaan mendasar antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah



mengenai hubungan keagenan antara pemilik perusahaan dan manajer bisa dilihat pada pusat orientasinya. Perspektif akuntansi konvensional lebih menitikberatkan pada pemaksimalan kepuasan masing-masing individu sedangkan perspektif akuntansi syariah lebih menitikberatkan pada Tuhan sebagai pemilik segala yang ada di muka bumi ini.

### 2.1.2 Manajemen Laba

Menurut Sugiri (1998) dalam Sutami (2012) mendefinisikan manajemen laba dalam arti sempit merupakan tindakan yang berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi yang dilakukan oleh manajemen untuk tujuan pelaporan laba. Secara lebih luas manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut. Healy and Wahlen (1999) dalam Faradila dan Ari (2013) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgement* dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi. Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan manajemen untuk mengubah laba yang dilaporkan untuk tujuan tertentu.

### 2.1.2.1 Klasifikasi dan Bentuk Manajemen Laba

Menurut Hery (2009) dalam Faradila dan Ari (2013) manajemen laba dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *operating manipulations* dan *accounting manipulations*. *Operating manipulations* terkait dengan tindakan mengubah keputusan operasional yang memengaruhi aliran dana dan pendapatan bersih untuk satu periode. Contoh manipulasi operasi antara lain: memasukkan pengeluaran periode mendatang ke dalam periode ini karena laba periode ini telah mencapai target, menawarkan diskon penjualan yang menarik pada akhir tahun untuk menaikkan laba, dan mempercepat produksi barang dengan lembur agar dapat dikirim sebelum akhir tahun. *Accounting manipulations* terkait dengan penggunaan fleksibilitas dalam metode akuntansi untuk mengubah besarnya laba. Contoh manipulasi akuntansi antara lain: tidak mencatat pembelian barang yang diterima akhir tahun sampai tahun depan, membayar di muka pengeluaran tahun depan dan mencatatnya sebagai pengeluaran tahun ini, dan meminta pemasok agar tidak mengirimkan tagihan akhir tahun sampai tahun depan.

Menurut Siregar, dkk (2005) dalam Subani (2009) terdapat empat bentuk dari manajemen laba, yaitu:

1. *Taking a big bath*, dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan.
2. *Income minimation*, dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis.



Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebasan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan yang cepat dan sebagainya.

3. *Income maximization* yaitu memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati suatu pelanggaran kontrak utang jangka pendek, manajer perusahaan tersebut akan cenderung untuk memaksimalkan laba.

4. *Income smoothing* merupakan bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara menaikkan dan menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi.

#### 2.1.2.2 Teknik-Teknik Manajemen Laba

Teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam manajemen laba seperti diuraikan

Mulford dan Comiskey (2010) dalam Faradila dan Ari (2013) yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Teknik-Teknik Manajemen Laba**

| No. | Teknik                                   | Tujuan   |
|-----|--|--|
| 1.  | Mengubah metode depresiasi               | Perusahaan dapat mengurangi beban depresiasi untuk menaikkan laba periode berjalan, misalnya mengubah metode saldo menurun berganda ke metode garis lurus. |
| 2.  | Mengubah umur harta                      | Perusahaan dapat memperkecil beban depresiasi dan amortisasi untuk menaikkan laba periode berjalan dengan memperpanjang umur harta.                        |
| 3.  | Mengubah nilai sisa harta                | Perusahaan dapat memperkecil beban depresiasi untuk menaikkan laba periode berjalan dengan memperbesar nilai sisa harta.                                   |
| 4.  | Menetapkan cadangan piutang tak tertagih | Perusahaan dapat memperkecil biaya piutang tak tertagih untuk menaikkan laba periode berjalan dengan menetapkan cadangan piutang tak tertagih yang kecil.  |



**Tabel 2.1**  
**(Lanjutan)**

| No. | Teknik  | Tujuan  |
|-----|---|---|
| 5.  | Menetapkan cadangan kewajiban jaminan garansi                                 | Menetapkan cadangan kewajiban jaminan garansi yang kecil agar perusahaan dapat memperkecil biaya jaminan garansi untuk menaikkan laba periode berjalan.   |
| 6.  | Menentukan adanya kerusakan harta   | Perusahaan dapat membebaskan kerugian pada periode berjalan untuk menyimpan laba periode berjalan sebagai simpanan laba periode-periode mendatang atau menanggulangi beban periode sebelumnya.                            |
| 7.  | Mengestimasi tahap Penyelesaian kontrak dengan metode persentase penyelesaian | Menetapkan persentase penyelesaian yang besar agar perusahaan dapat mengakui pendapatan lebih besar untuk menaikkan laba periode berjalan.  |
| 8.  | Mempertimbangkan jumlah persediaan yang dihapus                               | Menurunkan jumlah persediaan yang seharusnya dihapus agar perusahaan dapat mengurangi beban tahun ini untuk menaikkan laba periode berjalan.  |
| 9.  | Mengakui pendapatan atas pengiriman barang ke kantor perwakilan               | Dengan mengakui pendapatan atas pengiriman barang ke kantor perwakilan yang sebenarnya belum terjual, perusahaan mengakui pendapatan lebih besar untuk menaikkan laba periode berjalan.                                   |
| 10. | Tidak menutup periode akuntansi   | Dengan tetap membuka periode akuntansi, perusahaan masih tetap dapat mencatat penjualan periode berikutnya untuk menaikkan laba periode berjalan. Teknik ini biasanya dilakukan dengan memundurkan tanggal pada komputer. |
| 11. | Mengakui seluruh penjualan yang pengirimannya tidak sekaligus                 | Dengan mengakui penjualan barang yang belum dikirim, perusahaan mengakui pendapatan lebih besar untuk menaikkan laba periode berjalan.  |
| 12. | Menilai terlalu tinggi persediaan akhir                                       | Dengan menilai terlalu tinggi persediaan, perusahaan dapat mengurangi harga pokok penjualan untuk menaikkan laba periode berjalan.  |
| 13. | Memalsukan umur piutang   | Perusahaan dapat mengurangi beban piutang tak tertagih tahun ini untuk menaikkan laba periode berjalan.   |

*Sumber: JRAK Vol. 4 No.1 Analisis Manajemen Laba Perbankan Syariah, 2013.*

### 2.1.2.3 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Siregar, dkk (2005) dalam Subani (2009) motivasi perusahaan dalam hal ini manajer melakukan manajemen laba adalah:



#### 1. *Bonus Scheme* (rencana bonus)

Manajer-manajer perusahaan yang menggunakan rencana bonus akan memaksimalkan pendapatan masa kini atau tahun berjalan mereka agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

#### 2. *Debt Covenant* (kontrak utang jangka panjang)

Motivasi ini sejalan dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian utang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.

#### 3. *Political Motivation* (motivasi politik)

Perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.

#### 4. *Taxation Motivation* (motivasi perpajakan)

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

#### 5. Pergantian CEO

CEO yang akan habis masa penugasannya (pensiun) akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian pula

dengan CEO yang kinerjanya kurang baik, ia akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.

#### 6. *Initial Public Offering* (penawaran saham perdana)

Saat perusahaan *go public*, informasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk mempengaruhi keputusan calon investor maka manajer berusaha menaikkan laba yang dilaporkan.

#### 2.1.3 *Income Smoothing*

*Income smoothing* merupakan bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara menaikkan dan menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi. Berikut akan dipaparkan mengenai jenis dari *Income smoothing* dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *Income smoothing*.

##### 2.1.3.1 Jenis *Income smoothing*

Subekti (2005) dalam Agustianto (2014) mengemukakan bahwa tindakan perataan laba dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Perataan melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi (*smoothing through event strategic management occurrence or recognition*). Perataan laba dilakukan dengan cara mengatur waktu transaksi aktual sehingga dapat mengurangi fluktuasi pendapatan yang dilaporkan. Perataan laba dalam dimensi ini dilakukan untuk mengurangi perbedaan laba yang dilaporkan dengan alternatif manajemen dapat



menentukan waktu pengakuan beberapa peristiwa.

## 2. Perataan melalui alokasi waktu (*smoothing through allocation over time*).

Manajemen memiliki kewenangan untuk mengalokasikan pendapatan atau beban dalam periode keuangan yang berbeda dalam rangka melakukan perataan laba.

## 3. Perataan laba melalui klasifikasi (*classificatory smoothing*). Manajemen

perusahaan melakukan perataan laba dengan cara mengklasifikasikan item-item dalam laba (*extra-ordinary items* atau *ordinary items*) untuk menimbulkan kesan yang lebih merata pada laporan keuangan yang dilaporkan.

### 2.1.3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tindakan *Income smoothing*

Faktor yang mempengaruhi tindakan *Income smoothing* sebagaimana diungkapkan oleh Agustianto (2014) diantaranya:

#### 1. Aspek Manajerial

Perataan laba (*income smoothing*) terkait erat dengan konsep manajemen laba (*earnings management*). Manajemen laba merupakan area yang paling kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. Perataan laba (*income smoothing*) sebagai salah satu upaya manajemen laba ini dapat dilihat dari dua sisi, pertama, manajemen laba dapat diartikan sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan kepentingannya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak hutang, dan *political cost* (*opportunistic earnings management*). Kedua, manajemen laba dapat dipandang dari perspektif *efficient contracting* (*efficient earning management*), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas

untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (Scott, 2003).

## 2. Aspek Akuntansi

Aspek ini lebih menekankan pada penggunaan teori akuntansi dalam mengamati perilaku manajemen untuk mempraktikkan perataan laba. Teori yang sering digunakan dalam mengamati praktik dari aktor perusahaan adalah teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator atau politisi adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka secara langsung terkait dengan kompensasi mereka. Pilihan kebijakan akuntansi oleh kelompok-kelompok ini didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat relatif prosedur akuntansi alternatif dalam memaksimalkan utilitas mereka.

### 2.1.4 Esensi dan Konsepsi Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah berkembang di Indonesia pada dasarnya dimulai dari kajian akademis dan riset. Menurut Alim (2011), bangkitnya akuntansi syariah di Indonesia dilatar belakangi banyaknya transaksi dengan dasar syariah baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non syariah. Adanya animo ini perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran, dan penyajian agar para praktisi dan pengguna laporan keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansinya. Oleh karena itu dibentuklah suatu produk standar akuntansi syariah yaitu PSAK 101 sampai dengan PSAK 112.



Terkait konsepsi akuntansi syariah sangat berbeda dengan konsepsi akuntansi konvensional terutama mengenai tujuan dari masing-masing sistem akuntansi tersebut. Sebagian besar literatur teori dan standar akuntansi konvensional menyebutkan bahwa tujuan akuntansi adalah memberikan informasi bagi pembuatan investasi dan kredit. Secara tersirat dari tujuan ini menggambarkan bahwa orientasi akuntansi lebih mengedepankan investasi, laba, serta perlindungan dan peningkatan harta. Sedangkan akuntansi syariah memiliki konsepsi yang berbeda. Imam Al Ghazali, seorang *hujjatul Islam*, ahli fikih sekaligus tasawuf menyebutkan bahwa setiap ilmu yang bersumber dari ajaran Islam bermuara pada *maqashid asy-syariah* antara lain melindungi dan meningkatkan iman, melindungi jiwa dan akal, keturunan, serta harta. Iman merupakan tujuan utama dari segala ilmu pengetahuan maupun aktivitas baik ibadah maupun muamalah (Chapra, 1999). Sebagai bagian dari muamalah, akuntansi syariah harus memenuhi akuntabilitas hamba Allah yang dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab mereka terhadap kewajiban membayar zakat. Menempatkan zakat sebagai tujuan utama informasi akuntansi adalah hal yang paling logis dalam pandangan islam. Menurut Gambling dan Karim (1991) dalam Alim (2011) tujuan informasi akuntansi adalah untuk kewajiban zakat yang lebih menekankan pada aset dan kewajiban (neraca) daripada pendapatan dan biaya (laporan laba rugi). Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan antara konsepsi akuntansi konvensional dan akuntansi syariah terdapat pada orientasi keduanya. Akuntansi konvensional berorientasi pada laba dalam laporan laba rugi sementara akuntansi syariah berorientasi pada aset sebagai dasar dalam penghitungan kewajiban zakat.



Konsepsi akuntansi syariah juga dipengaruhi oleh teorisasi akuntansi syariah itu sendiri. Mengacu pada *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) SFAC No. 1 paragraf 22 yang dikutip oleh Suwiknyo (2007), teorisasi akuntansi syariah dibagi dalam dua pendekatan metodologi. Metodologi pertama yaitu *“establish objectives based on the principles of Islam and its teaching and then consider these established objectives in relation to contemporary accounting thought”* yakni pengembangan akuntansi syariah bersumber dari prinsip ajaran Islam melalui kajian terhadap Al-Quran, Hadits, Fikih, serta praktik-praktik di masa pemerintahan Islam yang terkait dengan muamalah dan/atau akuntansi kemudian dikonformasikan dengan konsep akuntansi yang berjalan. Metodologi kedua yaitu *“start with objectives established in contemporary accounting thought, test them against Islamic Shari’a, accept those that are consistent with shari’a and reject those are not”* yakni metodologi ini mengacu pada kaidah umum muamalah yaitu asal hukum dalam muamalah adalah *mubah* kecuali ada dalil yang mengharamkan. Metodologi ini melakukan seleksi-seleksi terhadap teori, konsep, dan standar akuntansi konvensional yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berdasarkan pemaparan teorisasi akuntansi syariah tersebut dapat kita simpulkan bahwa esensi dan konsepsi akuntansi syariah yaitu semangat tauhid yang menghasilkan paradigma berfikir tauhid yang kuat dengan menempatkan Allah di atas segala-galanya.

#### 2.1.4.1 Syari’ah Enterprise Theory

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa konsepsi akuntansi syariah lebih menekankan pada zakat dalam penerapannya. Salah satu teori yang terkenal yaitu



*Syariah Enterprise Theory* yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat dan memiliki karakter keseimbangan. *Syariah Enterprise Theory* menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan *Syariah Enterprise Theory* tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *Syariah Enterprise Theory* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. *Stakeholders* dalam *Syariah Enterprise Theory*, meliputi tiga bagian (Triyuwono, 2007) yaitu Tuhan, manusia, dan alam.

Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin dan akan berdampak pada digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. *Stakeholder* kedua dari *Syariah Enterprise Theory* adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* yaitu pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan dan *indirect-stakeholders* yaitu pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan *stakeholder* terakhir dari *Syariah Enterprise Theory* yaitu alam yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam. Namun, alam tidak menghendaki



distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan yang diinginkan yaitu berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam.

Dari penjelasan tersebut di atas secara implisit dapat dipahami bahwa *Syariah Enterprise Theory* tidak mendudukkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, *Syariah Enterprise Theory* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya di Bumi (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia dan alam semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat didalamnya.

#### 2.1.4.2 Teori Maslahat

Salah satu teori yang merekonstruksi konsepsi akuntansi syariah yaitu teori maslahat. Konsep Maslahat dalam ekonomi Islam pertama kali dimunculkan oleh Imam Malik pendiri mazhab Maliki (*Masalih al-mursalah*) semakna dengan *istihsan*. Maslahat ialah menempatkan pertimbangan kepentingan umum (*public interest*) sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap masalah-masalah yang belum terjadi dalil hukumnya yang tegas, khususnya dalam urusan muamalah atau kegiatan ekonomi (Hamsir, 2012). Menurut bahasa, kata Maslahat berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa



kemanfaatan dan menolak kerusakan. Secara terminologi, arti maslahat dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselaraan, kepatuhan.

Kata maslahat dilawankan dengan kata *mafsadah* yang artinya kerusakan.

Kemudian dalam arti terminologis *syar'i* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan *syara'* yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Dikatakan oleh Al-gazali dalam Asmawi (2014) bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahat. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu demikian dikualifikasi sebagai maslahat.

Pemaparan mengenai teori maslahat tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam mengambil suatu hukum yang tidak ada hukum islam yang mengatakan kebolehan secara tegas maka salah satu cara yang digunakan adalah dengan melihat dampaknya terhadap masyarakat.

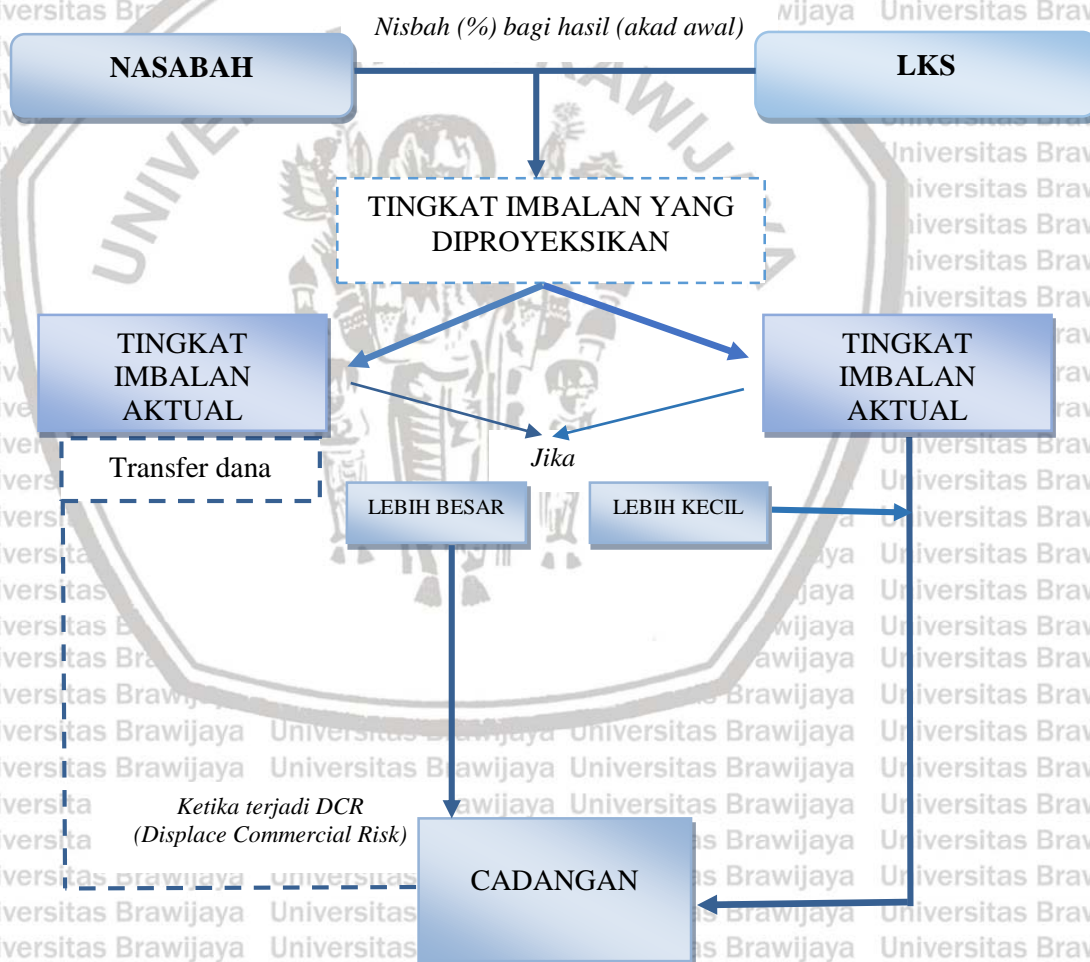
#### 2.1.5 *Income Smoothing* dalam Akuntansi Syariah di Indonesia

Salah satu mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan terutama perbankan syariah untuk memitigasi risiko penurunan pendapatan dan mempertahankan tingkat imbal hasil yang kompetitif maka manajemen melakukan *Income smoothing*. Perataan penghasilan (*Income smoothing*) menjadi alat penting dalam mengelola *Displace Commercial Risk* (DCR) yang digunakan oleh bank syariah untuk menjaga stabilitas keuangan (Fatwa DSN, 2012). Secara syariah legalisasi penggunaan mekanisme *income smoothing* telah disahkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan

Penghasilan (*Income smoothing*) Dana Pihak Ketiga. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa Metode Perataan Penghasilan (*Income smoothing*) boleh dilakukan dengan membentuk dana cadangan atau tanpa membentuk dana cadangan.

Berikut disajikan gambar mengenai ketentuan hukum mengenai *income smoothing* dengan membentuk dana cadangan sesuai fatwa tersebut.

**Gambar 2.1**  
**Metode Perataan Penghasilan DPK dengan Cadangan**



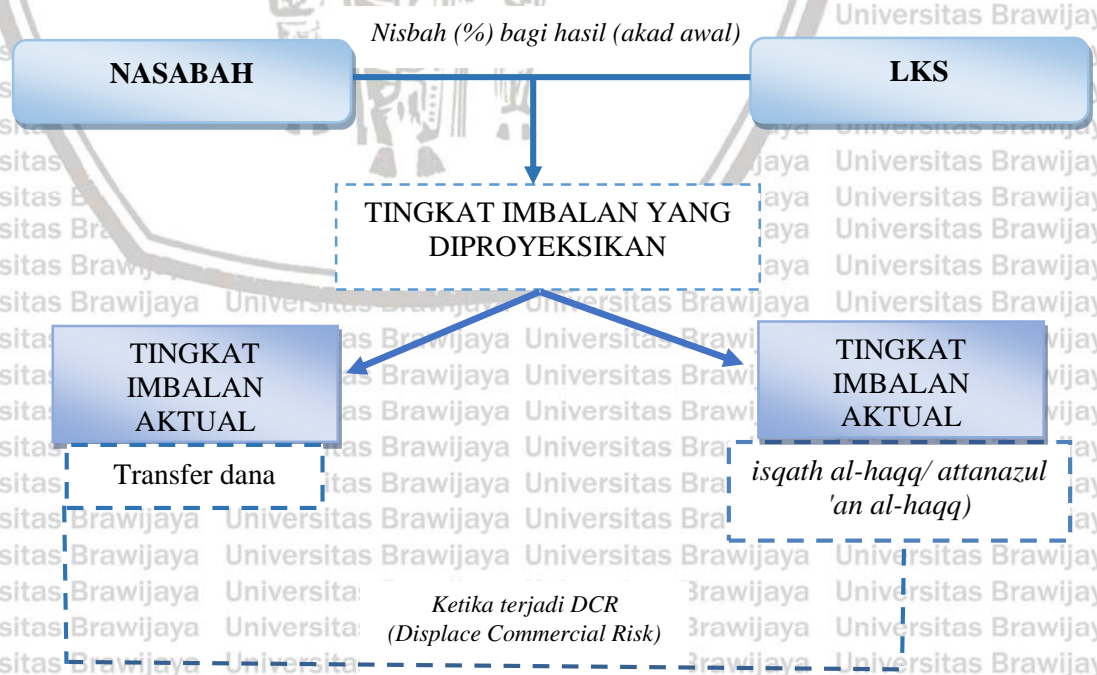
Sumber: diolah penulis



Berdasarkan diagram tersebut terdapat beberapa poin penting yaitu pertama, akad yang telah disepakati antara LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan nasabah dalam hal ini tingkat imbalan bagi hasilnya didasarkan atas proyeksi kinerja dari LKS. Kedua, apabila tingkat imbal hasil aktual lebih besar dari proyeksi awal maka LKS boleh mencadangkan kelebihan tersebut atas seizin nasabah. Ketiga, apabila tingkat imbal hasil aktual lebih kecil dari proyeksi tingkat bagi hasil maka LKS boleh mencadangkan sebagian hak bagi hasilnya sebagai wujud mitigasi apabila dirasa imbal hasil LKS terhadap nasabah tidak kompetitif (*Displace Commercial Risk*).

Metode *Income smoothing* lain yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 adalah *Income smoothing* tanpa membentuk dana cadangan. Berikut disajikan metode *Income smoothing* tersebut.

**Gambar 2.2**  
**Metode Perataan Penghasilan DPK Tanpa Cadangan**



Sumber: diolah penulis

Berdasarkan diagram tersebut terlihat bahwa *Income smoothing* tanpa menggunakan cadangan, apabila bagi hasil aktual lebih rendah dari proyeksi maka LKS boleh melepaskan haknya (*isqath al-haqq lattanazul 'an al-haqq*) untuk menyesuaikan imbalan bagi nasabah agar kompetitif. Dan perlu digarisbawahi bahwa *Income smoothing* hanya boleh digunakan LKS dalam kondisi yang diduga kuat berpotensi menimbulkan risiko penarikan dana nasabah akibat tingkat imbalan yang tidak kompetitif (*Displaced Commercial Risk*). Kondisi ini (DCR) harus ditentukan oleh pengurus LKS berdasarkan pedoman operasional/*standard operating procedure* (SOP) LKS dengan memperhatikan opini Dewan Pengawas Syariah.

#### 2.1.6 Konsep Fikih Muamalah

Menurut Mustofa (2016) pengertian fikih secara etimologis berakar pada kata kerja yaitu فقه – يُفقه – فقهٌ yang artinya paham, mengerti, pintar, dan kepintaran. Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari berikut:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisiNya, niscaya diberikan kepada-Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.” (HR. Bukhori)

Ibnu Manzhur dalam kitab Lisan Al'Arab menjelaskan fikih dari segi bahasa, yaitu:

Fikih berarti pengetahuan mengenai sesuatu dan memahaminya. Hal ini umumnya terkait pengetahuan masalah agama karena keunggulan dan kemuliaannya dari berbagai bidang ilmu ... Fikih pada dasarnya adalah paham, dikatakan, si fulan diberi fikih dalam hal agama, yakni diberi pemahaman mengenai masalah agama (Mustofa, 2016).



Fikih dari segi istilah (terminologi) umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amaliah* yang disimpulkan dari dalilnya yang sudah terperinci (Mustofa, 2016). Lebih lanjut Agus (2010) mengutip pendapat dari M. Ali al-Sayis (2010) yang dikenal dengan Fikih atau Hukum Islam adalah segala hal yang mengajarkan penyucian jiwa dan pembentukan moral yang dikenal dengan Akhlak atau Etika Islam, dan segala tuntunan hidup praktis yang mengatur perbuatan manusia yang menyangkut ibadah (aktivitas ritual) dan muamalah (aktivitas sosial). Dari beberapa pengertian mengenai Fikih tersebut, para pakar Ushul Fikih lebih cenderung kepada batasan Fikih yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai pengetahuan menyangkut hukum-hukum *syar'i amali* yang diperoleh dengan perantaraan dalil-dalil yang bersifat terperinci (Nur, 2013).

Kedudukan Fikih atau hukum Islam (*Islamic law*) sendiri merupakan salah satu unsur utama ajaran Islam. Berbeda dari dua unsur utama ajaran Islam yang lain yakni akidah dan akhlak, fikih menempati posisi paling sentral karena ia menandai keislaman seseorang secara formal. Hal ini dikarenakan fikih berisi ajaran Islam yang bersifat praktis implementatif dan bercorak lahiriah, yang berupa aturan-aturan hidup praktis yang meliputi aspek ritual (ibadah) dan aspek sosial (muamalah) (Supriyanto, 2010). Objek kajian fikih adalah perilaku orang *mukallaf*. Perilaku ini mencakup perilaku hati, perkataan, dan perbuatan. Perilaku *mukallaf* di sini bisa berarti perilaku yang berlandaskan syariah baik berupa kewajiban atau anjuran untuk melakukan (wajib dan *mandub*), kewajiban atau anjuran untuk meninggalkan (haram dan makruh), ataupun yang bersifat pilihan, boleh melakukan



atau meninggalkan (mubah) (Arwani, 2012).

Adapun muamalah menurut Arwani (2012) yang di kutip dari Ali (1996), berasal dari kata *'amala, yu'amilu, mu'amalatan* yang berarti beraksi, bekerja, berproduksi. Kemudian kata muamalah disandingkan dengan kata fikih yang secara bahasa berarti pemahaman. Fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa (Fadlan, 2014). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tatanan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. Muamalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, maka wajar bila Al-Syatibi mengatakan bahwa muamalah merupakan interaksi dan komunikasi antara orang-orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan harta, aktivitas ekonomi, atau bisnis yang dilakukan menggunakan akad (Mustofa, 2016).

Fikih seringkali dianggap masyarakat bersifat teosentris (aliran yang berpegang kepada teks-teks syariat secara kaku tidak bisa menjawab permasalahan hukum yang timbul di tengah masyarakat, dan terkesan pasif, kuno, konserfatif, dan tidak realistik. Tidak jarang juga bahasa yang digunakan dalam buku-buku fikih adalah bahasa Arab dan dalam jumlah jilid yang banyak, menggunakan tata bahasa



(*uslub*) yang tidak sederhana (Hilal, 2012). Ditambah lagi adanya arus modernisasi yang mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya.

Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat dari nilai-nilai agama. Maka muncullah isu fikih kontemporer sebagai reaksi dari keadaan-keadaan tersebut. Kata kontemporer secara etimologi berarti masa yang sama atau masa kini. Jadi fikih muamalah kontemporer adalah serangkaian aturan hukum

Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang atau saat ini. Fikih kontemporer ini merupakan hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kini, dengan menggali sumber hukum Islam berupa Alqur'an, sunnah dan jurisprudensi ulama terdahulu serta mengintegrasikan iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat (Hilal, 2012).

Teks Al-Qur'an tentunya tidak mengalami perubahan, tetapi pemahaman dan penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan perubahan sosial merupakan suatu proses kemasyarakatan yang berjalan secara terus menerus, maka perubahan penerapan dan pemahaman ajaran islam juga harus bersifat kontinu sepanjang zaman. Dengan demikian islam akan tetap relevan dan aktual, serta mampu menjawab tantangan modernitas.

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam fikih mua'amalah seperti yang dikemukakan oleh Suhendi (2007) yaitu:

1. Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan)
2. Konsep Fikih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan

3. Menetapkan harga yang kompetitif.
4. Meninggalkan Intervensi yang dilarang
5. Menghindari Eksploitasi
6. Memberikan Kelenturan dan Toleransi
7. Jujur dan Amanah

Selain prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar berfikir dalam bermuamalah juga terdapat asas-asas yang harus dipatuhi dalam mempraktikkan transaksi-transaksi yang ada dalam perekonomian, diantaranya (Jundiani, 2009):

1. Asas *Al-Huriyah* (kebebasan)

Implikasi dari asas ini dalam kegiatan perekonomian yaitu para pihak yang melaksanakan akad mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2. Asas *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3. Asas *Al-Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

4. Asas *Al-Ridho* (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.



## 5. Asas Ash-Shidiq (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang membahas mengenai topik manajemen laba dalam hal ini *income smoothing* ditinjau dari perspektif hukum islam (fikih) sudah pernah dilakukan sebelumnya. Berikut dapat dilihat secara terperinci mengenai penelitian terdahulu tersebut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

| Nama Peneliti  | Judul   | Hasil Penelitian  |
|--|---|---|
| Nasrullah, Zaki Fuad, dan Muhammad Yasir Yusuf (2014). | Analisis Tindakan Perataan Laba dalam Meraih Keuntungan Perusahaan Ditinjau Menurut Etika Ekonomi Islam | Tindakan perataan laba merupakan tindakan penyimpangan dalam tataran etika ekonomi islam. Tindakan ini melanggar konsep <i>maqashid syariah</i> karena mengandung unsur penipuan ( <i>tadlis</i> ) dan ketidakjelasan ( <i>gharar</i> ). Informasi berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dalam tindakan perataan laba tidak semua diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. |
| Indah Muliasari dan Dalili Dianati (2014)              | Manajemen Laba dalam Sudut Pandang Etika Bisnis Islam   | Ditinjau dari etika bisnis islam maka praktik manajemen laba merupakan sebuah praktik yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis islam.  |
| Moh. Syaiful (2017).                                   | Manajemen Laba ( <i>Earnings Management</i> ) Dalam Tinjauan Etika Islam                                | Manajemen laba dalam tinjauan etika islam boleh dilakukan dengan berdasarkan spirit Islam dan dilakukan melalui proses islami yang memberikan dampak yang bermanfaat bagi semua pihak.  |



**Tabel 2.2**  
**(Lanjutan)**

| Nama Peneliti  | Judul  | Hasil Penelitian  |
|--|--|---|
| Skripsi: Hanni Khairani (2015).                        | Etika Bisnis Islam tentang Manajemen Laba                                    | Tidak ada bentuk manajemen laba yang dibolehkan menurut syariat. Dan praktik manajemen laba belum sesuai dengan ajaran agama islam maupun prinsip-prinsip dasar etika bisnis islam karena masih mengandung unsur penipuan, kecurangan, dan <i>gharar</i> . Serta tidak mencerminkan perilaku-perilaku pebisnis islami yaitu <i>shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah</i> . |
| Sri Luayyi (2014).                                     | Teori Keagenan dan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer.          | Penelitian ini menjelaskan bahwa etis atau tidaknya tindakan manajemen laba tergantung pada etika yang dianut oleh para manajer.  |
| Ahmad Yusuf dan Marzuqi Achmad Badarudin Latif (2010). | Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam                             | Manajemen laba yang baik dapat dilakukan dengan cara manajemen operasi yang baik, misalnya manajemen produksi, manajemen keuangan dan investasi, dan manajemen pemasaran. Dijelaskan juga bahwa hukum dasar dari berbagai jenis muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.  |
| Akhmad Riduwan (2013)                                  | Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba: Studi Hermeneutika | Dalam perspektif para akuntan dan pemeriksa pajak, praktik manajemen laba tidak dapat dipandang sebagai suatu manipulasi <i>earnings</i> selama praktik tersebut dilakukan dalam kerangka standar akuntansi.  |

*Sumber: Penelitian Terdahulu (diolah).*

Dari pemaparan mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa masih terdapat pro dan kontra mengenai diperbolehkan atau tidaknya tindakan perataan laba oleh karena itu sangat diperlukan penelitian yang ditujukan untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai *income smoothing* dan penerapannya pada saat ini.

### **2.3 Batasan Penelitian dan Kerangka Berfikir**

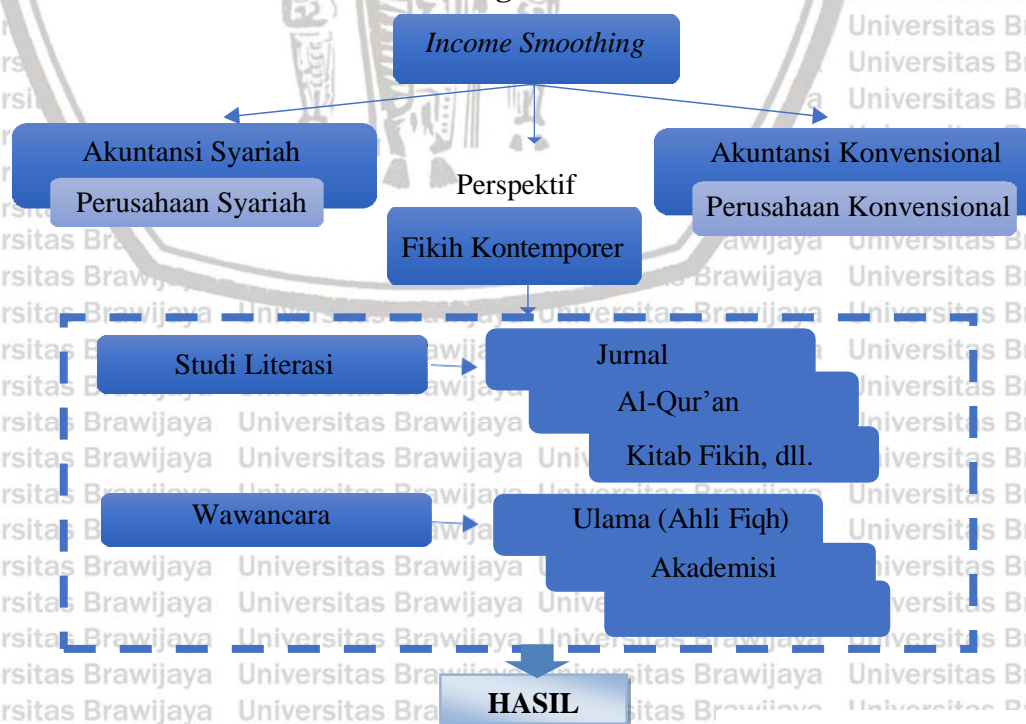
Peneliti membuat batasan penelitian agar pembahasan tidak melebar dan tetap fokus. Adapun batasan penelitian yang dibuat meliputi:



1. Praktik *income smoothing* dalam penelitian ini berfokus pada akad investasi (*mudharabah*) yang dilakukan di perbankan syariah dengan perbandingan di perbankan konvensional.
2. Penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah di Indonesia meliputi regulasi baik yang terdapat dalam PSAK Syariah maupun fatwa DSN dan fikih kontemporer sebagai instrumen analisis kesesuaian dengan *maqaashid-syariah*.
3. Penelitian ini berfokus kepada solusi yang masih bersifat konseptual mengenai praktik *income smoothing* yang sesuai dengan *maqaashid-syariah*.

Berdasarkan batasan-batasan penelitian tersebut peneliti menyusun kerangka berfikir berikut:

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber: diolah penulis

### B III

## METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Darmadi (2013) yang menyatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan dari suatu penelitian tertentu. Berikut dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang peneliti lakukan.

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan komparasi untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena yang terjadi. Menurut Sukmadinata (2009), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan penelitian kualitatif yang dikemukakan Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2001) merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif



sendiri dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta yang nampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga tercipta suatu gambaran yang kompleks mengenai suatu fenomena sosial.

Berdasarkan pemaparan mengenai jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini secara umum akan mendeskripsikan *income smoothing* dalam berbagai sudut pandang dari akademisi, praktisi, dan ulama. Peneliti membutuhkan baik data primer maupun sekunder untuk dapat menjelaskan arti, konsep, hingga komparasi atau perbandingan penerapan *income smoothing* di entitas syariah dan konvensional. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaannya, baik dari metode penerapan *income smoothing* hingga kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Hingga dapat disimpulkan hasil dari *income smoothing* sesuai dengan perspektif Akuntansi Syariah dan Fikih Kontemporer.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Malang, dengan objek penelitian Bank Muamalat KC Malang yang berlokasi di Jl. Kertanegara No.2, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, serta bank CIMB Niaga KC Malang yang berlokasi di Jl. Merdeka Timur No. 4, Kidul Dalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi ini salah satunya yaitu teori

substantif yang menyatakan bahwa dalam memilih lokasi penelitian diperlukan adanya pertimbangan substansi fenomena yang terjadi di masyarakat itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Moleong (2001), dalam menentukan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada. Sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya, dan tenaga juga peneliti jadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Beberapa pertimbangan tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan di Kota Malang.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2010), sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Menurut Moleong (2001), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok, yang diperoleh dengan cara observasi langsung, menggunakan informan, menggunakan kuisioner maupun wawancara (Nazir, 1992). Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang disebut informan yang terdiri dari Akademisi, Praktisi, dan



Ulama' dengan menggunakan metode wawancara mendalam.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak-pihak lain dan bukan diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian dan sumber-sumber lain yang mendukung seperti jurnal, majalah, Alquran, hadist, kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa DSN-MUI, dan juga peraturan-peraturan yang berlaku di PSAK syariah.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai masing-masing teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti.

#### 1. Wawancara mendalam

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Pengumpulan data menggunakan teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti yang berperan sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan informan. Kunci dari teknik pengumpulan data ini adalah informan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Pertimbangan dalam pemilihan informan penelitian ini merujuk pada pendapat yang dikemukakan Faisal (1990) dalam Agung (2010) berikut ini:

- a. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti.

- b. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti.
- c. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu, dan kesempatan untuk dimintai keterangan.
- d. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan yang mengetahui kejadian tersebut.

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis menentukan informan yang akan diwawancarai sebagai berikut:

a) Akademisi

Peneliti memilih informan dari kalangan akademisi dengan pertimbangan bahwa akademisi memiliki sifat selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kecerdasan intelektual yang dibangun atas dasar pemikiran ilmiah yang natural, menjunjung tinggi objektivitas, dan netralitas. Hal ini juga didasarkan bahwa akademisi dianggap sebagai sumber informasi yang idealismenya masih sangat tinggi sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang bersifat netral dan natural berdasarkan ilmu pengetahuan yang ilmiah. Berikut data Akademisi yang menjadi informan dalam penelitian ini:



**Tabel 3.1**  
**Informan Akademisi**

| No. | Nama                                  | Profil  | Keterangan   |
|-----|---------------------------------------|---|--|
| 1.  | Prof Iwan Triuwono, SE, Ak, MEC, PhD. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru Besar Universitas Brawijaya</li> <li>- Ketua Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Brawijaya</li> <li>- Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura</li> <li>- Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd)</li> <li>- Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi (ISE) Bidang Perbankan dan Pasar Modal</li> <li>- Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)</li> </ul> | Beliau merupakan perintis lahirnya wacana akuntansi syariah di Indonesia, dan merupakan pemikir akuntansi syariah filosofis-teoritis. Banyak penelitian beliau mengenai etika bisnis, ekonomi islam, dan akuntansi islam yang terduplikasikan.   |
| 2.  | Achmad Zaky, SE., MSA., Ak.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen Universitas Brawijaya</li> <li>- Asisten Ahli Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi</li> <li>- Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Syariah (IAI KASy)</li> <li>- Sekretaris Satuan Pengawas Internal UB</li> <li>- Aparat Pengawas Internal, Irjen Kemenristek Dikti</li> </ul>  | Beliau banyak mencurahkan perhatian akademiknya pada bidang akuntansi dan keuangan syariah. Diantaranya, mengembangkan kelompok studi bidang akuntansi dan keuangan syariah (Islamic Finance and Accounting Studies – IFAS), menjadi pembina kelompok guru SMU/SMK pengajar akuntansi perbankan syariah se-Jawa Timur, menulis berbagai karya ilmiah bidang akuntansi dan keuangan syariah |
| 3.  | Dr. Dra. Asfi Manzilati, ME.          | Lektor Kepala Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya   | Beliau aktif menulis berbagai karya ilmiah di bidang keuangan dan perbankan syariah  |
| 4.  | Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.   | Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim   | Beliau aktif menulis di bidang ekonomi islam, bisnis syariah, dan keuangan sosial islam  |

*Sumber: diolah penulis.*

Pada dasarnya, pemilihan jumlah informan dalam penelitian ini mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian informasi yang menjadi tujuan

wawancara, sebagaimana diungkapkan oleh Martha & Kresno (2016) setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian. Teknik pemilihan informan yang peneliti lakukan yaitu *criterion sampling* yang diungkapkan oleh Patton (2002), dimana pemilihan informan didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan yaitu ahli dalam bidang akuntansi syariah dan perbankan syariah. Sehingga diperoleh keempat informan tersebut yang dianggap cukup mewakili dari masing-masing bidang akuntansi syariah dan perbankan syariah yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### b) Praktisi

Praktisi pada dasarnya merupakan pelaksana dari suatu ilmu pengetahuan tertentu. Peneliti memilih informan dari kalangan Praktisi baik entitas syariah maupun konvensional dikarenakan Praktisi merupakan seorang yang ahli dan terlibat secara langsung dalam suatu praktik yang ingin diteliti dalam hal ini *income smoothing*. Keterlibatan secara langsung ini membuat para Praktisi dianggap mempunyai informasi lebih mengenai praktik-praktik yang relevan ada di lapangan.

Berikut Praktisi yang menjadi informan dalam penelitian ini:

**Tabel 3.2**  
**Informan Praktisi**

| No. | Profesi Praktisi                                  | Instansi                          | Keterangan   |
|-----|---|-----------------------------------|--|
| 1.  | <i>Marketing Funding Manager</i>                  | Bank Muamalat Indonesia KC Malang | Marketing Funding sendiri bertanggung jawab pada pencapaian target bidang usaha <i>Funding</i> (pendanaan) untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari nasabah |
| 2.  | <i>Market Risk and Model Validation Head Bank</i> | CIMB NIAGA KC Malang              | Divisi yang mengantisipasi beragam risiko, khususnya risiko pasar. Serta memberikan arahan dan masukan untuk mitigasi risiko.  |



**Tabel 3.2**  
**(Lanjutan)**

| No. | Profesi Praktisi                                | Instansi               | Keterangan  |
|-----|---|------------------------|---|
| 3.  | Staff Akuntansi Keuangan                        | PT Bumi Asri Situbondo | Bertugas menyusun administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan   |
| 4.  | FAT ( <i>Finance, Accounting, Tax</i> ) Manager | PT Budi Karya Raharja  | Bertugas menyusun perencanaan pajak, identifikasi dan mitigasi risiko pajak, serta mengelola ketentuan pajak dan proses ketentuan pajak |

*Sumber: diolah penulis.*

Dua informan di atas merupakan informan utama dalam penelitian ini yaitu

*Marketing Funding Manager* dari Bank Muamalat Indonesia KC Malang dan

*Market Risk and Model Validation Head Bank* dari CIMB NIAGA KC Malang.

Kedua instansi ini menjadi objek utama dalam penelitian ini menimbang bahwa

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan

prinsip syariah dalam operasionalnya sehingga bank ini dianggap menjadi *role*

*model* dalam menerapkan transaksi-transaksi yang berbasis syariah. Di sisi lain,

Bank CIMB Niaga merupakan bank dengan cabang ritel di berbagai negara, tidak

hanya di Indonesia ([www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)), sehingga diharapkan dapat

memberikan gambaran secara holistik mengenai topik penelitian ini. Kemudian dua

informan terakhir merupakan informan pendukung untuk memberikan informasi

tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

#### c) Ulama (Ahli Fikih)

Secara harfiah Ulama berarti orang yang berilmu, merujuk pada pengertian

Ulama di Indonesia bahwa Ulama merupakan sebutan bagi orang yang ahli atau

mempunyai kelebihan di bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam ilmu tafsir,

ilmu kalam, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu Sharaf, ilmu fikih dan lain



sebagainya. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mewawancarai Ulama yang dianggap sangat erat kaitannya dengan topik penelitian guna untuk memberikan gambaran dari perspektif Fikih dalam menilai praktik *income smoothing* yang terjadi pada entitas yang diteliti. Berikut Ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini:

**Tabel 3.3**  
**Informan Ulama**

| No. | Nama                                      | Profesi  | Keterangan   |
|-----|---|--|--|
| 1.  | Dr. Habib Segaf Bin Hasan Baharun, M.H.I. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengasuh Pondok Pesantren Banat DALWA</li> <li>- Rektor Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah</li> </ul>       | Beliau merupakan pengasuh, penasehat, serta pembicara di beberapa majelis di berbagai kota, tercatat sudah 18 judul buku hasil karya beliau yang diterbitkan.  |
| 2.  | K. Muhammad Abdullah Syukri, S. IP, MA.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengasuh Ma'had As-Syakiroh 2 YLPI Buntet</li> <li>- Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren</li> </ul> | Beliau menjalankan aktivitas di Jakarta sebagai Wakil <i>Direktur Center for Indonesian Policy Analysis</i> (CIPA), <i>Indonesian Returning Expert</i> di Korporasi Jerman untuk Kerja Sama Internasional (GIZ Jerman), dan Tim Asistensi Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. |

Sumber: diolah penulis.

Pertimbangan yang mendasari pemilihan informan utama dari kalangan Ulama tersebut adalah asas kesesuaian dan kecukupan informasi yang ingin dicapai oleh peneliti. Pertimbangan *Sampling politically important cases* juga diperhatikan dalam teknik penentuan informan dimana pemilihan informan dengan tidak mengikutsertakan subyek yang sensitif secara politis sehingga akan mengaburkan fokus studi (Patton, 2002), dalam hal ini Dewan Syariah Nasional meskipun sangat kompeten untuk kriteria kesyariahan dalam penelitian ini.



## 2. Studi dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga melakukan studi pustaka dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan. Selain itu peneliti melakukan Teknik pengumpulan data dengan cara *internet searching* dengan cara mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis berkaitan masalah yang diteliti.

### 3.5 Teknik Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Sejalan dengan yang diungkapkan Sugiyono (2013) peneliti melakukan upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian dengan cara memeriksa keabsahan data meliputi pengujian *credibility*, pengujian *transferability*, pengujian *dependability*, dan pengujian *confirmability*. Berikut masing-masing pengujian yang peneliti lakukan:

#### 1. Pengujian *credibility* (kepercayaan)

Pengujian *credibility* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa teknik yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan.

Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui atau baru. Perpanjangan pengamatan ini difokuskan pada data yang sudah ada, apakah data yang telah didapat lapangan benar atau tidak. Bila setelah dicek kembali benar, berarti data tersebut dapat dipercaya (*credible*) dan peneliti dapat mengakhiri waktu perpanjangan.

b. Peningkatan ketekunan

Peneliti dalam hal ini telah melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Pengamatan yang berkesinambungan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi sumber data dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan dokumentasi naskah-naskah tertulis baik di jurnal, skripsi, thesis, disertasi, Al-Qur'an maupun Hadits sehingga diperoleh hasil penelitian yang rinci.

2. Pengujian *transferability* (keteralihan)

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka dalam hal ini peneliti membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan



demikian, maka pembaca dapat dengan mudah mengaplikasikan hasil penelitian dapat diterapkan dalam kasus lain.

### 3. Pengujian *dependability* (kebergantungan)

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing. Mulai dari pengumpulan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

### 4. Pengujian *confirmability* (kepastian)

Pengujian konfirmabilitas adalah pengujian apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya, dalam hal ini peneliti menyajikan-lampiran data yang diperoleh selama penelitian dilakukan sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dari awal peneliti terjun ke lapangan hingga pada akhir penelitian atau pengumpulan data. Arti dari analisis data sendiri adalah suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang data dan memungkinkan untuk mempresentasikan temuan penelitian pada orang lain (Ahmadi, 2014).

Teknik analisis data untuk penelitian kualitatif belum ada pola yang baku, namun berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan penelitian kualitatif, pada dasarnya teknik analisis untuk mendapatkan temuan penelitian, dilakukan mengikuti tahapan berikut yaitu: paparan data, pengolahan data, temuan penelitian, pembahasan

temuan penelitian, dan penarikan kesimpulan (Neolak, 2014). Berikut dipaparkan masing-masing tahapan:

#### 1. Paparan Data

Peneliti akan menyajikan tampilan data dari sumber data yang diperoleh hal ini data wawancara dan data dokumentasi.

#### 2. Pengolahan Data

Setelah selesai memaparkan data, data memasuki tahap diolah. Pengolahan data yang dimaksud di sini adalah data diolah secara kritis dan dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk sub bab sesuai dengan jumlah butir pertanyaan pada perumusan masalah penelitian.

#### 3. Temuan Penelitian dan Pembahasan Temuan Penelitian

Temuan penelitian adalah tahapan setelah pengolahan data dan telah menjadi sub bab pembahasan yang ingin diketahui para pembacanya. Dalam pembahasan ini diharapkan peneliti membahas dengan disesuaikan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Untuk menunjukkan kualitas penelitian, maka penulis akan mengaitkannya dengan teori yang menyangkut dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Penerapan *Income Smoothing* pada Entitas Syariah dan Konvensional

Perbankan di Indonesia beroperasi melalui dua sistem yaitu sistem konvensional dan syariah. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal bank, namun bank syariah baru muncul pada tahun 1991 dengan adanya Bank Muamalat sebagai bank pertama yang menggunakan prinsip syariah. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan "*dual banking system*" dimana bank konvensional diizinkan membuka unit usaha syariah dalam kegiatan operasionalnya yang disebutkan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kebijakan ini merupakan revisi atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga sejak saat itu bank-bank konvensional mulai mendirikan unit syariah ataupun mengakuisisi bank lain untuk dijadikan bank dengan sistem prinsip syariah (Nasution & Setiawan, 2007).

##### 4.2.1 Praktik *Income Smoothing* pada Entitas Syariah di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang paling mendasar adalah sistem bagi hasil, sehingga konsekuensi dari adanya prinsip bagi hasil ini memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai



kebersamaan dan persaudaraan dalam beroperasi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Salah satu transaksi yang populer dalam LKS (Lembaga Keuangan Syariah) adalah *mudharabah*. Produk bank yang menggunakan akad *mudharabah* terletak pada giro, tabungan, dan deposito. Secara syariah, legalisasi penggunaan akad *mudharabah* pada giro, tabungan dan deposito telah disahkan melalui fatwa DSN MUI no 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, no. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan no. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Seluruh produk tersebut patuh terhadap fatwa DSN MUI no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*. Praktik *mudharabah* pada bank syariah dilaksanakan sesuai dengan karakteristik akad *mudharabah*, dimana bank menerima dana dari nasabah pemilik dana dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK) dan disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Atas transaksi kerjasama tersebut, bank syariah memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah, dan kerugian ditanggung oleh nasabah pemilik dana (PSAK 105).

Dari pemaparan di atas, bagi hasil dari kinerja LKS menjadi hal yang krusial, baik bagi nasabah maupun LKS. Oleh karenanya LKS sebagai pihak yang mengelola dana mempunyai kepentingan untuk mengefisienkan pendapatan yang dilaporkan agar menarik perhatian nasabah (pemilik dana). Berhubungan dengan bagi hasil ini peneliti menemukan hal yang unik. Mengingat bahwa ketentuan bagi hasil ini diatur dalam PSAK 105 tentang *mudharabah*:

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu



laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105)

**Tabel 4.1**  
**Contoh Dasar Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah**

Contoh

| Uraian                | Jumlah | Metode Bagi Hasil          |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Penjualan             | 100    |                            |
| Harga Pokok Penjualan | 65     |                            |
| Laba Kotor            | 35     | <i>Gross Profit Margin</i> |
| Beban                 | 25     |                            |
| Laba rugi bersih      | 10     | <i>Profit Sharing</i>      |

Sumber: PSAK 105

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi dan tabel tersebut jelas bahwa dasar bagi hasil adalah laba kotor atau laba bersih bukan pendapatan usaha (omset).

Hal ini didukung oleh pernyataan Akademisi di bidang Akuntansi Syariah, Achmad Zaky, SE., MSA., Ak., mengenai dasar bagi hasil dalam akad *mudharabah* berikut:

“Yang dibagihasilkan itu adalah pendapatan yang diperoleh dari mengelola dana nasabah setelah dikurangi sama beban-beban operasional perusahaan, sejauh ini seperti itu peraturan PSAK maupun fatwa DSN”. (Lampiran 2: Draf Wawancara Akademisi).

Namun pernyataan diatas agak berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu praktisi yang berprofesi sebagai *Marketing Funding Manager* di Bank Muamalat Indonesia berikut ini:

“Sebenarnya kan nasabah itu pengennya kalau nyimpan uang itu tidak berkurang, jadi pihak kami sampai saat ini masih menggunakan revenue sharing, bukan profit sharing. Profit sharing itu terlalu berisiko karena shahibul maal ikut menanggung biaya operasional juga, jadi disini kami ingin melindungi hak nasabah mengenai terjaminnya “bagi hasilnya” dengan tanpa perlu menanggung biaya operasional tadi”. (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)

Pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa dasar pembagian bagi hasil di Indonesia secara jelas memang tidak menggunakan *profit sharing*. Terdapat

perbedaan pendapat dimana akademisi perbankan syariah menyatakan bahwa basis bagi hasil menggunakan laba kotor, sedangkan praktisi Bank Muamalat Indonesia menyatakan bahwa basis bagi hasil menggunakan *revenue sharing*. Memang benar bahwa basis bagi hasil menurut PSAK dan fatwa DSN menggunakan laba kotor seperti penjabaran pada isi PSAK 105 tentang *mudharabah* di atas, namun kenyataan di lapangan, bank syariah menggunakan pendapatan bersih (*revenue sharing*) sebagai basis bagi hasil. Hal ini lebih jelas lagi bila dilihat dari laporan laba rugi komprehensif Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 berikut ini.

**Gambar 4.1**  
**Laporan Laba/Rugi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.**

| PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.<br>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN<br>KOMPREHENSIF LAINNYA<br>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR<br>PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019<br>(Disajikan dalam ribuan Rupiah,<br>kecuali laba bersih per saham dasar) |                   |                                      |                                      | PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.<br>STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND<br>OTHER COMPREHENSIVE INCOME<br>FOR THE YEAR ENDED<br>AS OF DECEMBER 31, 2019<br>(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,<br>except share data) |  |  |  |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
|   | Catatan/<br>Notes | 31 Desember /<br>December 31<br>2019 | 31 Desember /<br>December 31<br>2018 |   |  |  |  |
| <b>PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA<br/>OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB</b>   | 31                |                                      |                                      | <b>REVENUE FROM FUND<br/>MANAGEMENT AS MUDHARIB</b>   |  |  |  |
| Pendapatan dari penjualan   |                   | 1.178.213.058                        | 1.471.094.206                        | Income from sales   |  |  |  |
| Pendapatan dari bagi hasil  |                   | 1.217.771.838                        | 1.450.097.899                        | Income from revenue sharing   |  |  |  |
| Pendapatan dari ijarah - bersih   |                   | 4.871.726                            | 30.754.156                           | Income from revenue from ijarah - net   |  |  |  |
| Pendapatan usaha utama lainnya  |                   | 378.834.242                          | 268.244.099                          | Other main operating income   |  |  |  |
| Jumlah pendapatan bank sebagai<br>mudharib  |                   | 2.779.690.864                        | 3.220.190.360                        | Total revenue from fund<br>management as mudharib   |  |  |  |
| <b>HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL<br/>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>   | 32                | (2.396.720.810)                      | (2.241.736.938)                      | <b>THIRD PARTIES' SHARE ON RETURNS<br/>OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>   |  |  |  |
| <b>HAK BAGI HASIL MILIK BANK</b>  |                   | 382.970.054                          | 978.453.422                          | <b>BANK'S SHARE IN REVENUE SHARING</b>  |  |  |  |

Sumber: Annual Report PT BMI, 2019

Gambar 4.1 secara jelas menyajikan basis alokasi dari bagi hasil pihak ketiga adalah pendapatan yang diperoleh dari bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Hal ini menguatkan pernyataan dari praktisi Bank Muamalat Indonesia bahwa dasar penentuan bagi hasil dalam akad *mudharabah* adalah *revenue sharing*.

Konsekuensi dari hal ini maka tidak akan ada kerugian yang akan ditanggung oleh



nasabah karena pendapatan yang dibagihasilkan tidak mempertimbangkan biaya operasional. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak nasabah dan meminimalisir risiko adanya kerugian yang berakibat pada tergerusnya modal nasabah. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Virginia, Mulawarman, dan Kamayanti (2013) yang menemukan bahwa memang perbankan menggunakan *Net Revenue Sharing* sebagai basis bagi hasilnya. Hal ini membuat *shahibul maal* tidak akan mengalami kerugian sama sekali padahal siapa yang bisa memastikan bahwa suatu usaha akan untung? Dalih yang digunakan pun sama yaitu untuk menjamin kepentingan nasabah/*sahibul maal* agar tidak mengalami kerugian yang menyebabkan keluarnya modal dari perbankan.

Keberpihakan ini juga terlihat pada penjaminan hak nasabah atas bagi hasil ini diperkuat dengan legalisasi fatwa DSN MUI no. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musarakah*, dan *Wakalah Bil Istitsmar*. Dalam fatwa ini dijelaskan pada poin 4 ketentuan umum bahwa Penjaminan pengembalian modal yang dimaksud dalam fatwa ini adalah penjaminan dari *mudharib/syarik/wakil bil istitsmar* (pengelola modal dalam hal ini LKS) untuk mengembalikan modal secara penuh kepada *Shahib al-MallSyarik/Muwakkil* (pemilik dana dalam hal ini nasabah atau deposan).

Ketentuan dalam fatwa secara jelas mengindikasikan bahwa LKS mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal secara utuh kepada nasabah. Seperti kutipan wawancara dengan Akademisi di bidang Ekonomi Syariah, Dr. Dra. Asfi

Manzilati, ME. berikut:



“kalau mengenai penjaminan pengembalian modal tentu ada legalitasnya, silakan mbaknya mengacu pada DSN MUI no.105/DSN-MUI/X/2016, namun perlu dipahami ya, habit dari masyarakat kita yang memang sebagai pelaku ekonomi rasional tidak akan mau uang tabungannya berkurang, itu wajar sekali, sehingga akan menjadi masuk akal jika dari pihak LKS memberikan kepastian kepada nasabah untuk pengembalian modalnya secara utuh, toh dalam fatwa dibolehkan kok, ini di luar konteks substansi akad mudharabahya ya.” (Lampiran 4: Draf Wawancara Akademisi)

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai kepastian pengembalian modal secara utuh dalam akad *mudharabah* tentu hal ini mempunyai konsekuensi terhadap dilanggarnya ketentuan akad *mudharabah* itu sendiri. Mengingat bahwa dalam akad *mudharabah*, jika terjadi kerugian maka pemilik dana dalam hal ini nasabah/deposan akan menanggung risiko kerugian yang berakibat pada tergerusnya modal selama itu bukan kesalahan *mudharib*. Jika kepastian pengembalian modal ini diikutsertakan dalam akad, maka akad tersebut menjadi rusak atau tidak boleh dilaksanakan menurut ulama Hanafi dan Hanbali, dan batal menurut ulama Maliki dan Syafi’i. Penerapan fatwa DSN MUI no.105/DSN-MUI/X/2016 ini di lapangan memang dilakukan, seperti yang dikemukakan praktisi yang berprofesi sebagai *Marketing Funding Manager* di Bank Muamalat Indonesia berikut:

“Sudah tentu. karena kami merupakan lembaga yang berlabel syariah wajib dan harus patuh terhadap peraturan DSN MUI tersebut (DSN MUI no.105/DSN-MUI/X/2016), tapi yang menjadi perhatian utama dari penerapan fatwa ini adalah tujuan dari lembaga kami untuk menghindari risiko investasi akibat Displaced Commercial Risk (DCR)” (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)

Dari pernyataan praktisi tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan dari pemberian kepastian keutuhan modal pada saat pengembalian dana setelah jatuh tempo adalah untuk menghindari risiko investasi akibat DCR, kondisi DCR ini



merupakan risiko yang muncul ketika LKS berada dalam tekanan untuk memberikan tingkat imbal hasil (*return*) yang lebih tinggi kepada nasabah atau deposan melebihi yang seharusnya diberikan berdasarkan kontrak investasi sebelumnya (Barokah, 2015). Hal ini terjadi ketika tingkat bagi hasil yang diberikan bank lebih rendah dari suku bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional, sehingga mempengaruhi perilaku nasabah untuk menarik simpanannya dan mengalihkannya ke bank konvensional. Lebih lanjut mengenai DCR ini disampaikan oleh akademisi Achmad Zaky, SE., MSA., Ak., berikut:

“Untuk menyikapi adanya risiko Displaced Commercial Risk (DCR) sendiri, biasanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income smoothing*) Dana Pihak Ketiga, bisa dibaca dan dipahami ya, menurut saya itu sudah cukup jelas. Namun mbaknya perlu memastikan bagaimana praktiknya di LKS itu sendiri mengenai metode, pengukuran, dan pengungkapannya, soalnya dalam fatwa tersebut hanya disebutkan mengenai cara yang dilegalkan saja yaitu membentuk dana cadangan (PER) dan tanpa membentuk dana cadangan”. (Lampiran 2: Draf Wawancara Akademisi)

Pernyataan akademisi tersebut sejalan dengan pembahasan bab 2 mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income smoothing*) Dana Pihak Ketiga. Memang benar dalam fatwa tersebut hanya disebutkan mengenai metode yang dilegalkan yaitu dengan membentuk cadangan dan tanpa membentuk cadangan. Sedangkan mengenai pengukuran dalam hal ini nisbah yang dicadangkan tidak ada ketentuannya, begitupun mengenai pengungkapannya tidak ada dalam laporan keuangan maupun Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bentuk transparansi. Lebih lanjut dijelaskan oleh praktisi yang berprofesi sebagai *Marketing Funding Manager* di Bank Muamalat Indonesia berikut:



“Menegenai pengukuran ya, jadi begini, total distribusi bagi hasil untuk nasabah dan juga pola perataannya dalam hal ini nisbah, waktu eksekusi pencadangan, dan bagaimana penginformasian terhadap nasabah itu bukan wewenang dari kantor cabang, sebagai pihak yang menduduki bank cabang tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, karena semua data terpusat, ya. Wewenang kami di cabang ini hanya memasukkan data ke sistem terpusat dan kami menerima nilai bersih yang akan dibagihasilkan kepada nasabah”. (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)

Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwa memang ketentuan mengenai pengukuran dari *income smoothing* hanya menjadi wewenang di tingkat *headquarter* (kantor pusat) yang berarti kantor cabang tidak memiliki informasi mengenai jenis perataan laba (dengan cadangan atau tanpa cadangan), persentase untuk cadangan, maupun penginformasian terhadap nasabah. Ketidakjelasan informasi mengenai pola *income smoothing* yang dilakukan oleh LKS ini, maka perlu melakukan penelusuran lebih lanjut dari berbagai literatur. Penelitian yang dilakukan oleh Suprayogi (2013) secara jelas menyatakan bahwa bank syariah melakukan *income smoothing* namun secara sembunyi-sembunyi atau dengan kata lain bahwa praktik tersebut tidak disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan maupun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sejalan dengan penelitian tersebut juga dijelaskan dalam penelitian Barokah & Kurniasih (2015) bahwa bank syariah telah melakukan praktik perataan penghasilan DPK saat bank menghadapi risiko ketika keuntungan bank di bawah ekspektasi. Dengan demikian, setelah memastikan bahwa LKS melakukan *income smoothing* terhadap dana nasabahnya maka selanjutnya yang perlu ditelusuri adalah jenis *income smoothing* tersebut.



Beberapa negara seperti Malaysia, Uni Arab Emirate, Bahrain, Jordan, dan Oman menggunakan jenis perataan penghasilan DPK dengan cadangan, melalui pembentukan *Profit Equalisation Reserve* (PER), sedangkan Qatar dan Pakistan menggunakan jenis perataan penghasilan DPK tanpa cadangan (Suandi, 2017).

Barokah & Kurnasih (2015) menyebutkan bahwa bank syariah di Indonesia menggunakan perataan penghasilan DPK tanpa membuat cadangan, yaitu dengan menyerahkan sebagian hak pendapatan bank pada nasabah ketika imbal hasil yang didistribusikan pada nasabah pemilik dana kurang dari imbal hasil yang diproyeksikan. Lebih lanjut praktisi yang berprofesi sebagai *Marketing Funding Manager* di Bank Muamalat Indonesia menyatakan:

“...tepatnya regulator dalam hal ini BI dan OJK meminta dan memeriksa kesesuaian bagi hasil yang dilakukan bank, dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 65/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”. (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)

Pernyataan praktisi tersebut mengindikasikan ketidakpastian informasi mengenai jenis praktik *income smoothing* yang diterapkan, pernyataan tersebut hanya menjelaskan mengenai manajemen risiko, tidak secara spesifik menyebutkan *income smoothing*. Dengan demikian, perlu adanya penelusuran dalam laporan tahunan LKS dalam hal ini Bank Muamalat tentang manajemen risiko perusahaan.

Berikut beberapa poin yang diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia:

Upaya untuk memperbaiki profil risiko investasi, antara lain: (a) Melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan juga memperbaiki kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus menerus; (b) Melakukan kajian atas kinerja pembiayaan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli, dan



melakukan kajian untuk mengembangkan ketentuan produk pembiayaan berdasarkan akad dengan mitigasi yang memadai sehingga mengurangi risiko bagi Bank. (*Annual Report*, 2019)

Terlihat bahwa pada pengungkapan manajemen risiko yang tercantum dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia poin (b) tersebut mengindikasikan bahwa Bank melakukan mitigasi yang memadai untuk mengurangi risiko bagi bank. Namun tidak dapat diketahui dengan pasti bentuk mitigasi seperti apa yang dimaksud. Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Praktisi yang berprofesi sebagai *Marketing Funding Manager* di Bank Muamalat Indonesia berikut Bank muamalat berikut:

“kalau untuk mitigasi risiko investasi, ya kami melakukan itu, apalagi OJK mengharuskan untuk membuat profil risiko melalui peraturan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penilaian risiko tadi, dengan IRR. Cuma memang saya tidak bisa memastikan format pengisiannya apakah memang sesuai dengan format baku regulator atau hanya dari manajemen, tapi yang pasti kami mengisi itu sesuai sistem yang harus kami isi dari kantor pusat”. (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)

Dari pernyataan praktisi tersebut terlihat bahwa memang dari LKS tidak secara gamblang mengungkapkan bahwa mereka melakukan *income smoothing* dengan pencadangan tapi kita bisa mengetahui bahwa secara pasti mereka menentukan tingkat IRR. Hal ini sejalan dengan penelusuran peneliti dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia berikut:



**Gambar 4.2**  
**Indikasi *Rate of Return* Bank Muamalat Indonesia**

Dalam Jutaan Rupiah  
In million Rupiah

| No. | Indikator<br>Indicator                    | Saldo Rata-Rata<br>Average Balance | Pendapatan yang akan<br>Dibagikan<br>Income which will<br>be Billed | Nisbah (%)<br>Ratio (%) | Porsi Pemilik Dana*<br>Portion of the Fund Owner | Indikasi <i>Rate of Return</i><br>(%)<br>Rate Indications<br>of Return (%) |
|-----|---|------------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|     |   | A                                  | B   | C                       | D  | E=(D/A x 100%) x 12  |
| 2   | Giro Mudharabah<br>Mudharabah Account     |                                    |   |                         |  |  |
|     | a. Bank                                   | 95.563                             | 51  | 32,00%                  | 51   | 0,64%  |
|     | b. Non Bank                               | 1.265.460                          | 1.579   | 32,00%                  | 1.310  | 1,24%  |
| 3   | Tabungan Wadiah<br>Wadiah Savings         |                                    |   |                         |  |  |
|     | a. Bank                                   | -                                  | -   |                         | -  | -  |
|     | b. Non Bank                               | 4.394.180                          | 106   |                         | 91   | 0,02%  |
| 4   | Tabungan Mudharabah<br>Mudharabah Savings |                                    |   |                         |  |  |
|     | a. Bank                                   | 499.605                            | 312   | 22,00%                  | 311  | 0,75%  |
|     | b. Non Bank                               | 10.225.181                         | 7.379   | 22,00%                  | 6.041  | 0,71%  |
| 5   | Deposito Mudharabah<br>Mudharabah Deposit |                                    |   |                         |  |  |
|     | a. Bank                                   |                                    |   |                         |  |  |
|     | - 1 Bulan/ Month                          | 766.052                            | 780   | 50,00%                  | 780  | 1,22%  |
|     | - 3 Bulan/ Months                         | 151.876                            | 931   | 51,00%                  | 931  | 7,36%  |
|     | - 6 Bulan/ Months                         | 220.091                            | 1.619   | 53,00%                  | 1.618  | 8,82%  |
|     | - 12 Bulan/ Months                        | 23.166                             | 101   | 54,00%                  | 101  | 5,23%  |
|     | b. Non Bank                               |                                    |   |                         |  |  |
|     | - 1 Bulan/ Month                          | 13.604.395                         | 56.632  | 50,00%                  | 45.449   | 4,01%  |
|     | - 3 Bulan/ Months                         | 3.028.292                          | 14.037  | 51,00%                  | 11.392   | 4,51%  |
|     | - 6 Bulan/ Months                         | 2.605.681                          | 13.781  | 53,00%                  | 11.056   | 5,09%  |
|     | - 12 Bulan/ Months                        | 2.375.778                          | 9.757   | 54,00%                  | 7.804  | 3,94%  |
|     | Jumlah<br>Total                           | 68.564.308                         | 261.348   |                         | 86.935   |  |

Sumber: Annual Report PT BMI, 2019

Dari penelusuran peneliti menemukan bahwa memang bank mengungkapkan *rate indication of return* dalam laporan tahunannya. Ini memberikan informasi bagi nasabah mengenai risiko yang ada pada setiap aktiva jika menabung di bank. Hal ini menguatkan pernyataan praktisi tersebut bahwa bank menerapkan IRR mengingat bahwa rate indikatif ini merupakan nilai *equivalent rate* dari pendapatan investasi yang akan dibagikan kepada nasabah.

Lebih lanjut mengenai manajemen risiko investasi praktisi yang berprofesi sebagai *Marketing Funding Manager* di Bank Muamalat menyampaikan bahwa:

“Memang untuk saat ini isu-isu politik juga wajib menjadi perhatian, terutama yang menurut manajemen bisa menurunkan gairah investasi masyarakat, cara menyikapinya yaitu kami membidik nasabah prioritas dan memberikannya spesial nisbah untuk menarik gairah investasi mereka.” (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)

“... diatas 100 juta, kami memberikan spesial nisbah” (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)

“Setahu saya memang untuk menyikapi isu-isu sensitif ini kami menjaga persentase nisbah agar sesuai dengan harapan nasabah/deposan. Bukan tanpa dasar memang dari OJK mengharuskan minimum modal yang harus kita jaga” (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas kita tahu bahwa murni Bank

Mumalat Indonesia telah berusaha untuk meminimalisir risiko investasi untuk

keberlangsungan usaha. Cara-cara yang dilakukan adalah mencoba menarik

nasabah prioritas dan menjaga minimum modal yang diwajibkan oleh OJK,

peraturan yang dimaksudkan disini adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

21/POJK.03/2014, Rasio Kecukupan Modal minimum dikaitkan dengan profil

risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan Bank

(*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ ICAAP*). Strategi ini diharapkan

mampu meningkatkan aset produktif bank dan pendapatan bank sehingga bagi hasil

yang didistribusikan juga akan meningkat. Lebih lanjut mengenai komentar

Akademisi di bidang Ekonomi Syariah, Dr. Dra. Asfi Manzilati, ME.:

“Biasanya memang bank melakukan ini (analisis *Equivalent Rate*). Informasi imbal hasil *equivalent rate* per orang kemudian dibandingkan dengan imbal hasil yang diproyeksikan sebelumnya. Ketika nilai *equivalent rate* per orang lebih rendah dari imbal hasil yang diproyeksikan dengan mengacu (*benchmarking*) pada tingkat suku bunga pasar, maka bank syariah akan melakukan penyesuaian atas imbal hasil yang akan didistribusikan dengan memberikan bagian hak bank syariah untuk nasabah.” (Lampiran 4: Draf Wawancara Akademisi)



Dari pernyataan tersebut secara implisit memberikan kejelasan bahwa memang bank melakukan *income smoothing* sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN No. 87 pada nasabah yang mempunyai simpanan di atas 100 juta rupiah. Bank menjaga batas-batas persentase (nisbah) yang harus dibagikan kepada nasabah prioritas tersebut dengan memperhatikan *equivalent rate* per orang. *Income smoothing* yang memperhatikan tingkat *equivalent rate* ini juga erat kaitannya dengan proyeksi laporan kinerja keuangan bank yang di dalamnya memuat bagi hasil dari nasabah dan bank. Berikut hasil wawancara lebih lanjut mengenai proyeksi di Bank Muamalat:

“Kalau mengenai proyeksi sendiri ya kami membuat, dan kami harus menyetorkannya kepada pusat plus isu-isu yang terjadi di wilayah kami, soalnya kan proyeksi yang kami buat ini akan dijadikan pertimbangan bagi manajemen pusat untuk menentukan tingkat nisbah bagi hasil nanti agar kompetitif.” (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)

Berdasarkan pernyataan tersebut secara jelas memang Bank menyusun proyeksi untuk memberikan tingkat bagi hasil yang kompetitif bagi bank. Berikut pengungkapan dalam laporan keuangan mengenai proyeksi dan realitas kinerja Bank Muamalat.

**Gambar 4.3**  
**Proyeksi Bank Muamalat Indonesia**

Dalam Jutaan Rupiah  
In million Rupiah

| Uraian<br>Description   | Realisasi 2018<br>2018 Realization | Target RBB 2019<br>2019 RBB Target | Realisasi 2019<br>2019 Realization | Pencapaian<br>Target (%)<br>Achievement<br>Target (%) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Total Aset<br>Total Assets  | 57.227.276                         | 64.000.000                         | 50.555.520                         | -21,01%   |
| Dana Pihak Ketiga<br>Third-party Funds  | 45.635.574                         | 46.691.709                         | 40.357.214                         | -13,57%   |
| Pembiayaan<br>Financing   | 33.566.180                         | 31.520.039                         | 29.867.138                         | -5,21%  |
| Pendapatan<br>Income  | 1.057.220                          | 522.638                            | 382.970                            | -26,72%   |
| Laba sebelum Pajak<br>Profit before Tax   | 45.806                             | 12.000                             | 26.166                             | 118,05%   |
| Laba Bersih<br>Net Profit   | 46.002                             | 9.000                              | 16.326                             | 81,40%  |
| Aspek Lain yang Dianggap Penting<br>Other Aspects that are Considered Important |                                    |                                    |                                    |   |

Sumber: Annual Report PT BMI, 2019

Berdasarkan gambar tersebut di atas memang proyeksi/target kinerja bank diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia, namun tidak ada pengungkapan bagaimana perlakuan bagi hasil dari nasabah yang dibawah proyeksi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja bank di bawah tingkat proyeksi yang dibuat. Dengan demikian perlu penelusuran apa yang dilakukan bank untuk menyikapi hal ini.

“ya, kami membuat cadangan yang semacam itu, hal ini murni karena meminimalisir risiko investasi tadi agar kami bisa mempertahankan tingkat bagi hasil untuk nasabah agar kompetitif dengan konvensional dan mencegah aliran modal keluar dari beberapa nasabah tadi. Ini juga sepertinya masuk dalam profil risiko yang harus dibuat menurut peraturan OJK tadi, Cuma penyebutannya tidak PER seingat saya.” (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)

Dari pernyataan praktisi tersebut jelas bahwa pada dasarnya bank memang memitigasi kondisi-kondisi yang semacam ini yakni meminimalisir risiko keluarnya modal nasabah dan tetap mempertahankan nasabah yang berinvestasi dengan mempertahankan tingkat nisbah bagi hasil yang kompetitif. Namun peneliti memang masih tidak menemukan pengungkapan secara gamblang dalam laporan keuangan bank mengenai *income smoothing* dengan cadangan (PER) ini. Hal ini menjadi permasalahan sendiri mengenai transparansi praktik *income smoothing* baik dengan membentuk cadangan atau tidak. Lebih lanjut mengenai transparansi pengungkapan praktik ini disampaikan oleh praktisi Bank Muamalat berikut ini.

“Kalau untuk transparansi sendiri, kami berusaha untuk secara gamblang menginformasikan apa saja yang diperlukan untuk pemegang kepentingan, investor pada khususnya, kami tidak mungkin mengikari apa-apa yang sudah disepakati di awal akad ya mbak. Kami sebisa mungkin mengikuti aturan yang telah ditetapkan regulator dan dewan pengawas.” (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)



“Kalau secara khusus mengenai pencadangan tadi kami memang *pure* ‘tidak tahu’ harus melaporkan dimana, tidak tahu ini dalam tanda kutip ya mbak, dalam artian memang regulator tidak mewajibkan pengungkapan pencadangan ini, tapi yang pasti kami mengambil cadangan ini dari laba bersih bukan dari pendapatan yang harus dibagihasilkan, jadi sama sekali hal ini tidak mengurangi haknya nasabah” (Lampiran 7: Draf Wawancara Praktisi)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas setidaknya ada 3 poin penting:

pertama, praktik pencadangan dana pihak ketiga (nasabah/deposan) memang dilakukan bank. Kedua, pelaporan pencadangan untuk kepentingan *income smoothing* ini tidak dilaporkan secara eksplisit dalam laporan keuangan karena memang tidak ada regulasi yang mengaturnya. Ketiga, jika kondisi kinerja real yang terjadi berada di bawah proyeksi maka bank akan mengurangi hak nya sendiri untuk diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan *equivalent rate*. Kenyataan-kenyataan yang penulis paparkan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa logika-logika konvensional masih melekat dan tidak bisa terlepas pada entitas syariah itu sendiri. Hal ini terlihat dari motif-motif *treatment* akuntansi yang dilakukan oleh perbankan masih berorientasi pada pendapatan, laba, dan modal dari perbankan. Maka jelaslah hal ini memperkuat apa yang dikatakan oleh Mulawarman (2014) yang menyatakan bahwa *income*, *liability*, *cash* dan *earnings* merupakan akun yang dipersiapkan untuk kepentingan terbatas yaitu manajemen, pemilik, investor, pemegang saham, dan kreditur. Regulasi-regulasi yang ada dirasa memang mengakomodir keempat komponen tersebut untuk kepentingan terbatas tadi. Kepentingan ini pada akhirnya berujung pada *profit oriented* sebagai ideologi Neoliberal yang paling utama. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kelahiran akuntansi syariah di Indonesia melalui filter dari akuntansi konvensional dengan



tauhid sebagai filter utamanya. Sebagai konsekuensinya maka akuntansi syariah yang ada sekarang masih membawa-bawa logika konvensional yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu perlu melihat implementasi secara menyeluruh antara akuntansi syariah dan konvensional untuk memberikan gambaran fenomena yang terjadi pada realita korporasi di Indonesia, guna melakukan *tazkiyah* ekonomi menuju *fitrah religiusitas* yaitu *fitrah* ketuhanan.

#### 4.1.2 Praktik *Income Smoothing* pada Entitas konvensional di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu pertama, menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu, kedua, penetapan *fee based* untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Dalam ekonomi konvensional, tidak ada aturan baku yang menyatakan larangan perusahaan untuk melakukan perataan laba. Sebab usaha perataan laba merupakan bagian dari manajemen laba yang merupakan tindakan para manajer baik itu secara agensi maupun personal dalam mencari keuntungan perusahaan. Praktek perataan laba dianggap sebagai perilaku yang rasional. Berikut pernyataan Praktisi di bidang Akuntansi yang berprofesi sebagai Staff Akuntansi Keuangan di PT Bumi Asri Situbondo:



“Kalau dihubungkan dengan perilaku manajer maka praktik *income smoothing* ini secara garis besar di bagi dua yaitu pertama, *income smoothing* merupakan perilaku oportunistik jika dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dan memanipulasi laporan keuangan, Kedua, *income smoothing* merupakan perilaku realistik jika dilakukan untuk kepentingan keberlangsungan perusahaan” (Lampiran 5: Draf Wawancara Praktisi)

Dari pernyataan akademisi tersebut jelas bahwa ada 2 jenis pandangan jika dilihat dari perilaku manajemen yaitu memandang bahwa *income smoothing* merupakan tindakan oportunistik dan kedua merupakan tindakan yang realistik untuk kepentingan *going concern* dari perusahaan. Lebih lanjut praktisi tersebut menjelaskan mengenai motif realistik dari praktik perataan laba tersebut:

“Ya, begini saja ya mbk, bayangkan saja ketika kegiatan operasi perusahaan dari tahun ke tahun yang cenderung berfluktuasi dengan sangat tajam tanpa adanya pertataan laba. Harga saham akan berfluktuasi secara tajam sejalan dengan kinerja yang berfluktuasi tajam, akhirnya hal tersebut berdampak pada IPO (Initial Public Offering) sahamnya tidak laku/kurang menarik. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat perataan laba ini jadi realistik jika dipraktikkan.” (Lampiran 5: Draf Wawancara Praktisi)

Dari pernyataan akademisi tersebut secara implisit menjelaskan bahwa praktik *income smoothing* memang biasa dilakukan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan risiko nilai dari perusahaan yang tercermin dalam harga sahamnya. Lebih lanjut mengenai jenis perataan laba disampaikan oleh praktisi berikut ini:

“Jenis *income smoothing* sendiri ada banyak jenisnya tergantung dari dimensi mana kita melihatnya, secara garis besar menurut Dascher dan Malcom, nanti bisa dibaca ya di situ, ada yang namanya *real smoothing* dan *artificial smoothing*” (Lampiran 5: Draf Wawancara Praktisi)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa secara garis besar *income smoothing* dibagi menjadi 2 yaitu *real smoothing* dan *artificial smoothing*. *Real Smoothing*



berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan atas pengaruh perataan terhadap laba seperti biaya iklan dan penelitian dan pengembangan. Perusahaan dalam hal ini manajemen bisa mengatur apakah periode berjalan akan dilakukan pengeluaran terhadap biaya tersebut. Sedangkan

*Artificial Smoothing* berkaitan dengan prosedur atau metode akuntansi yang diimplementasikan untuk mengganti *cost* atau pendapatan dari suatu periode ke periode yang lain seperti penggantian metode penyusutan yang berpengaruh kepada besar kecilnya jumlah beban penyusutan yang dilaporkan. Lebih lanjut praktisi tersebut menjelaskan sebagai berikut:

“Praktik income smoothing ini menurut saya sah-sah saja dilakukan selama itu tidak menyebabkan kesalahan informasi bagi pengguna laporan keuangan dan tetap patuh terhadap regulasi dan PSAK yang berlaku di Indonesia.” (Lampiran 5: Draf Wawancara Praktisi)

“...praktik ini bisa merujuk pada PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, disitu bisa dilihat bahwa pencatatan akuntansi di Indonesia menggunakan accrual basis. Implikasi dari adanya accrual basis ini ya tadi, perusahaan bisa mengakui apa yang belum terjadi realnya, atau menangguhkan apa yang seharusnya sudah terjadi.” (Lampiran 5: Draf Wawancara Praktisi)

Secara implisit dari pernyataan-pernyataan tersebut menjelaskan bahwa praktik *income smoothing* diperbolehkan selama itu sesuai dengan regulasi dalam hal ini PSAK, salah satu regulasi yang membuka praktik *income smoothing* ini yaitu pencatatan secara akrual yang diatur dalam PSAK 1 untuk kebutuhan perataan laba.

Praktik ini bisa dilakukan dalam pengakuan beban, pendapatan, asset, ekuitas, atau liabilitas. Lebih lanjut mengenai pencatatan secara akrual ini disampaikan oleh praktisi sebagai berikut:



“Kan dalam PSAK 1 disebutkan bahwa basis pencatatan akuntansi menggunakan *accrual basis* yang kemudian hal ini menjadi rasional jika manajemen menanggukkan beban-beban yang sebenarnya sudah terjadi, mengganti metode pencatatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan waktu pengakuan dan metode-metode pencatatan dalam akuntansi yang nantinya akan berdampak pada tingkat laba yang dilaporkan sesuai dengan yang diinginkan, nanti mengenai teknik nya, dalam hal ini apa saja yang ditanggukkan atau segera diakui ini berhubungan langsung dengan motivasi manajemen melakukannya. Bisa saja karena motivasi bonus, politik, atau pajak.” (Lampiran 5: Draf Wawancara Praktisi)

Pernyataan praktisi tersebut secara implisit menjelaskan bahwa aspek-aspek pencatatan secara *accrual basis* bisa menimbulkan adanya praktik perataan laba.

Adapun mengenai teknik dari perataan laba sendiri akademisi tersebut berpendapat bahwa hal itu dipengaruhi oleh motivasi masing-masing manajemen. Maka perlu penelusuran lebih lanjut mengenai motivasi sebagaimana dimaksud oleh praktisi tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu praktisi di PT Budi Karya Raharja menemukan bahwa motivasi manajemen melakukan manajemen laba adalah untuk perpajakan. Berikut penjelasannya:

“ya, kami menerapkan (manajemen laba)” (Lampiran 6: Draf Wawancara Praktisi)

“...(dengan cara) *Income minimization* (penurunan laba), ini merupakan proses rekayasa laporan keuangan agar laba tidak terlihat besar sebagaimana mestinya, bahkan cenderung dibuat merugi.. Dengan cara (1) memaksimalkan sektor pendapatan yang merupakan objek PPh Final (2) memaksimalkan beban CSR, penyusutan akan aset tidak berwujud, beban piutang tak tertagih, entertainment, Zakat shodaqoh. (3) konversi laba ditahan menjadi deviden.” (Lampiran 6: Draf Wawancara Praktisi)

“...(kami mengikuti aturan) PSAK dan Peraturan Pajak. dalam peraturan pajak, ada beban-beban yang tidak terkait dengan operasional namun dapat mengurangi income sehingga net income menjadi kecil seperti: Beban kerugian piutang, zakat, hibah, csr dll. Perusahaan memang mengeluarkan uang untuk kegiatan sosial lebih besar daripada operasional” (Lampiran 6: Draf Wawancara Praktisi)



Pernyataan-pernyataan praktisi tersebut di atas menjelaskan bahwa untuk kepentingan pajak manajemen melakukan manajemen laba dalam bentuk *income minimization* yaitu laba yang dilaporkan cenderung kecil untuk meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung. Menurut praktisi tersebut hal ini tidak menjadi permasalahan selama itu sesuai dengan regulasi khususnya PSAK dan peraturan pajak. Namun, ketika ditanyakan mengenai praktik *income smoothing* praktisi tersebut menjelaskan sebagai berikut:

“Tidak (menggunakan perataan laba), namun memang secara tidak langsung mengenai praktik *income minimization* ini berdampak pada pelaporan laba yang cenderung tidak berfluktuatif, karena tidak mungkin kami melaporkan laba pada tahun ini sekian, tinggi misalnya, kemudian tahun depan turun, untuk mengurangi pajak misalnya, ini bahaya sekali, ketika ada pemeriksaan dari pihak pemerintah mengenai kepatuhan pajak, mereka juga pasti bertanya-tanya, ada apa nih? jangan-jangan ada indikasi mangkir pajak? Jadi secara tidak langsung ya saya katakan itu berpengaruh pada perataan laba juga.”  
(Lampiran 6: Draf Wawancara Praktisi)

Pernyataan dari praktisi tersebut secara implisit menjelaskan bahwa motivasi manajemen dalam meratakan laba adalah untuk kepentingan pajak agar laba tidak berfluktuasi dan menyebabkan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan juga berfluktuasi yang nantinya akan menyebabkan perusahaan berurusan dengan regulator mengenai kepatuhan pajak. Dengan demikian perlu penelusuran mengenai praktik pencatatan akuntansi apa saja yang berpengaruh terhadap perataan laba yang dimaksud. Akademisi di bidang Akuntansi, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau untuk menanggapi praktik tersebut, menurut saya pencatatan akrual yang bisa dimainkan untuk *income smoothing* ini, contoh pembagian dividen, teknisnya begini, ketika perusahaan mengalami untung maka pemegang saham punya bagian dari keuntungan, sudah terjadi kan keuntungannya, bisa diakui saat itu juga kan keuntungannya,



dan bisa dibagikan ke pemegang saham kan, tapi tidak serta merta seperti itu, perusahaan akan menahan itu dan dilaporkan sebagai laba ditahan agar tidak terkena pajak atas dividen, boleh? ya boleh-boleh saja menurut PSAK karena basisnya adalah akrual” (Lampiran 3: Draf Wawancara Akademisi)

Penjelasan dari akademisi tersebut cukup jelas bahwa pencatatan akuntansi berbasis akrual mempunyai peranan penting dalam praktik *income smoothing*. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari praktisi dari PT Bumiasri Lestari Situbondo berikut ini:

“Pada dasarnya saya tidak bisa mengatakan bahwa kami menggunakan perataan laba ya, yang jelas dan dapat saya pastikan bahwa pihak manajemen membuat beban-beban sepanjang tahun tidak berfluktuasi dan cenderung flat dengan cara mengalokasikan (beban) ke bulan/tahun berikutnya jika memang terlalu tinggi, dan sebaliknya” (Lampiran 5: Draf Wawancara Praktisi)

Pernyataan praktisi tersebut menjelaskan bahwa di PT Bumiasri Lestari Situbondo tempat dirinya bekerja menerapkan pengakuan beban yang tidak berfluktuatif. Hal ini hanya terjadi jika perusahaan tersebut menggunakan pencatatan akrual dengan cara menangguhkan beban apabila tingkat beban yang terjadi terlalu tinggi dan sebaliknya, yakni mengakui beban jika tingkat beban masih belum memenuhi target yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan prinsip dari *income smoothing* itu sendiri karena beban berhubungan langsung terhadap laba yang dilaporkan oleh perusahaan.

Selain memainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan teknik lain yang biasa dilakukan adalah dengan membentuk cadangan sebagai langkah mitigasi ketika perusahaan mengalami kerugian. Berikut penjelasan dari akademisi Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A:



“ya memang ada kemungkinan (perusahaan membentuk cadangan) untuk mitigasi ketika terjadi kerugian. Rasionalitas dari pemegang saham kan dia akan menyimpan uang di perusahaan yang kinerjanya bagus, dari mana tercerminnya? Yang paling gampang dari laba mengenai ini (pembentukan cadangan) bisa merujuk pada PSAK 55 Mengenai Instrument Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (revisi 2014) dan peraturan perbankan mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.” (Lampiran 5: Draf Wawancara Akademisi)

Pernyataan akademisi tersebut masih belum bisa memastikan jika perusahaan

menerapkan praktik *income smoothing* ataupun tidak, namun jika merujuk pada

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 tentang Instrument Keuangan:

Pengakuan dan Pengukuran (revisi 2014) dijelaskan bahwa cadangan penyisihan

kerugian dibentuk ketika kredit telah mengalami penurunan nilai atau dengan

pendekatan *incurred loss*, dan bukan berdasarkan pendekatan ekspektasi kerugian

(*expected loss*) yang akan dialami oleh bank di masa yang akan datang. Pedoman

Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) juga menyatakan bahwa bank tidak

diperbolehkan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) melebihi

jumlah yang dapat dikaitkan pada kredit individual atau kelompok kredit kolektif.

Ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut secara tidak langsung memang

memperbolehkan membentuk cadangan untuk upaya memitigasi risiko bank ketika

terjadi kerugian agar tidak berdampak pada tingkat return atau bunga bagi

pemegang saham. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh praktisi bank

CIMB Niaga berikut ini:

“ya, di kami memang ada itu, atau biasa kami menyebutnya CKPN, dan wajib kami laporkan ke pusat, fungsinya memang untuk menghindari masalah kerugian akibat kredit yang gagal bayar, yang menyebabkan pada menurunnya kinerja keuangan kita di laporan keuangan” (Lampiran 8: Draf Wawancara Praktisi)



Pernyataan praktisi bank CIMB tersebut membenarkan bahwa bank membentuk cadangan untuk meminimalisir risiko kredit yang akan berdampak pada laba yang dilaporkan. Lebih lanjut mengenai dampak dari cadangan ini terhadap pelaporan laba, praktisi tersebut menjelaskan:

“Akun kontra dari cadangan ini kan beban penurunan nilai aset, jadi otomatis semakin besar cadangan yang kita bentuk maka beban juga semakin besar, hubungannya sama laba jadi semakin kecil karena bersifat beban ini mengurangi laba ya.” (Lampiran 8: Draf Wawancara Praktisi)

“Menegenai besarnya (pencadangan) ini pada dasarnya murni keakuratan estimasi dan catatan historical loss experience. Namun secara umum kami juga menggunakan aturan baku seperti ini, nilai tercatat asset keuangan dikurangi dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari asset keuangan tersebut. Nanti kan ketemu tuh jumlah yang harus kita cadangkan, baru jumlah asetnya dikurangi dengan cadangan tersebut, dan kita laporkan sebagai laba/rugi” (Lampiran 8: Draf Wawancara Praktisi)

Pernyataan tersebut menjelaskan secara eksplisit bahwa pencadangan kerugian itu dilakukan melalui aset individual berdasarkan histori dari kerugian yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Besarnya pencadangan ini mempertimbangkan *present value* dari aset tersebut. Dengan demikian menjadi mudah bagi manajemen untuk mengatur laba yang dilaporkan agar sesuai dengan yang diinginkan karena akun kontra untuk pencatat pencadangan ini adalah beban kerugian, beban akan mengurangi laba dan berdampak pada besar kecilnya laba perusahaan yang dilaporkan. Namun praktik ini tidak serta merta dikatakan menyalahi aturan karena ada standar yang mengaturnya dan pihak bank juga melaporkan dalam laporan tahunannya. Bisa dilihat laporan tahunan Bank CIMB Niaga berikut ini terkait CKPN:

Gambar 4.4

Laporan Posisi Keuangan PT CIMB NIAGA 2019

PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2019, 2018, AND 2017

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

|  | Catatan/<br>Notes    | 2019       | 2018       | 2017       |
|--|----------------------|------------|------------|------------|
| <b>ASET</b>  |                      |            |            |            |
| K a s  | 2e,2f,2i,4           | 5,693,065  | 4,293,370  | 3,895,997  |
| Giro pada Bank Indonesia                             | 2e,2f,2j,5           | 11,395,695 | 10,435,254 | 11,522,696 |
| Giro pada bank lain                                  |                      | 2,162,195  | 3,093,901  | 3,574,267  |
| Dikurangi: Cadangan kerugian<br>penurunan nilai      |                      | -          | -          | -          |
|  | 2e,2f,2h,2j,2ah,6,49 | 2,162,195  | 3,093,901  | 3,574,267  |
| Penempatan pada bank lain<br>dan Bank Indonesia      |                      | 12,133,873 | 9,240,574  | 13,323,713 |
| Dikurangi: Cadangan kerugian<br>penurunan nilai      |                      | (29,143)   | (13,299)   | (9,514)    |
|  | 2e,2f,2h,2k,7        | 12,104,730 | 9,227,275  | 13,314,199 |
| Efek-efek  |                      | 12,000,711 | 10,715,002 | 13,480,610 |
| Dikurangi: Cadangan kerugian<br>penurunan nilai      |                      | (38,046)   | (38,777)   | (38,556)   |
|  | 2e,2f,2h,2l,8        | 11,962,665 | 10,676,225 | 13,442,054 |
| Obligasi Pemerintah                                  | 2e,2f,2l,9           | 22,160,303 | 23,999,772 | 24,971,486 |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji<br>dijual kembali | 2f,2m,10             | 522,857    | 593,593    | -          |
| Tagihan derivatif                                    | 2e,2f,2n,11          | 725,478    | 1,084,759  | 280,293    |

Sumber: Annual Report PT CIMB NIAGA, 2019

Dari laporan tersebut terlihat bahwa memang dalam laporan tahunan CIMB Niaga menerapkan cadangan penurunan nilai untuk masing-masing aset. Berikut dampaknya pada laporan laba rugi mengenai akun kontranya yaitu beban kerugian:



### Gambar 4.5 Laporan Laba Rugi PT CIMB NIAGA 2019

| PT BANK CIMB NIAGA Tbk<br>DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES  |               |  |                    |                    |
|--|---------------|--|--------------------|--------------------|
| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN<br>KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN<br>UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR<br>31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017<br>(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) |               | CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND<br>OTHER COMPREHENSIVE INCOME<br>FOR THE YEARS ENDED<br>31 DECEMBER 2019, 2018, AND 2017<br>(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) |                    |                    |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN<br/>OPERASIONAL</b>  |               |  |                    |                    |
| Pendapatan bunga   | 2ab,2ah,36,49 | 18,396,236   | 18,346,593         | 19,105,036         |
| Pendapatan syariah   | 2ab,2ah,36,62 | 3,293,250  | 1,946,654          | 1,298,348          |
| Beban bunga  | 2ab,2ah,37,49 | (7,050,137)  | (7,256,236)        | (7,390,640)        |
| Beban syariah  | 2ab,2ah,37,62 | (2,071,331)  | (1,025,280)        | (609,365)          |
| <b>Pendapatan bunga dan syariah - bersih</b>   |               | <b>12,568,018</b>  | <b>12,011,731</b>  | <b>12,403,379</b>  |
| Pendapatan operasional lainnya:  |               |  |                    |                    |
| Provisi dan komisi lainnya   | 2ac,38        | 2,206,680  | 2,151,855          | 2,134,817          |
| Keuntungan/(kerugian) transaksi mata uang asing  | 2e            | 2,937  | 38,323             | (51,022)           |
| Lain-lain  |               | 1,083,002  | 724,472            | 494,632            |
| <b>Jumlah pendapatan operasional<br/>lainnya</b>   |               | <b>3,292,619</b>   | <b>2,914,650</b>   | <b>2,578,427</b>   |
| Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan<br>dan nonkeuangan - bersih  | 2h,39         | (3,256,619)  | (3,029,532)        | (4,079,805)        |
| Keuntungan dari instrumen keuangan<br>yang diperdagangkan - bersih   | 2n,2l,40      | 586,536  | 802,607            | 330,460            |
| Keuntungan dari penjualan efek-efek - bersih   | 2l,41         | 377,557  | 99,015             | 443,561            |
| Beban operasional lainnya:   |               |  |                    |                    |
| Beban tenaga kerja   | 2ad,42        | (4,623,722)  | (4,001,791)        | (3,948,212)        |
| Beban umum dan administrasi  | 2ad,43        | (3,828,664)  | (3,708,500)        | (3,443,268)        |
| Lain-lain  |               | (181,978)  | (293,837)          | (177,971)          |
| <b>Jumlah beban operasional lainnya</b>  |               | <b>(8,634,364)</b>   | <b>(8,004,128)</b> | <b>(7,569,451)</b> |
| <b>LABA OPERASIONAL BERSIH</b>   |               | <b>4,933,747</b>   | <b>4,794,343</b>   | <b>4,106,571</b>   |

Sumber: Annual Report PT CIMB NIAGA, 2019

Laporan keuangan CIMB Niaga tersebut jelas melaporkan adanya kerugian penurunan nilai yang berdampak pada laba yang dilaporkan, namun hal ini tidak bisa dinyatakan secara tegas bahwa bank tersebut menerapkan *income smoothing* dalam laporan keuangannya. Akademisi Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A menjelaskan sebagai berikut:

“Memang tidak mungkin secara gamblang bank menyatakan dirinya melakukan *income smoothing* karena hal itu mengindikasikan bahwa pengelolaan dananya tidak efisien dan bisa saja investor menangkap sinyal bahwa hal tersebut bukan laba yang sebenarnya terjadi.”  
(Lampiran 3: Draf Wawancara Akademisi)

Dari pernyataan akademisi tersebut menjelaskan tidak semua bank melaporkan dan menjelaskan secara gamblang bahwa bank melakukan *income smoothing* karena hal itu dikhawatirkan memberikan dampak buruk pada kelangsungan usaha bank. Namun praktik-praktik tersebut secara jelas bisa kita temukan dalam laporan keuangan mengenai sinyal-sinyal yang mengarah ke arah perataan laba.

Kenyataan-kenyataan praktik yang penulis paparkan tersebut lagi-lagi orientasinya terhadap 3 hal yaitu pendapatan, laba, dan modal. Logika-logika yang dipakai pun mengarah kepada *self interest* (kepentingan pribadi). Regulasi yang ada pun seperti mengamodir kepentingan dari pemilik modal saja dengan mengesampingkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagai wujud hubungan horizontal dan menegaskan nilai ketuhanan sebagai hubungan vertikal. Padahal akuntansi sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kesadaran ketuhanan yang berarti akuntansi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materi seperti finansial, sosial, dan lingkungan, namun juga ada hal-hal yang bersifat non-materi batin, jiwa, dan spiritual (Mulawarman, 2014).

Berdasarkan penjabaran mengenai praktik *income smoothing* di atas, maka peneliti menyajikan perbedaan dan persamaan antara praktik *income smoothing* di entitas syariah dan konvensional dalam tabel berikut ini:



Tabel 4.2

Penerapan *Income smoothing* dalam Entitas Syariah dan Konvensional

| No. | Aspek                 | Entitas Syariah   | Keterangan   | Entitas konvensional                       | Keterangan  |
|-----|-----------------------|---|--|--|---|
| 1.  | Regulasi di Indonesia | Fatwa DSN Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012                     | Ketentuan Umum (No. 2): <i>Income Smoothing</i> dengan cadangan  | Berbeda untuk masing-masing teknik         | PSAK 1 (Par. 25): Teknik Pencatatan akrual  |
|     |                       |   | Ketentuan Umum (No. 4): <i>Income Smoothing</i> tanpa cadangan   |  | Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Bab V): Pembentukan CKPN                         |
| 2   | Jenis perataan        | Pencadangan Laba (IRR/ <i>Investment Risk Reserve</i> ) | Cadangan yang dibentuk berdasarkan proyeksi tingkat imbal hasil  | Pencadangan dan manajemen transaksi akrual | Cadangan dalam akun CKPN<br>Transaksi Akrual dilakukan dengan cara pencatatan beban diakui di awal  |
| 3   | Pengukuran            | Berdasarkan SOP   | Murni kebijakan manajemen dengan pertimbangan pasar<br>Mempertimbangkan <i>equivalent rate / rate indication of return</i> | Anuitas masing-masing aset keuangan        | Nilai tercatat aset keuangan dikurangi nilai kini ( <i>present value</i> ) estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan TBE |
| 4   | Pengungkapan          | Tidak ada pengungkapan dalam laporan keuangan dan CALK  | Hanya terbatas pada laporan manajemen di tingkat <i>head quarter</i>   | Diungkapkan dalam laporan tahunan          | Laporan Laba/Rugi pos Beban kerugian penurunan nilai atas aset keuangan   |
|     |                       |   | Nasabah prioritas akan memperoleh informasi ini  |  | Laporan Posisi Keuangan pos CKPN masing-masing aset<br>CALK: pos Beban  |

Sumber: diolah penulis

#### 4.2 Penerapan *Income Smoothing* dalam Perspektif Akuntansi Syariah dan Fikih Kontemporer

Akuntansi syariah sebagaimana disampaikan oleh Akademisi di bidang Akuntansi Syariah, Prof Iwan Triuwono, SE, Ak, MEC, PhD pada dasarnya merupakan seni untuk meracik informasi yang berfungsi sebagai dzikir dan do'a untuk memenuhi kebutuhan materi, mental, dan spiritual manusia dalam rangka beribadah, bertaqwa kepada Allah (Lampiran 1: Draf wawancara Akademisi).

Bertaqwa kepada Allah ini lah yang menjadi tujuan dari seorang akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan ini bisa dicapai dengan mengimplementasikan nilai-nilai syariah baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadikannya pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". (Q.S. Al-Baqarah ayat 282)

Bila kita cermati surah Al-Baqarah ayat 282 di atas, Allah telah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang diperbuat oleh para pihak



yang memiliki kepentingan. Jika kita kaitkan ayat tersebut dengan konteks ekonomi kontemporer, maka akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yaitu akuntansi yang sistematis, transparan, bertanggungjawab, dan ditujukan untuk kemaslahatan umat dengan memegang teguh kesadaran Tuhan di dalamnya. Mengenai akuntansi syariah ini Prof Iwan Triyuwono, SE, Ak, MEc, PhD memiliki pandangan sedikit berbeda, berikut kutipan wawancara beliau yang menjelaskan mengenai akuntansi syariah:

“(mengenai) Akuntansi syariah saya agak membedakan antara akuntansi syariah dan akuntansi islam, kalau akuntansi syariah memang ada aspek syariahnya, tapi kalau akuntansi islam itu nanti ada akuntansi syariah, akuntansi *tariqat*, akuntansi *ma’rifat*, dan akuntansi *haqiqat*, keseluruhannya itu nanti membentuk kesatuan akuntansi islam”  
(Lampiran 1: Draf Wawancara Akademisi)

Menurut pandangan akademisi tersebut bahwa akuntansi syariah dan akuntansi islam itu berbeda dari sisi ruang lingkupnya. Ruang lingkup akuntansi islam itu lebih luas meliputi akuntansi syari’ah, akuntansi *tariqat*, akuntansi *ma’rifat*, dan akuntansi *haqiqat*. Pada level akuntansi syariah yang menjadi orientasi adalah aturan-aturan sedangkan pada akuntansi *thariqat* yang menjadi orientasi adalah pada rasa. Sebagaimana dijelaskan Akademisi tersebut berikut:

“Akuntansi syariah memang orientasinya pada luar, aturan-aturan, kalau ada standar ya standar itu yang dipakai PSAK 101 dan seterusnya, itu bagian dari akuntansi syariah tadi, (sedangkan) akuntansi *thariqat*, ini kan berhubungan dengan rasa, ..., kalau dirasa tidak enak dan ragu-ragu maka boleh ditinggalkannya. Ini ukurannya rasa ya bukan materi, yang saya maksud materi ini kan mengenai tampilan luar”. (Lampiran 1: Draf Wawancara Akademisi)

Berdasarkan pernyataan Akademisi tersebut, jika membahas mengenai *income smoothing* beserta peraturan-peraturan akuntansi syariah yang ada di Indonesia maka hal ini merupakan dalam tataran bahasan dari akuntansi syariah

yang dimaksudkan Akademisi tersebut. Maka hal ini jelas berbeda dengan perspektif fikih yang termasuk dalam tataran akuntansi islam.

#### 4.2.1 Penerapan *Income Smoothing*: Regulasi dan Implikasinya dalam Perspektif Fikih

Telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa regulasi yang dijadikan dasar dalam penerapan *income smoothing* di Indonesia adalah Fatwa DSN nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*income smoothing*)

Dana Pihak Ketiga. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai metode perataan dengan membentuk cadangan dan tanpa membentuk cadangan. Lembaga Keuangan

Syariah sudah tentu diwajibkan patuh terhadap fatwa tersebut sehingga tidak serta merta dianggap menyalahi aturan mengingat bahwa DSN merupakan pihak yang ditugaskan untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, khususnya perbankan. Akan tetapi terdapat beberapa poin penting mengenai ketentuan dalam fatwa ini yang perlu dikritisi. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut

ini:



**Tabel 4.3**  
**Regulasi dan Implikasi Fatwa DSN No. 87/DSN-MUI/XII/2012**

| No. | Aturan  | Implikasi  |
|-----|---|--|
| 1   | Ketentuan umum poin 3:<br>Bagi hasil berdasarkan Proyeksi Bagi Hasil.   | Nasabah tidak mungkin rugi/ akan mendapatkan bagi hasil secara pasti (merusak substansi akad <i>mudharabah</i> )   |
| 2   | Ketentuan pembentukan cadangan poin 2 dan 4:<br>Pembentukan dana cadangan harus dilakukan atas seizin nasabah.  | Pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan Transaparansi.   |
| 3   | Ketentuan pembentukan cadangan atau tanpa cadangan poin 2 dan 3:<br>Pencadangan atas dasar DCR dan harus ditentukan berdasarkan pedoman operasional/ <i>standard operating</i> (SOP). | Penentuan jumlah dan waktu pencadangan tiap bank yang bervariasi dan berpotensi bank melakukan pencadangan secara terus menerus sesuai dugaan dari manajemen saja. |
| 4   | Ketentuan perataan laba dengan atau tanpa dana cadangan poin 5:<br>Tidak boleh dipraktikkan apabila menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung.                             | Inkonsistensi dengan ketentuan umum poin 3 tentang bagi hasil berdasarkan proyeksi, yang berarti mirip dengan sistem bunga.  |
| 5   | Ketentuan perataan laba dengan atau tanpa dana cadangan poin 6:<br><i>isqath al-haqq / attanazul'an al-haqq</i>   | Berubahnya nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah serta terjadi kedzoliman terhadap bank  |

*Sumber: diolah penulis*

Berdasarkan tabel tersebut maka yang perlu dikritisi mengenai *income smoothing* di Indonesia yaitu *Pertama*, mengenai proyeksi bagi hasil sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum poin 3 dan ketentuan terkait pembentukan dana cadangan dalam fatwa ini secara eksplisit memberikan ketentuan bahwa proyeksi bagi hasil dijadikan acuan dalam bagi hasil. Jika realisasi bagi hasil diatas proyeksi maka bank boleh mencadangkan kelebihanannya dan jika realisasi bagi hasil bank dibawah proyeksi bagi hasil yang telah ditentukan di awal akad maka boleh mengambil kekurangannya dari cadangan atau bank memberikan hak bagi hasil dirinya untuk diberikan kepada nasabah. Dengan adanya proyeksi bagi hasil ini maka pada dasarnya nasabah tidak mungkin rugi atau dengan kata lain nasabah akan



mendapatkan bagi hasil secara pasti. Hal ini menjadikan akad *mudharabah* yang secara alamiah bersifat tidak pasti (*Natural Uncertainty Contracts*) karena ada kemungkinan kerugian dalam usaha menjadi akad yang pasti (*Natural Certainty Contracts*) karena secara pasti memberikan keuntungan. Hal ini membuat rusak substansi dari akad *mudharabah* itu sendiri. Pemberian kepastian imbal hasil atas akad investasi ini tidak ada bedanya dengan sistem bunga dalam bank konvensional.

Sistem bunga ini membuat bank konvensional tidak mengenal rugi dalam akadnya, atau dengan kata lain bank dipastikan hanya membagikan keuntungan yang positif mengikuti suku bunga pasar pada saat awal akad (Antonio, 2001). Pemberian kepastian ini menyalahi kaidah fikih الغرم بالغنم (*al ghurmu bil ghunm*), yang artinya setiap keuntungan pasti ada risiko yang menyertai (Dahlan: 2014). Namun keberadaan peraturan penghasilan DPK akan menghilangkan risiko kerugian yang seharusnya diterima oleh nasabah DPK yang menggunakan akad *mudharabah*.

*Kedua*, mengenai ketentuan pembentukan cadangan poin 2 dan 4 dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa pembentukan dana cadangan harus dilakukan atas seizin nasabah/pemilik dana. Namun pada kenyataannya bank hanya memberikan Informasi mengenai pembentukan dana cadangan ini kepada *nasabah priority/corporate* sebagaimana penjelasan Praktisi pada sub bab sebelumnya. Pembentukan dana cadangan dengan maksud peraturan laba ini dikhususkan bagi *nasabah priority* yakni nasabah yang memiliki simpanan di atas 100 Juta Rupiah untuk kepentingan agar nasabah tidak mengalihkan dananya kepada bank lain.

Kondisi ini akan menimbulkan ketimpangan informasi mengenai dana cadangan antara nasabah yang mempunyai simpanan besar dan kecil. Padahal prinsip saling



rida atas transaksi muamalah sangat diwajibkan dalam syariah. Jika hal ini menimbulkan nasabah yang simpanannya di bawah 100 Juta menjadi tidak tahu atas kondisi sebenarnya mengenai waktu dan jumlah pendangan makan hal ini tidak sesuai dengan prinsip saling rida tersebut. Hal ini menyalahi kaidah fikih berikut:

الأصل في العقود رضا المتعاقدين (*Al-Ashlu Fil'Uqud Rida AL-Muta'qidain*), yang artinya dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak (Dahlan:2014). Namun dengan adanya penginformasian hanya kepada nasabah *priority* ini maka akan berpotensi menghilangkan prinsip saling ridha dalam akad antara bank dan nasabah dengan penyimpanan dibawah 100 Juta Rupiah. Selain itu kenyataan pada implementasinya juga tidak diungkapkan dalam laporan keuangan maupun Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga berpotensi pada dilanggarnya prinsip keterbukaan (transparansi).

*Ketiga*, mengenai DCR (*Displaced Commercial Risk*) yang tertuang dalam ketentuan pembentukan cadangan atau tanpa cadangan poin 2 dijelaskan bahwa perataan laba hanya boleh dilakukan ketika berpotensi kuat menimbulkan risiko DCR. Lebih lanjut mengenai penentuan DCR ini tertuang di poin 3 bahwa kondisi DCR harus ditentukan berdasarkan pedoman operasional/ *standard operating procedure* (SOP) bank dengan memperhatikan opini Dewan Pengawas Syariah. Pembentukan cadangan berdasarkan SOP ini berakibat pada penentuan jumlah dan waktu pencadangan tiap bank yang bervariasi. Padahal sebagaimana ketentuan dalam fatwa bahwa pencadangan hanya boleh dilakukan ketika kondisi darurat. Jika SOP yang dimaksud tidak dibuat atau tidak ada ketentuan pastinya akan berpotensi bank melakukan pencadangan secara terus menerus sesuai dugaan dari manajemen

saja. Bank juga bisa melakukan pencadangan tanpa mempertimbangkan masalah darurat yang tidak berpotensi pada penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (*withdrawal risk*) dan hanya dilakukan bank syariah untuk meningkatkan citra

kinerja perusahaan. Hal ini berpotensi pada dilanggarnya kaidah fikih: *اَلْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَالَمَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً* (*haajah tanzilu manzilatadh dharuurati 'aammatan kaanat au khaashshatan*), yang artinya Hajat menempati status darurat, baik berupa (hajat yang bersifat) umum maupun khusus (Dahlan:2014). Kondisi darurat yang

dimaksud adalah suatu hal yang jika ditinggalkan maka seseorang akan tertimpa bahaya dan tidak ada yang bisa menggantikannya, sedangkan hajat merupakan

sesuatu yang bila ditinggalkan, dapat mendatangkan bahaya, tetapi masih bisa diganti dengan yang lain (Tuasikal, 2012). Dalam pengaplikasian kaidah fikih ini

Ahli fikih memberikan beberapa ketentuan, yaitu: hajat tersebut tidak boleh justru menyebabkan hilangnya maslahat yang lebih besar, hajat tersebut betul-betul telah

terwujud, bukan sesuatu yang masih dinantikan atau akan diwujudkan, dan hajat tersebut tidak bertentangan dengan maqashid (tujuan yang hendak dicapai) syariat

(Muhammad Shidqi al-Burnu, 2002). Namun dengan ketidakjelasan SOP yang membuka celah bagi penentuan DCR hanya sebagai praduga bukan berdasarkan

kenyataan maka berpotensi dilanggarnya kaidah fikih tersebut.

*Keempat*, mengenai ketentuan perataan laba dengan atau tanpa dana cadangan poin 5 yang menyebutkan bahwa Kebijakan Metode Perataan Penghasilan tidak boleh dilakukan apabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung di mana imbalan diberikan tanpa memperhatikan hasil nyata. Hal ini terkesan adanya inkonsistensi pada aturan ini, mengingat bahwa



dalam ketentuan umum poin 3 menyebutkan bahwa bagi hasil didasarkan atas proyeksi yang menyebabkan nasabah tidak akan menanggung kerugian sehingga secara tidak langsung ada praktik riba terselubung disana. Telah dibahas di sub bab sebelumnya bahwa bank syariah menyusun proyeksi bagi hasil berdasarkan suku bunga pasar yang berlaku dan menjadikannya acuan untuk realisasi bagi hasil yang didistribusikan. Hal ini menjadi menyerupai sistem bunga pada bank konvensional dan berpotensi pada dilanggarnya kaidah fikih yang mengatur mengenai substansi akad yang lebih diutamakan daripada lafadz dari akad tersebut, العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني, yang artinya inti akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat ((Muhammad Shidqi al-Burnu, 2002)). Dengan demikian, maka proyeksi bagi hasil di awal akad meskipun dengan lafadz akad *mudharabah* jika pada kenyataannya menimbulkan riba (bunga) maka yang menjadi perspektif dalam memandang hukumnya adalah substansi akad itu sendiri bukan lafadznya.

Kelima, mengenai *isqath al-haqq / attanazul'an al-haqq* yang tertuang pada poin 6 ketentuan peraturan laba dengan atau tanpa pencadangan. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa ketika realisasi bagi hasil dibawah proyeksi maka bank boleh memberikan haknya untuk memberikannya kepada nasabah dan disesuaikan berdasarkan proyeksi. Maka hal ini menyebabkan berubahnya nisbah bagi hasil dimana seharusnya distribusi bagi hasil diperuntukkan bagi kedua pihak, namun dengan transfer hak milik bank (*tanazul*) sebagian atau seluruhnya dapat menjadikan nasabah deposan menerima seluruh keuntungan yang berarti nasabah telah *dzolim* terhadap bank. Transfer hak bagi hasil milik bank dapat berpotensi



menjadikan bank tidak menerima hak bagi hasilnya mengingat tidak terdapat batasan atas jumlah dana yang ditransfer. Hal ini berpotensi pada dilanggarnya ketentuan bermuamalah yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS An-Nisa: 29).

Dengan demikian berubahnya nisbah disebabkan karena kerugian dan menyebabkan bank mentransfer dana hak miliknya ini tergolong kedzaliman karena nasabah mengambil hak dari bank.

#### 4.2.2 Penerapan *Income Smoothing*: Jenis, Pengukuran, dan Pengungkapan dalam

##### Perspektif Fikih

Jelas bahwa peneliti menemukan bahwa jenis *Income smoothing* yang diterapkan pada Bank Syariah adalah dengan pembentukan cadangan. Merujuk pada fatwa DSN No 87 jenis cadangan ini kemudian disebut PER (*Profit Equalization Reserve*). Pembentukan cadangan ini tidak diatur secara jelas baik dalam fatwa maupun PSAK mengenai jumlah yang harus dicadangkan. Fatwa hanya menyerahkan ketentuan mengenai jumlah dan waktu pencadangan pada Operasional perusahaan (SOP) dengan pengawasan dewan syariah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa hal ini membuat jumlah nya bervariasi antar bank.

Tidak adanya peraturan memberikan isu transparansi akibat pihak di luar perbankan tidak dapat mengetahui praktik perataan penghasilan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh bank syariah sebab pengungkapan pada laporan keuangan yang minimal sehingga sangat sulit pihak luar dapat mengetahui pengelolaan distribusi



bagi hasil bank syariah (IFSB, 2010).

Hal ini memang sebetulnya tidak memberikan suatu dampak negatif bagi nasabah deposan sebab tidak ada pemotongan bagi hasil yang seharusnya menjadi hak nasabah. Bank syariah bahkan harus berkorban untuk menyerahkan bagian pendapatannya kepada nasabah. Namun praktik perataan penghasilan DPK ini berdampak pada menurunnya laba yang dapat dibagikan ke pemegang saham sebab transfer kepemilikan hak bank syariah dilakukan setelah bagi hasil didistribusikan.

Meskipun sebenarnya terdapat pihak yang dirugikan yaitu pemegang saham yang haknya berkurang atas pengorbanan bank syariah untuk memberikan imbal hasil yang kompetitif pada nasabah, namun belum terdapat peraturan yang mengantisipasi isu transparansi yang terjadi. *Income smoothing* ini memang dianggap sebagai murni manajemen laba dan bukan dianggap kecurangan, namun menurut Bank Negara Malaysia (2011), praktik perataan penghasilan DPK dapat berpotensi pada praktik penyalahgunaan dana dan manipulasi hasil keuangan.

Keadaan ini terjadi akibat dimungkinkannya bank syariah yang memiliki kepentingan tertentu dapat membuat cadangan sebagai upaya *window dressing* (BNM, 2011). Bank syariah yang memiliki akuntabilitas publik signifikan harus melakukan transparansi kepada penggunanya, bukan hanya nasabah, tapi juga investor dan regulator. Pengorbanan bank syariah yang dilakukan untuk dapat memenangkan persaingan menimbulkan suatu upaya tak berdasar yang akan berisiko pada terjadinya *misappropriate action* oleh manajemen (BNM, 2011).

Isu tranparansi ini bisa kita sikapi dengan berpegang pada hukum Allah yang ditegaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-183 yang berbunyi:



أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ  
وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ  
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan..." (Q. S. Asy-Syu'ara ayat 181-183)

Berdasarkan tafsir, kata (تبخسوا) berarti 'kamu kurang' terambil dari kata *bakhs* yang berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibnu Arabi sebagaimana dikutip oleh Ibnu 'Asyhur, mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela, dan memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai dan kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi. Jika seseorang berkata dimuka umum "barang anda buruk" untuk tujuan menurunkan harganya padahal kualitas barangnya tidak demikian, maka orang tersebut dinilai telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini si penjual. (Ibnu 'Asyhur, 2000)

Kata (القسطاس) *Al-Qisthas* atau *Al-Qusthas* ada yang memahaminya dalam arti neraca ada juga dalam arti adil. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam hal ini Romawi yang masuk beralkulturasi dalam bahasa arab yang digunakan Al-Quran. Demikian pendapat mujahid yang ditemukan dalam Shahih Bukhari. Kedua maknanya yang dikemukakan diatas dapat dipertemukan, karena untuk mewujudkan keadilan dan memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca dan timbangan) dan sebaliknya bila anda menggunakan dengan baik timbangan yang benar, pasti akan lahir keadilan. Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Dr. Umer Chapra juga menyangkut pengukuran



kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. (Ibnu ‘Asyhur, 2000)

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, (kelak akan dikumpulkan) bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada”. (HR. Turmudzi)

Jelas bahwa prinsip adil, jujur, dan amanah ini tidak tercermin pada implementasi *income smoothing* dalam bank syariah. Oleh karenanya penting bagi regulator untuk membuat peraturan yang jelas mengenai *income smoothing* tersebut, pengukuran dan pengungkapannya pada publik.

Pemaparan-pemaparan tersebut, baik regulasi, jenis, pengukuran, dan pengungkapan memberikan celah kemadharatan baik pada tataran hubungan horizontal (masyarakat dan lingkungan) maupun hubungan vertikal (tuhan). Kekacauan informasi mengenai *income smoothing* ini akan mengakibatkan akuntansi hanya dijadikan alat kapitalisme untuk memenuhi hasrat bisnis bersifat keserakahan dan egoisme kalangan tertentu dalam hal ini investor. Maka menjadi pentinglah agenda-agenda *tazkiyah* yang dikatakan oleh Mulawarman (2013) jika diimplementasikan dalam bentuk praktik *income smoothing* sebagai wujud langkah kongkrit dalam menumbuhkan kembali kesadaran ketuhanan dalam praktik akuntansi itu sendiri.

#### 4.3 *Grand Design* Penerapan *Income Smoothing* yang Selaras *Maqashid Syariah*

Praktik *income smoothing* merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fikih digunakan dalam mengidentifikasi implementasinya apakah sesuai dengan *Maqashid Syariah*. Kaidah umum dalam fikih muamalah adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*” (Segaf Hasan Baharun: 2012)

Berdasarkan kaidah fikih tersebut semua transaksi pada dasarnya diperbolehkan menurut *syara*. Umat Islam (yang memiliki akal dan kompetensi) memiliki kelapangan dalam menciptakan bentuk-bentuk transaksi dalam muamalah. Sehingga kreatifitas umat Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai problem yang muncul seiring berkembangnya zaman. Namun perlu diketahui juga bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah umum. Hal ini disampaikan oleh Akademisi, Achmad Zaky, SE., MSA., Ak., berikut ini:

“Kaidah ini adalah kaedah besar, namun kan penerapannya tidak bisa serta merta dipukul rata. Ini juga berlaku jika tidak ada hal khusus yang menjadi dasar, maka kembali kepada kaedah umum tersebut. Dalam hal muamalah berbasis syirkah kan sudah banyak dalil khusus nya, kemudian kaidah spesifik lainnya, maka harus merfer itu juga. Maka perlu pemahaman / perbanyak literasi terlebih dahulu baru jika sudah “*menthog*” kembali kepada kaedah besar (umum) muammalah tersebut.” (Lampiran 2: Draf Wawancara Akademisi)

Pernyataan akademisi tersebut memberikan kejelasan bahwa kaidah umum tersebut tidak serta merta dijadikan landasan hukum mengenai diperbolehkan *income smoothing* dalam praktik. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan



oleh Ulama' di bidang Fikih, Dr. Habib Segaf Bin Hasan Baharun, M.H.I.,

Pengasuh Pondok Pesantren Banat DALWA (Darullughah Wadda'wah) berikut:

“Nah kalau untuk urusan ini yang dijadikan dasar adalah ‘haram itu jelas, halal itu jelas, dan diantara keduanya itu syubhat’, nah kalau di sini itu jelas tidak haramnya? Jelas tidak halalnya? Kalau tidak jelas maka syubhat, makanya disini itu harus disebutkan di awal akad dan diperjelas mengenai kesepakatannya bagaimana”. (Lampiran 9: Draf Wawancara Ulama’)

Pernyataan Ulama’ tersebut juga sejalan dengan pernyataan Narasumber

Ulama’ di bidang Fikih, K. Muhammad Abdullah Syukri, S. IP, MA, Pengasuh

Mahad As-Syakiroh 2 YLPI Buntet Pesantren berikut ini:

“Secara umum memang tidak ada dalil yang jelas menyebutkan bahwa Income Smoothing itu haram, dalam hadits juga disebutkan bahwa sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu jelas, yang berada di antaranya maka syubhat. Namun kita harus bijaksana dalam mengambil suatu hukum dari suatu praktik yang tidak ada di zaman nabi, seperti income smoothing ini, jika di dalamnya dirasa banyak mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, dan kemadhorotan sudah pasti Haram.”(Lampiran 10: Draf Wawancara Ulama’)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas sudah jelas bahwa kaidah-kaidah

umum tersebut bisa tidak berlaku lagi apabila ada dalil yang mengkhususkannya.

Berikut sabda Rasulullah yang dimaksud oleh ulama tersebut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التَّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram”. (Arba’in An-Nawawi: 2013)

Beberapa penelitian juga menemukan bahwa praktik *income smoothing* ini mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) seperti penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2010) menyebutkan bahwa dalam Akuntansi Syariah, perilaku perataan laba ini bertentangan dengan kaidah fikih muamalah, dimana mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*) karena ada pihak yang menyembunyikan informasi terhadap pihak yang lain (*unknown to one party*) dengan maksud untuk menipu pihak lain atas ketidaktahuannya tentang informasi tersebut. Dan apabila tindakan ini terbukti, maka hal ini dilarang dalam Islam, karena melanggar prinsip “*an taraaddin minkum*” (sama-sama ridha). Ketidakjelasan (*gharar*) terjadi bila salah satu pihak yang bertransaksi merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Informasi yang disembunyikan dan bersifat tidak pasti tersebut dapat berbentuk kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), ataupun waktu penyerahan (*time of delivery*) atas objek yang ditransaksikan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Dr. Habib Segaf Bin Hasan Baharun, M.H.I dan K. Muhammad Abdullah Syukri, S. IP, MA selaku Ulama dalam bidang fikih berpendapat bahwa *income smoothing* ini mengandung *tadlis* karena didalamnya terdapat penipuan hasil laba yang dilaporkan dan mengandung *gharar* karena ada ketidakjelasan informasi dan termasuk dalam upaya menutup-nutupi hasil kinerja yang sesungguhnya. Namun Akademi di bidang Akuntansi Syariah Achmad Zaky, SE., MSA., Ak., memberikan pandangan lain mengenai konsep *income smoothing* sebagai berikut:



“Jika dikaitkan dengan perataan bagi hasil, Saya pribadi setuju jika mengandung *tadlis*, sebab ini termasuk menutupi sesuatu agar tampak lebih baik, tidak menyampaikan apa ada nya. Sedangkan aspek ghoror nya ini, saya pribadi kurang sependapat sebab justru dengan adanya fatwa ini (tentang *income smoothing*) menjadikan bagi hasil dalam akad syirkah yang tadinya masuk kategori *natural uncertainty contract* menjadi lebih pasti, dan ini justru salah. Ibarat memperjelas sesuatu yang seharusnya secara alamiah tidak jelas.” (Lampiran 2: Draf Wawancara Akademisi)

Pernyataan akademisi tersebut memberikan pandangan lain bahwa *income smoothing* memang mengandung *tadlis* (penipuan) karena tidak menyampaikan informasi apa adanya dan cenderung menutup-nutupi, namun *income smoothing* tidak sepenuhnya mengandung *gharar* (ketidakjelasan) karena konteks dalam peraturan regulator yang tercermin dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 87/DSN-MUIIXII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga adalah memberikan kepastian bagi hasil bagi nasabah sesuai dengan proyeksi yang dibuat oleh perusahaan, maka dengan adanya kepastian ini tidak mungkin nasabah menanggung kerugian apabila bank mengalami kerugian. Akademisi tersebut berpendapat bahwa pada dasarnya akad *musyarakah* dan *mudharabah* merupakan *Natural Uncertainly Contract* yang berarti memang secara alamiah mengandung ketidakpastian bagi hasil karena dalam kedua akad tersebut nasabah/pemilik dana harus mendapatkan haknya ketika pengelola dana mengalami keuntungan dan menanggung kerugian yang terjadi apabila pengelola dana menderita kerugian atau dengan kata lain *profit loss sharing*.

Oleh karena itu Akademisi tersebut berpandangan bahwa aspek *gharar* dalam *income smoothing* sebagaimana dimaksud dalam fatwa tersebut menjadi tidak ada.

Namun hal ini, yakni memberikan kejelasan/kepastian pada sesuatu yang secara



natural bersifat tidak pasti itu menurut Akademisi tersebut merupakan hal yang tidak dibenarkan dan menyebabkan substansi dari kedua akad tersebut batal.

Pemberian kepastian dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah* ini tidak sejalan dengan prinsip syariah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Luqman ayat 34 berikut:

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok,” (QS. Luqman ayat 34)

K. Muhammad Abdullah Syukri, S. IP, MA, Pengasuh Ma'had As-Syakiroh II

YLPI Buntet Pesantren juga berpendapat bahwa *income smoothing* ini mengandung banyak madarat di dalamnya, berikut kutipan perkataan beliau:

“Secara umum saya melihat banyak madhorot di dalamnya jadi saya setuju jika pelaporan keuangan perusahaan mencerminkan keadaan sebenarnya baik itu rugi atau untung, tidak ada yang ditutup-tutupi apakah keuntungan/kerugian itu besar atau kecil. Jika semua saling transparan sudah tentu pihak-pihak yang terlibat akan saling rida dan tercapai keberkahan dalam bisnis” (Lampiran 10: Draf Wawancara Ulama’)

Menurut Dr. Habib Segaf Bin Hasan Baharun, M.H.I., juga mengungkapkan hal yang sama dengan redaksi agak sedikit berbeda:

“Kalau dalam pandangan ana itu lebih banyak madaratnya, karena itu kan kaitan dengan haqnya orang lain, kan salah satu permasalahan dalam penelitian anti ini kan menyimpan haknya orang lain, yang berkemungkinan ke depannya ini kalau dia tidak amanah bisa menggunakannya tanpa sepengetahuan si pemilik dana, membuka celah gitu ya, itu ya yang harus jadi sorotan dari tema ini ya. Ini sudah termasuk mafasid, karena yang menjalankan (mengelola) dana ada kemungkinan berdosa jika ada peluang (untuk menyalahgunakannya), kalau dari sisi investornya mungkin tidak menjaadi masalah ya mungkin, tapi kalau kemudian dia tahu haknya digukan (untuk dicadangkan tadi) maka akan sama-sama merasa dirugikan, jadi lebih baik praktik semacam itu ditinggalkan untuk menghindari kerusakan” (Lampiran 9: Draf Wawancara Ulama’)



Pernyataan Ulama' tersebut mempunyai 2 poin penting, yaitu pertama, *income smoothing* mempunyai lebih banyak madarat karena melanggar aspek transparansi, keridaan, dan kejujuran. Kedua, untuk meraih sesuatu yang baik harus dengan cara yang baik. Kedua poin tersebut sebagaimana kaidah ushul fikih berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan." (Segaf Hasan Baharun: 2012)

Maka jelaslah bahwa pembahasan secara umum mengenai perataan laba ini secara fikih mengandung *tadlis*, *gharar*, dan lebih lanjut mempunyai lebih banyak madarat daripada maslahat. Secara khusus peneliti sajikan tabel mengenai dasar hukum *income smoothing* menurut pendapat Ulama' tersebut.

**Tabel 4.4**  
**Dasar Hukum Islam *Income Smoothing***

| No. | Dasar Hukum Islam   | Sumber  | Implikasi   | Keterangan   |
|-----|---|---|---|--|
| 1.  | إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَيَبْنِيهِمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ..... وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ | Hadits: Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhum (Arba'in Nawawi) | الأصل في الإباحة المُعاملات إلا أن يَدُلَّ الدليل على تحريمها<br>Dalil umum ini tidak berlaku untuk praktik <i>income smoothing</i> | <i>Income Smoothing</i> secara eksplisit tidak ada dalil yang mengharamkan, maka dianggap <i>syubhat</i> , namun barang siapa yang jatuh dalam sesuatu yang <i>syubhat</i> maka akan jatuh ke sesuatu yang haram |
| 2.  | وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا  | QS. Luqman ayat 34  | Kepastian bagi hasil untuk nasabah, proyeksi, dan kepastian pengembalian modal tidak boleh dipraktikkan                             | Kepastian bagi hasil dan pengembalian modal dalam Fatwa DSN berdampak pada dilanggarnya ketentuan syariah yaitu 'tidak seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok         |

**Tabel 4.4**  
**(Lanjutan)**

| No. | Dasar Hukum Islam   | Sumber                           | Implikasi   | Keterangan  |
|-----|---|----------------------------------|---|---|
| 3.  | دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ  | Ushul Fikih: Segaf Hasan Baharun | <i>Praktik Income Smoothing</i> tidak diperbolehkan | Kemadharatan yang dimaksud: dzalim terhadap hak orang lain dan menghilangkan aspek transparansi |
| 4.  | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ | An-Nisa' : 29                    | <i>Praktik Income Smoothing</i> tidak diperbolehkan | Kenyataan pengelola menutup-nutupi laba sebenarnya, bisa menghilangkan keridhoan                |

Sumber: diolah penulis

Paparan tabel tersebut secara jelas menunjukkan dasar-dasar yang bisa dijadikan hukum dalam praktik *income smoothing*. Sehingga dapat disusun kerangka konseptual dalam penerapan *income smoothing* dengan mempertimbangkan praktik dan regulasi yang sudah ada. Mengingat bahwa akuntansi syariah dibangun dengan mengambil inspirasi dari syariah Islam. Maka sudah menjadi suatu kewajiban jika praktik-praktik yang ada dalam kehidupan berpegang pada aturan syariah. Berikut pernyataan K. Muhammad Abdullah Syukri, S. IP, MA, Pengasuh Ma'had As-Syakiroh 2 YLPI Buntet Pesantren mengenai kerangka desain *income smoothing*:

“Kejujuran, amanah, transparansi, dan perbaiki Niat dalam diri untuk bermuamalah dengan Allah. Itu yang paling diutamakan. self upgrading dengan cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah untuk menjalankan bisnis dan bermuamalah”(Lampiran 10: Draf Wawancara Ulama’)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Dr. Habib Segaf Bin Hasan Baharun, M.H.I., Pengasuh Pondok Pesantren Banat DALWA (Darullughah Wadda'wah) dalam mengungkapkan pemikirannya dalam menyusun kerangka desain penerapan *income smoothing* berikut ini:



“Harus Transparan dan disepakati di awal akad ya antara orang-orang yang berakad, kemudian tadi itu jumlah yang dicadangkan disepakati antara investor dengan pengelola dana dalam bentuk nominal soalnya sudah bersifat jelas berbeda dengan nisbah bagi hasil itu harus dengan persentase”. (Lampiran 9: Draf Wawancara Ulama’)

Konsep transparansi ini juga diungkapkan oleh Akademisi di bidang Akuntansi Syariah, Achmad Zaky, SE., MSA., Ak., dengan penjelasan kerangka praktisnya berikut ini:

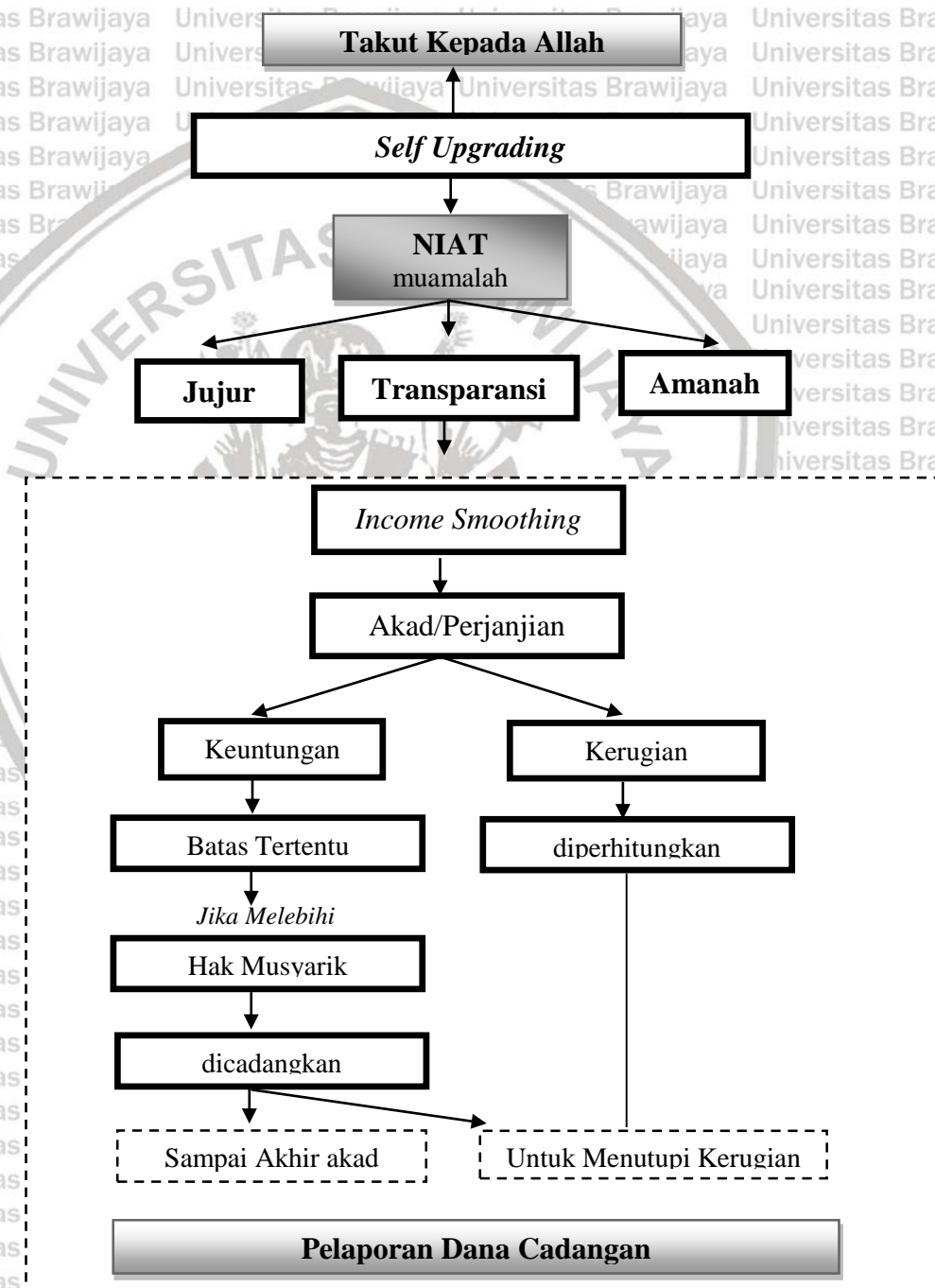
*“Saya pribadi menilai hampir mustahil menerapkan ini, saya tidak terbayangkan betapa rumitnya jika dalam hal bagi hasil, prinsip income smoothing, yang dalam hal ini PER, diterapkan. Selain rumit pertimbangan cost n benefit dalam penerapannya. Sebab jika dipaksakan maka menurut saya yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:*

- 1. Dalam perjanjian akad (mudharabah atau musyarakah atau musytarakah, dll) dituangkan jika: a). setiap ada keuntungan, Atau b) jika nilai keuntungan melewati angka tertentu akan disisihkan untuk disimpan sebagai cadangan, dan tetap menjadi hak musyarak sampai berakhirnya akad atau habis untuk menutupi kerugian.*
- 2. Jika terjadi kerugian, maka tetap diperhitungkan kerugian tersebut, sehingga tidak melanggar ketentuan atau sifat uncertainty contract nya. Masalah apakah eksekusi bagi hasil tetap dilakukan dengan mengambil cadangan PER tadi ataukah diperhitungkan diakhir akad itu pilihan yang perlu disepakati dalam perjanjian.”* (Lampiran 2: Draf Wawancara Akademisi)

Selain itu, terdapat pula teori-teori yang bisa disadur untuk mengkonstruksi penerapan *income smoothing* ini. Salah satunya *Syariah Enterprise Theory*, yang menyatakan bahwa Tuhan adalah *stakeholder* tertinggi, sehingga dalam konteks *income smoothing* ini *agency theory* yang hanya mengedepankan *agent* dan *principal* dalam suatu kegiatan bisnis menjadi tidak relevan karena menafikan kesadaran Tuhan. Di sisi lain, meskipun fatwa mengenai *income smoothing* ini dimaksudkan untuk kemaslahatan, akan tetapi masih bias dan masih menimbulkan kemadaratan yang lebih banyak hal ini menyalahi teori maslahat yang dikemukakan

oleh Imam Malik yang telah peneliti paparkan di BAB sebelumnya. Berdasarkan pendapat akademisi dan Ulama' serta beberapa teori yang relevan tersebut peneliti merangkum kerangka desain dibawah ini:

**Gambar 4.6**  
**Kerangka Desain Penerapan *Income Smoothing* Selaras *Maqashid Syari'ah***



Sumber: diolah penulis



Berdasarkan gambar tersebut maka yang menjadi tujuan praktik bermuamalah adalah Allah sebagai *Rabb*, dengan keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui atas segala perbuatan manusia maka seorang Hamba dalam hal ini Akuntan, Manajer, atau pihak-pihak yang terlibat dalam bermuamalah merasa diawasi oleh Allah. Sehingga merasa takut apabila dirinya menyimpang dari hukum-hukum Allah. Dengan kata lain mewujudkan kesadaran *Rabbaniyat* dan *Ruhhaniyat* dalam bermuamalah. Apabila seorang hamba orientasinya sudah kepada *Rabb*, maka dengan sendirinya niat yang akan muncul untuk mencapai rida Allah tersebut akan baik. Dan pada akhirnya akan terwujud dalam akhlak seorang hamba seperti jujur, amanah, dan transparan terhadap apa yang telah dicapai. Dalam konteks *income smoothing* ini bisa terlihat dalam kejelasan akad di awal baik mengenai potensi risiko yang ditanggung antara *sahibul maal* dan bank maupun proses mitigasi mengenai risiko-risiko tersebut. Apabila dirasa harus mencadangkan dengan tujuan memitigasi risiko kerugian maka itu harus diungkapkan tidak perlu ditutup-tutupi, semua dilaporkan apa adanya baik rugi atau untung. Akan tetapi ‘apa ada’ nya yang dimaksudkan di sini bukan berarti tanpa usaha melainkan pengungkapannya apa adanya setelah menjalani serangkaian ikhtiar sesuai kapasitas sebagai hamba yang mempunyai intelektual, kemudian selanjutnya adalah ikhlas menerima apa yang telah Allah berikan baik besarnya keuntungan maupun kerugian harus diterima dengan ikhlas. Serangkaian pelajaran/ibrah yang didapat selama ikhtiar sampai tawakkal kemudian digunakan oleh seorang hamba untuk membenahi kinerja masa depan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Secara umum, praktik *income smoothing* masih sarat akan *tadlis* dan *gharar*.

Terbukti praktik dalam entitas syariah dan konvensional di Indonesia masih terdapat kesamaan logika, meskipun dikemas dalam peraturan yang berbeda. Hal ini berimplikasi terhadap dilanggarnya hukum Islam dalam entitas syariah itu sendiri. Secara khusus mengenai pandangan akuntansi syariah di Indonesia yang tercermin dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income smoothing*) Dana Pihak Ketiga masih mengindikasikan adanya penyimpangan nilai-nilai syariah yang berakibat juga pada penyimpangan fikih di dalamnya. Selain itu, penerapan *income smoothing* yang hanya sebatas ‘patuh’ terhadap regulasi yang ada dirasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan terutama isu transparansi dan keadilan, maka perlu adanya *tazkiyah* (penyucian) terhadap penerapan *income smoothing* guna merekonstruksi praktik *income smoothing* sesuai dengan *maqashid syari’ah*. Salah satunya dengan cara mengganti orientasi laba dan pendapatan menjadi orientasi ketuhanan. Secara kongkret bisa dilakukan dengan melakukan *upgrading* diri dengan cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah sehingga terbentuk karakter pebisnis yang jujur, amanah, dan transparan melaporkan hasil bisnisnya tanpa ada unsur penipuan di dalamnya.



## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Akses informasi internal terhadap entitas syariah dan entitas konvensional yang menjadi objek penelitian.
2. Dilema etis mengenai 'kerahasiaan' informasi nasabah atau internal manajemen yang disampaikan oleh karyawan, sehingga 'mungkin' membuat pihak yang terkait manajemen menutup-nutupi sebagian informasi yang sesungguhnya.

## 5.3 Saran untuk Penelitian Berikutnya

Realita bahwa praktik ekonomi islam khususnya domain akuntansi syariah yang masih berkiblat pada ekonomi barat masih jamak terjadi. Dengan kata lain sistem akuntansi islam masih mengedepankan *self interest* dan menafikan adanya kekuasaan tertinggi yaitu Tuhan dalam ber-ekonomi membuat sebagian besar praktik *income smoothing* masih bersifat materialistik. Fenomena ini menjadi agenda penting dalam penyucian (*tazkiyah*) ekonomi sebagai wujud pemurnian ekonomi islam itu sendiri.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat memperluas jangkauan entitas yang akan diteliti untuk mengantisipasi tindakan non-kooperatif subjek (informan) dari instansi tertentu yang menjadi objek penelitian. Selain itu, etika dalam mencari sumber data dalam hal ini proses wawancara harus diutamakan untuk memperoleh data yang diinginkan mengingat bahwa informasi mengenai praktik *income smoothing* ini bisa menjadi topik yang sensitif bagi pihak tertentu bahkan bisa menjadi topik yang memuat unsur politis.



## DAFTAR PUSTAKA

Asyur, Ibnu dan Muhammad Tahir. 2002. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Jilid 1-12 (Juz 1-30)*. Tunisia: Dar Souhnoun.

AAOIFI. 2010. *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Agung Santoso. 2010. Studi Deskriptif Effect Size Penelitian-Penelitian Di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. *Jurnal Penelitian*: 1-17.

Agustianto, Rio Nur. 2014. "Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perataan Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2011-2013)". *Skripsi yang dipublikasikan*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Ahmad, Hasan Haj, "Maqasid Syari'iyah: Konsep dan Pengaruhnya dalam Pembentukan Hukum", dalam Abdul Karim Ali Dan Raihanah Azahari (Ed), (2014), *Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, t.th.

Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ahmed Naveed (2011) Risk Management Practices and Islamic Banks: An Empirical Investigation from Pakistan, *Interdisciplinary Journal of Research in Business* Vol.1, Issue 6, June 2011 (pp.50-57)

Al-Albani, M.S. 2006. *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2)*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Qur'an dan terjemahannya. 2010. Al-Mizan Publishing House: Bandung.

Alim, Mohammad Nizarul. 2011. Akuntansi Syariah, Esensi, Konsepsi, Epistemologi, dan Metodologi. *Jurnal Investasi* Vol. 7 No. 2 Desember 2011: 154-161.

An-Nawawi, Imam. 2013. *Matan Hadits Arba'in An-Nawawi*, Solo: Insan Kamil

Antonio, Muhammad Syafiie. 2001. *Bank syariah (Dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani.

Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.



Arwani, Agus. 2012. Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Jurnal RELIGIA Vol. 15 No. 1, April 2012*: 125-146.

Asmawi. 2014. Konseptualisasi Teori Maslahah. *Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No.2*: 1-18.

Baharun, Segaf Hasan. 2010. Fiqih Muamalat - Kajian Fiqih Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi'i RA. Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'wah.

Bank Negara Malaysia. (2017). Islamic Banking System: Constituents of Capital. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia

Bank Negara Malaysia. (2017). Islamic Banking System: Non-Performing Financing/ Impaired Financing and Impairment Provisions . Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.

Bank Negara Malaysia. (2017). Islamic Banking System: Statement of Assets. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.

Barokah dan Kurniasih. 2015. Persepsi Manajemen Bank Umum Syariah terhadap Kemungkinan Penerapan PER (Profit Equalization Reserve) Di Tinjau dari Sisi Akuntansi Bank Syariah. *Jurnal Nisbah, Vol 1 No. 2 (2015)*. Hal 132-144.

Bank Indonesia. 1998. UU No.10 tahun 1998, Tentang Perbankan, Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 1998. UU No. 21 tahun 1998, Tentang Perbankan Syariah, Jakarta: Bank Indonesia.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al. 1993. Shahih al-Bukhari, juz II, terj. Ahmad Sunarto dkk. Semarang: asy-Syifa.

Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Risalah Gusti.

CIMB Niaga. 2021. "ASEAN NETWORK". <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/index>. Diakses pada 26 Mei 2021.

Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta : Amzah, 2014

Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta

Djazuli. 2010. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.



DSN MUI. 2012. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga. Jakarta: DSN MUI.

Fadlan. 2014. GADAI SYARIAH; Perspektif Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *Jurnal al-Ihkam*, Vol.1 No.1 Juni 2014: 30-31.

Faradila, Astrid dan Ari Dewi Cahyati. 2013. Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah. *JRAK Vol. 4 No.1 Februari 2013*: 57 – 74.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000. 2000. “Prinsip Distribusi Hasil Usaha”. <http://www.hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018.

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.

Hamsir. 2012. *Aspek-Aspek Tindak Pidana pada Perbankan Syariah*. Makassar: Alauddin University Press.

Harahap, Sofyan Safri, dkk. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : LPFE Usakti.

Hery. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS.

Hilal, Syamsul. 2012. Fiqih Dan Permasalahan Kontemporer. *Jurnal ASAS Vol 4, No 1 Januari 2012*: 1-9.

IAI. 2007. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Graha Akuntan.

IAI. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Graha Akuntan.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. 2013. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, juz II, terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ibrahim, Azharsyah. 2009. Akuntansi Konvensional Vs Akuntansi Syariah: Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 1, No. 1, 2009*: 1-15.

International Financial Service Board (IFSB). 2010. “Islamic Finance and Global Financial Stability”. <https://www.ifsb.org/sec03.php>. Diakses pada 30 Desember 2020.



- Isma. 2012. "Bhakti Investama Bantah Komisaris Terkait James". <https://www.tempo.com/read/news/2012/06/11/063409868/Bhakti-Investama.html>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018.
- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Kiswara, Endang. 1999. Teori Keagenan (Agency Theory). Wujud Kepedulian Akuntansi Pada Makna Informatif Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Media Akuntansi*. No. 34/Th VI April 1999: 54-63.
- Khairani, Hamni. 2015. "Etika Bisnis Islam tentang Manajemen Laba". *Skripsi*. Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kusumawati, Harini. 2002. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktek Perataan Laba pada Perusahaan Perbankan Non Go Public di Indonesia (Tahun 1995-2000)". *Tesis*. Program Studi Magister Manajemen, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Luayyi, Sri. 2014. Teori Keagenan dan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer. *Jurnal Etika Bisnis Vol. 1 No. 2 Thn 2014*: 199-216.
- Machfoedz, Mas'ud. 1997. *True Reward Systems' dan Media Pertanggung jawaban* pada Tuhan. Semarang: Makalah Kuliah Tamu.
- Martha, Kresno, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Martono. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Mukhlis, Imam dan Sutrisna. 2015. *Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: salemba empat.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulawarman, Aji Dedi. (2013). Masa Depan Ekonomi Islam: dari Paradigma Menuju Metodologi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam Imanensi*, Vol. 1, No. 1, September 2013, Hlm. 1-13.
- Mulawarman, Aji Dedi. (2013). Nyanyian Metodologi Akuntansi Ala Nataatmadja: Melampaui Derridian Mengembangkan Pemikiran Bangsa "Sendiri". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 4 Nomor 1 April 2013 Halaman 149-164*.



Mulawarman, Aji Dedi. (2014). On Holistic Wisdom Core Datum Accounting: Shifting From Accounting Income To Value Added Accounting. *The International Journal of Accounting and Business Society* Vol. 22, No. 1 August 2014 Halaman 69-92.

Muliasari, Indah dan Dalili Dianati. 2014. Manajemen Laba dalam Sudut Pandang Etika Bisnis Islam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, No. 2 2014: 157182.

Mustofa, Imam. 2010. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nasrullah, Zaki Fuad, dan Muhammad Yasir Yusuf. 2014. Analisis Tindakan Perataan Laba dalam Meraih Keuntungan Perusahaan Ditinjau Menurut Etika Ekonomi Islam. *Jurnal Etika Bisnis* Vol. 3 No. 2, July 2014: 156-176.

Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. SNA X Makasar.

Nawawi, H. Hadari. 1983. *Metode Penelitian Deskriptif*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Nazir, Moh. 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Neolaka, Imos, 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nur, Iffatin. 2013. *Epistemologi Fiqih*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press.

Nurseto. 2009. "Skandal Laporan Keuangan Ganda Bank Lippo". <http://singgihnurseto.blogspot.com/2009/12/skandal-laporan-keuangan-ganda-bank.html>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018.

Padmantyo, Sri. 2010. "Analisis Manajemen Laba Pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia)". *Disertasi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. USA: Sage Publication Inc.

Rahmanti, Virginia Nur, Aji Dedi Mulawarman, Ari Kamayanti. (2013). Menggeser Paradigma Stock Concept Menuju Flow Concept: Kritik Atas Net Revenue Sharing Pada Akuntansi Mudharabah. *Jurnal Review Ekonomi dan Budaya Islam* Vol. 1 No. 1 Thn 2013: 8-22.



Rahmawati, *et al.* 2006. "Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta". Simposium Nasional Akuntansi IX, IAI, Padang.

Riduwan, Akhmad. 2013. Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba: Studi Hermeneutika. *Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2 Thn 2013*: 1-21.

Roslender, Robin. 1992. *Sociological Perspectives on Modern Accounting*. Routledge: London.

Scott, W. R. 2003. *Financial Accounting Theory*. New Jersey : Prentice Hall Inc.

Shidqi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu Abi al-Harits al-Ghazi. 2002. *Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fikih al-Kulliyyah*. Beirut, Lebanon: Muassasah Ar-Risalah.

Subani, Agung. 2009. "Pengaruh Praktik Manajemen Laba Terhadap Biaya Modal Pada PT Bokwang Indonesia". *Disertasi yang dipublikasikan*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam 45, Bekasi.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sulistiawan, Dedhy, dkk. 2011. *Creatif Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi*. Jakarta: Salemba.

Suprayogi, Noven. 2013. Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2014. *JESTT Vol. 2 No. 7 Juli 2015*: 583-597.

Supriyanto, Agus. 2010. Ijtihad: Makna dan Relasinya dengan Syari'ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih. *Jurnal Maslahah, Vol.1, No. 1, Juli 2010*: 1-20.

Sutami, Wahyu. 2012. "Analisis Manajemen Laba (Earning Management) Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Publik (Study Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2007-2009)". *Disertasi yang dipublikasikan*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam 45, Bekasi.

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.



Suwiknyo, Dwi. 2007. Teorisasi Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. 1, No. 2 Desember*: 211-227.

Syaiful, Moh. 2017. Manajemen Laba (*Earnings Management*) Dalam Tinjauan Etika Islam. *Jurnal Ekomadania Vol. 1 No.1. Juli 2017*: 28-56.

Triyuwono, Iwan. 1997. Akuntansi Syari'ah Dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Vol 1. No. 1. Mei 1997*: 82-112.

Triyuwono, Iwan. 2007. Mengangkat "Sing Liyan" Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. *Simposium Nasional X. Vol. 2, No. 2*: 186-368.

Tuasikal, Muhammad Abduh. 2012. Panduan Zakat Praktis, [www.pkpu.or.id/files/panduan.zakat.praktis.pkpu.pdf](http://www.pkpu.or.id/files/panduan.zakat.praktis.pkpu.pdf). Diakses pada 30 Desember 2020

Yusuf, Ahmad dan Marzuqi Achmad Badarudin Latif. 2010. Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 7 No. 1 Maret 2010*: 1-22.

Suandi. 2017. Classification of profitsharing investment accounts: A survey of financial statements of Islamic banks in Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, vol. 10, pp. 2017*: 351-370.



**Lampiran 1****Draf Wawancara Akademisi di Bidang Akuntansi Syariah, Prof Iwan Triyuwono, SE, Ak, MEc, PhD, Guru Besar Universitas Brawijaya (UB)**

Peneliti : “Bagaimana aturan dan dasar hukum akuntansi syariah mengenai *Income smoothing*?”

Informan : “Kalau bicara tentang *income smoothing* atau akuntansi syariah saya agak membedakan antara akuntansi syariah dan akuntansi islam, kalau akuntansi syariah memang ada aspek syariahnya, tapi kalau akuntansi islam itu nanti ada akuntansi syariah, akuntansi *tariqat*, akuntansi *ma’rifat*, dan akuntansi *haqiqat*, keseluruhannya itu nanti membentuk kesatuan akuntansi islam. Akuntansi syariah memang orientasinya pada luar, aturan-aturan, kalau ada standar ya standar itu yang dipakai PSAK 101 dan seterusnya itu bagian dari akuntansi syariah tadi. Karena aturan dan orientasinya ke sana, kadang-kadang praktisi itu ya memiliki orientasi ke luar juga, (*statement* mereka) ‘ya terserah *income smoothing* tidak apa-apa asal tidak melakukan manipulasi, ya kan *incomenya* segini, tapi kita menginginkan *income* yang segini, ya kan gak apa-apa itu kan tidak bohong dan memang *incomenya* segitu kok toh kami menggunakan metode akuntansi yang konsisten’ maka dengan alasan seperti itu kemudian mereka membolehkan *income smoothing* karena tidak melanggar standar, (contoh metode penyusutan) ini kan terserah mereka mau menggunakan metode penyusutan apa supaya *smooth income* nya itu. Jadi artinya apa? Dengan perspektif akuntansi syariah bisa jadi *income smoothing* itu tidak apa-apa, tapi kalau saya

masuk dalam akuntansi *thariqat* maka apa yang muncul dan dipraktikkan dalam akuntansi syariah tadi itu tergantung pada niatnya.

Kalau niatnya itu untuk memberikan persepsi bahwa perusahaan itu bagus, *nah* ini bohong tidak kira-kira? Atau dengan kata lain dalam perspektif akuntansi *thariqat* maka tergantung niat dari orang yang mempraktikkan itu, makanya dilihat dulu *nih* niatnya apa kalau untuk membohongi maka menurut saya itu gak benar meskipun sudah sesuai standar. Jadi pada dasarnya akuntansi *thariqat* ini berarti berhubungan dengan rasa dalam diri kita, rasa jujur/bohong, ikhlas, atau lainnya yang ada dalam diri akuntan tadi”.

Peneliti : “Secara umum pandangan fikih terhadap *Income smoothing*? Bagaimana dasar hukum dari sisi fikih muamalah?” ada *statement* yang mengatakan bahwa ‘*Income smoothing* mengandung *taḍlis* dan *gharar*’ Setuju/Tidak Setuju?”

Informan : “Saya umpamakan dulu ya, kalau transaksi *murabahah*, saya beli sepeda motor di *dealer* harganya itu 15 juta, tapi kalau saya pakai bank syariah harganya itu 20 juta, maka keuntungannya bank syariah ini kan 5 juta ya, bagi bank syariah ini misalkan ingin *men-share* atau mendistribusikan keuntungan ini tidak hanya di tahun ini tapi di tahun-tahun selanjutnya. Dengan cara apa? Misal memakai metode pencatatan penyusutan tertentu yang membuat laba yang dilaporkan tadi menjadi tinggi, rendah, atau stabil tiap tahunnya. *Nah* kalau si bank tadi mempunyai niat supaya kelihatan *trend* nya bagus maka saya sangat



setuju dengan *statement* ada unsur penipuan (*tadlis* dan *gharar*), nah ini yang saya maksud dengan akuntansi itu tentang rasa tadi, niat yang menentukan, kalau niatnya untuk pencitraan maka ini tergolong dalam *riya*”.

Peneliti : “Bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai *income smoothing* ini? Diperbolehkan atau tidak?”

Informan : “Nah ini tergantung mau jawaban di level mana dulu, akuntansi syariah, *thariqat*, *ma'rifat*, atau *haqiqat*? Kalau di level *thariqat* jelas ini tidak diperbolehkan”.

Peneliti : “Bagaimana pandangan Bapak terhadap dilema pengambilan hukum tentang *Income smoothing*?”

Informan : “Kembali kepada akuntansi *thariqat* tadi, ini kan berhubungan dengan rasa, jadi tidak perlu dilema, kalau dirasa tidak enak dan ragu-ragu maka boleh ditinggalkannya. Ini ukurannya rasa ya bukan materi, yang saya maksud materi ini *kan* mengenai tampilan luar, yang menjadi pertanyaan, apa itu yang menjadi tujuan utama? Apa hati tenang melakukannya? Kalau ada hati kecil yang gelisah, maka jangan lakukan. Lakukan yang membuat anda merasa tenang dan damai, kalau sudah begitu berarti benar bahwa apa yang anda lakukan adalah petunjuk dari Allah.”

Peneliti : “Bagaimana desain penerapan *Income smoothing* yang ideal dan sesuai syariah?”

Informan : “Akuntansi *kan* bukan sekedar akuntansi *treatment* dalam artian

*accounting treatment* ini dibuat *smooth* atau *enggak*, itu menyangkut akhlak dari orang yang melakukan praktik, sehingga ilmu akuntansi syariah itu harus menyatu dengan rasa yang ada dalam diri orang yang melakukan praktik dan juga orang yang menggunakan informasi akuntansi tadi itu, sehingga itu menjadi satu kesatuan, problemnya adalah kesadaran umat islam itu kurang, walaupun paham tentang akuntansi syariah itu dia hanya melakukan syariah *fisically*, sekadar untuk menggugurkan kewajiban, apa makna dan apa yang diperoleh dari apa yang dia lakukan itu tidak masuk dalam pertimbangan? Maka dari itu harus ada kesadaran keberadaan Allah dalam diri kita supaya apa yang dilakukan tidak berdasarkan hawa nafsu saja. *Nah* itu tergantung pada diri kita mau mengikuti nafsu, akal, hati, atau Allah *nih* dalam melakukan *income smoothing* ini. *Nah* memang akuntansi syariah yang saya buat ini *kan* tujuannya untuk mendorong orang untuk berdzikir guna memenuhi kebutuhan materi, mental, dan spiritual dalam rangka beribadah kepada Allah, dan kembali kepada Allah dengan jiwa yang suci, dan jangan sampai akuntansi syariah itu memicu orang untuk berbuat tidak baik, makanya akuntansi syariah itu adalah seni untuk meracik informasi yang berfungsi sebagai dzikir dan do'a untuk memenuhi kebutuhan materi, mental, dan spiritual manusia dalam rangka beribadah, bertaqwa kepada Allah, jadi jangan sampai informasi akuntansi itu hanya mengedepankan keuntungan saja, *kan* tujuan secara ekonomi kan akuntansi itu untuk mendapatkan



keuntungan, sehingga melakukan segala macam cara, yang penting untung. Tapi yang benar tujuan dari akuntansi itu adalah untuk berdzikir dalam rangka kembali kepada Allah dengan jiwa yang suci”.



**Lampiran 2**

**Draf Wawancara Akademisi di Bidang Akuntansi Syariah, Achmad Zaky, SE., MSA., Ak., Dosen Universitas Brawijaya (UB)**

Peneliti : “Bagaimana aturan dan dasar hukum akuntansi syariah mengenai *Income smoothing*?”

Informan : “Ini menarik topik yang menarik, Jika merefer regulasi, maka menariknya adalah adanya Fatwa No 87 DSN MUI (terlampir) yang membahas metode perataan laba atas dana pihak ketiga (DPK), dimana dalam fatwa ini menjelaskan bagaimana petunjuk/ketentuan kebolehan penerapannya. Fatwa ini lah yang dijadikan dasar nantinya dalam praktik, evaluasi kepatuhan syariah dan referensi penyusunan standar / perlakuan akuntansi syariah”.

Peneliti : “Bagaimana ketentuan *Income smoothing* yang diperbolehkan atau tidak dalam aturan akuntansi syariah di Indonesia?”

Informan : “Monggo bisa merefer pada fatwa 87 saja *nggih* cukup jelas disana, yang perlu diperhatikan pertama mengenai pendapatan yang dibagihasilkan itu adalah pendapatan yang diperoleh dari mengelola dana nasabah setelah dikurangi sama beban-beban operasional perusahaan, sejauh ini seperti itu peraturan PSAK maupun fatwa DSN, namun nanti bisa dilihat implementasinya bagaimana? Bisa dikritisi itu, dan selebihnya bisa baca di ketentuan fatwa tersebut”.

Peneliti : “Apakah terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penerapan *Income smoothing* dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah? Apa dan bagaimana perbedaannya?”



Informan : “Jelas sangat berbeda, konteks nya pun juga berbeda, jika merujuk fatwa 87, ini terkait hanya proses bagi hasil bukan pada laba-rugi entitas agar tampak laba stabil. Memang diperlukan istilah khusus agar tidak rancu dengan keumuman istilah *Income Smoothing* di konvensional”.

Peneliti : “Bagaimana penerapan *Income smoothing* dalam praktik entitas konvensional dan entitas syariah? Bagaimana dan adakah yang menyimpang dari standar yang berlaku?”

Informan : “Saya pribadi tidak pernah melakukan riset atau mendalami masalah praktik di konvensional, sehingga kurang relevan jika menjawab nya, sedangkan pada entitas syariah monggo dapat merefer pada hasil riset kami, insyaallah saya lampirkan”.

Peneliti : “Secara umum pandangan fikih terhadap *Income smoothing*? Bagaimana dasar hukum dari sisi fikih muamalah?”

Informan : “Kalau yang dimaksud sebagaimana dengan istilah meratakan laba maka jelas ini ada unsur ketidakjujuran, dan jika dipraktikkan dalam suatu akad, misalkan *mudharabah*, *musyarakah* maka akan menjadikan akad tersebut tidak sesuai lagi. Namun jika merefer pada makna pencadangan atas bagi hasil, maka DSN MUI masih mengijinkan sebagaimana ketentuan pada fatwa DSN MUI no 87. Namun jika opini saya pribadi maka kembali akan mengacaukan substansi akad bagi hasil itu sendiri”.

Peneliti : “*Statement ‘Income smoothing* mengandung *tadlis* dan *gharar*’ Setuju/Tidak Setuju?”

Informan : “Jika dikaitkan dengan perataan bagi hasil, Saya pribadi setuju jika mengandung *tadlis*, sebab ini termasuk menutupi sesuatu agar tampak lebih baik, tidak menyampaikan apa ada nya. Sedangkan aspek *gharar* nya ini, saya pribadi kurang sependapat sebab justru dengan adanya fatwa ini menjadikan bagi hasil dalam akad *syirkah* yang tadinya masuk kategori *natural uncertainty contract* menjadi lebih pasti, dan ini justru salah. Ibarat memperjelas sesuatu yang seharusnya secara alamiah tidak jelas”.

Peneliti : “*Statement ‘Income smoothing*: Asal hukum adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya’ Setuju/Tidak Setuju?”

Informan : “Kaidah ini adalah kaedah besar, namun *kan* penerapannya tidak bisa serta merta dipukul rata. Ini juga berlaku jika tidak ada hal khusus yang menjadi dasar, maka kembali kepada kaedah umum tersebut. Dalam hal muamalah berbasis *syirkah kan* sudah banyak dalil khusus nya, kemudian kaidah spesifik lainnya, maka harus merefer itu juga. Maka perlu pemahaman / perbanyak literasi terlebih dahulu baru jika sudah “*menthog*” kembali kepada kaedah besar (umum) mu’amalah tersebut”.

Peneliti : “Bagaimana pandangan Bapak terhadap dilema pengambilan hukum tentang *Income smoothing*?”

Informan : “Saya pribadi tidak perlu dilema atas sesuatu yang jelas, *nah* yang masih merasa dilematis dan ragu atas sesuatu yang jelas ini, inilah yang masih punya masalah dalam pemahaman beragama. Tidak sepatutnya menjalankan transaksi syariah jika masih mengedepankan prinsip



mencarikan dalil pembenaran atas aktivitas yang dilakukan. Sepatutnya adalah kita pahami ilmunya, kemudian *Sami'na wa atho'na*, dan dipraktikkan. Jangan sampai agamanya yang diputer-puter dan ditekuk tekuk untuk mencari *hielah* (pembenaran) atas tindakan kita”.

Peneliti : “Melihat fenomena yang ada apakah penerapan *Income smoothing* dalam praktik sudah sesuai syariah?”

Informan : “Silahkan baca hasil riset kami” (riset yang dimaksud adalah riset mengenai *income smoothing* dalam perbankan syariah) disitu dijelaskan mengenai DCR, untuk menyikapi adanya risiko *Displaced Commercial Risk* (DCR) sendiri, biasanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income smoothing*) Dana Pihak Ketiga, bisa dibaca dan dipahami ya, menurut saya itu sudah cukup jelas. Namun *mbaknya* perlu memastikan bagaimana praktiknya di LKS itu sendiri mengenai metode, pengukuran, dan pengungkapannya, soalnya dalam fatwa tersebut hanya disebutkan mengenai cara yang dilegalkan saja yaitu membentuk dana cadangan (PER) dan tanpa membentuk dana cadangan”.

Peneliti : “Bagaimana desain penerapan *Income smoothing* yang ideal dan sesuai syariah?”

Informan : “Saya pribadi menilai hampir mustahil menerapkan ini, saya tidak terbayangkan betapa rumitnya jika dalam hal bagi hasil, prinsip *income smoothing*, yang dalam hal ini PER, diterapkan. Selain rumit

pertimbangan *cost n benefit* dalam penerapannya. Sebab jika dipaksakan maka menurut saya yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian akad (*mudharabah* atau *musyarakah* atau *musytarakah*, dll) dituangkan jika : (a) setiap ada keuntungan, atau (b) jika nilai keuntungan melewati angka tertentu akan disisihkan untuk disimpan sebagai cadangan, dan tetap menjadi hak *musyarik* sampai berakhir nya akad atau habis untuk menutupi kerugian.
2. Jika terjadi kerugian, maka tetap diperhitungkan kerugian tersebut, sehingga tidak melanggar ketentuan atau sifat *uncertainty contract* nya. Masalah apakah eksekusi bagi hasil tetap dilakukan dengan mengambilkan cadangan PER tadi ataukah diperhitungkan diakhir akad itu pilihan yang perlu disepakati dalam perjanjian.”



**Lampiran 3**

**Draf wawancara Akademisi di Bidang Ekonomi Syariah, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A, Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim**

Peneliti : “Secara umum pandangan fikih mengenai *Income smoothing*? Bagaimana dasar hukum dari sisi fikih mu’amalah?”

Informan : “Ada tiga hal ya sebetulnya untuk memandang *income smoothing* ini, yaitu (1) substansi, (2) motivasi, dan (3) implementasi, *kan* kalau secara substansi *income smoothing* ini dalam kurun waktu satu tahun tidak mungkin labanya sama rata semua tiap bulan, pasti ada kemungkinan perusahaan meratakan labanya ini, yang kemudian pelaporannya tidak sesuai fakta dan realita, *nah* saya memandang memang praktik ini *kan* banyak pro-kontranya jadi memang minimal *Syubhat* lah ya kalau banyak pro-kontra begini. *Nah* pro-kontranya ini *kan* buka pada wajar atau tidak wajar, tapi lebih kepada boleh dan tidak boleh. Makanya kembali kita harus melihat pada substansinya, substansi ini bisa kita lihat dari sudut pandang konsep laba dalam islam. Kalau konsep laba dalam islam ini *kan* bisa kita lihat pada kaidah-kaidah fikih seperti *الخارج بالضمان* kemudian ada juga *الغَنَمُ بِالْغَرَمِ*, keuntungan berbanding dengan potensi risiko yang dihadapi, yang intinya adalah tidak bisa memastikan laba itu, sebab ini nanti ada konsekuensinya terkait tanggung jawab bagi hasil dan juga zakat. Sedangkan dalam praktik *kan* *income smoothing* ini meratakan laba, yang menyebabkan ini tidak sesuai relita dan fakta yang ada, sifat laba ini *kan* tidak pasti dan bersifat fluktuatif sehingga tidak boleh memastikan sesuatu yang belum pasti

ini, diantara faktor yang menjadikannya riba itu dilarang adalah memastikan sesuatu yang tidak pasti. *Nah* laba itu adalah sesuatu yang tidak pasti, makanya akuntansi syariah itu *kan* secara fikih adalah *cash basis*, yang berarti ketika nanti dalam usaha yang dicatat adalah keuntungan realnya bukan berdasarkan *akrual basis* yang berarti potensi dari keuntungan yang dicatat. Makanya perlu dilihat dari substansi dari akad yang dibuat”.

Peneliti : “Bagaimana pandangan informan terhadap dana cadangan yang dibentuk untuk memitigasi risiko bagi hasil dari nasabah?”

Informan : “kalau menurut saya dana cadangan ini kan terkait dengan kewajiban yang harus ditunaikan, kalau dalam konsep zakat, dana cadangan ini merupakan komponen yang tidak dihitung, kecuali memang dana cadangan itu memang tidak digunakan”.

Peneliti : “Bagaimana pandangan informan terhadap dana cadangan yang dibentuk untuk kepentingan perataan laba, khususnya dalam akad investasi?”

Informan : “ya memang ada kemungkinan (perusahaan membentuk cadangan) untuk mitigasi ketika terjadi kerugian. Rasionalitas dari pemegang saham *kan* dia akan menyimpan/investasi uang di perusahaan yang kinerjanya bagus, dari mana tercerminnya? Yang paling gampang dari laba mengenai ini (pembentukan cadangan) bisa merujuk pada PSAK 55 Mengenai Instrument Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (revisi 2014) dan peraturan perbankan mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Kemudian selain itu, hal ini harus dilihat dari dasarnya



dulu ya, laba *smoothing* ini kan lahir dari transaksi-transaksi yang berbasis bunga kan, *nah* ketika dipandang dari sisi islam, maka *kan* ini dari awal saja lahir dari hal yang tidak diperbolehkan dalam islam yaitu bunga, itu saja sudah bermasalah kan. Ok misalnya kita mengesampingkan lahiriahnya itu ya, misal laba yang diperoleh dari akad *mudharabah* ini ditahan dan diputar kembali maka itu tidak menjadi masalah asal dengan kesepakatan, tapi apakah hal itu bisa dilakukan sesuai kesepakatan? Maksudnya begini akan menjadi rumit sekali untuk praktiknya. Belum lagi masalah proyeksi ya, padahal kan konsep laba dalam islam kan sesuai real yang didapat bukan berdasarkan estimasi”.

Peneliti : “Bagaimana pandangan informan terhadap bank syariah yang melakukan praktik *income smoothing*?”

Informan : “Memang kalau dalam perbankan itu ada isu mengenai akad investasi yaitu akad *mudharabah*, akad ini kan ada dua yaitu *mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*, kalau untuk *mudharabah muqayyadah* yang akad investasi diperuntukkan untuk proyek tertentu yang disepakati maka praktik *income smoothing* ini menjadi hal yang susah dilakukan karena kalau dengan akad ini, misal saya investasi pada bank syariah untuk proyek tertentu yang tidak terkait dengan proyek yang lain. Kalau *mudharabah muthlaqah* ini memang ada yang berpandangan bahwa bank syariah ini kan tidak hanya investasi pada satu unit saja, misal jika unit A mengalami kerugian dan unit B untung,

maka keuntungan inilah yang akan digunakan untuk menutupi kerugian di unit A dan dibagikan kepada investor. Tapi perlu diingat juga bahwa konteks yang dipraktikkan dalam perbankan ini berbeda dengan yang dipraktikkan dalam perusahaan, kalau perusahaan misal mendapat investor, jadi pada dasarnya investor hanya berinvestasi pada satu usaha saja. *Nah* beda kalau nasabah perbankan dia *kan* sebenarnya invest kepada unit mana saja yang dimiliki oleh bank. Namun biasanya memang tidak mungkin secara gamblang bank menyatakan dirinya melakukan *income smoothing* karena hal itu mengindikasikan bahwa pengelolaan dananya tidak efisien dan bisa saja investor menangkap sinyal bahwa hal tersebut bukan laba yang sebenarnya terjadi”

Peneliti : “Bagaimana pandangan informan terhadap fatwa DSN yang mengatur mengenai *Income smoothing*?”

Informan : “Sebenarnya *kan* seperti ini ya, kalau fatwa DSN itu ada proses fikih juga disana, tapi dalam penerapan fatwa itu dalam kerangka konseptual yang bagaimana? Dengan kata lain ke implementasinya dulu, bisa jadi laba *smoothing* yang terkandung dalam fatwa tersebut adalah terkait

laba bank syariah yang akadnya *mudharabah muthlaqah* tadi, tapi kalau kaitannya dengan perusahaan seperti yang saya ceritakan tadi maka itu bertentangan dengan fatwa DSN lain bahwa konsep bagi hasil itu didasarkan pada laba real, *nah* ini *kan* agak sedikit bertentangan.

Makannya fatwa itu harus dipahami secara kontekstual tidak secara tekstual saja, ini bisa bahaya kalau cuma dipahami secara tekstual saja.



Kan fatwa ini memang muncul karena ada permintaan dari perbankan.

Nanti dikhawatirkan laba *smoothing* itu bisa diterapkan di semua jenis perusahaan, padahal *kan* tidak seperti itu”.

Peneliti : “Bagaimana tanggapan informan mengenai motivasi melakukan *income smoothing* untuk kepentingan perpajakan?”

Informan : “Kalau untuk menanggapi praktik tersebut, menurut saya pencatatan akrual yang bisa dimainkan untuk *income smoothing* ini, contoh pembagian dividen, teknisnya begini, ketika perusahaan mengalami untung maka pemegang saham punya bagian dari keuntungan, sudah terjadi kan keuntungannya, bisa diakui saat itu juga kan keuntungannya, dan bisa dibagikan ke pemegang saham kan, tapi tidak serta merta seperti itu, perusahaan akan menahan itu dan dilaporkan sebagai laba ditahan agar tidak terkena pajak atas dividen, boleh? ya boleh-boleh saja menurut PSAK karena basisnya adalah akrual”.

Peneliti : “Bagaimana desain penerapan *Income smoothing* yang ideal dan sesuai syariah?”

Informan : “Ini kan secara substansi saja sudah tidak syariah jadi kalau memang dipaksakan agar sesuai syariah maka yang harus dirubah adalah substansinya. Kemudian yang harus dirubah adalah motivasinya, jangan sampai hanya motivasinya untuk menaikkan citra perusahaan saja, usaha dalam islam itu bukan hanya sekedar mendapatkan bonus bagi manajer tapi ukuran bekerja itu untuk beribadah mencapai ridha Allah *subhanahu wata’ala*, jadi memang antara *principal* dan *agent* itu

harus selaras saling amanah, *nah* kalau praktiknya tidak seperti itu dengan kata lain motivasinya untuk memperbaiki *performance* dengan tujuan supaya sahamnya itu laku maka kalau dalam fikih ini ada unsur *tadlis* dan *gharar*. *Nah* kembali lagi apa yang didahulukan kemudian antara substansi sama motivasi ini? Kalau kita mengikuti konsep perilaku produsen ada unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif ini nanti kaitannya dengan niat motivasi pekerja dan motivasi laba, *nah* yang harus dibenahi terlebih dahulu ini *kan* motivasinya, kalau motivasinya sudah benar tentu tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam implementasinya. Kemudian juga kalau mengacu kepada prinsip-prinsip mu'amalah dalam islam maka semua transaksi harus berdasarkan pada *rabbaniyyat* dan *ruhhaniyat*, dengan kata lain kita harus kembali kepada fitrah yaitu *Rabb*, tauhid kepada Allah, semua tujuannya adalah Allah, jadi artinya bagaimana? Laba bukan menjadi tujuan tapi Ridho Allah lah yang menjadi tujuan manusia”.



**Lampiran 4****Draf Wawancara Akademisi di Bidang Ekonomi Syariah, Dr. Dra. Asfi Manzilati, ME. Dosen Universitas Brawijaya (UB)**

Peneliti : “Apakah terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penerapan *Income smoothing* dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah? Apa dan bagaimana perbedaannya?”

Informan : “Ok, jadi begini *mbak*, saya mau cerita dulu, kemarin saya dari Blitar dan ada warung namanya Warung Mak Ti, itu terkenal sekali dan besar, makanan itu ambil sendiri, kasir bahkan yang jaga kadang pemiliknya sendiri kadang pegawainya, saya *kan* jadi penasaran, itu *kan* tidak mengikuti aturan dasar dalam tanda kutip ‘perusahaan’ ya, padahal itu kan rame, Saya inisiatif tanya kepada pemiliknya ‘*Bu ini gimana, kok bisa laris begini?*’ Ibu itu jawab ‘*halah apa kata Gusti Allah*’ terus Saya kan tanya ‘*loh, Bu emang Ibu tau tadi orang bayarnya sesuai dengan apa yang dia ambil?*’ Ibu itu jawab ‘*Halah gak apa-apa, Bu kalau yang terjadi seperti itu kan itu urusannya sama Allah*’ jadi disini artinya apa? Ini kan akuntansinya tidak menggunakan *income smoothing* apalah itu *to*, tapi apa? Bentuk filosofinya itu *lo, corporate* nya itu adalah berdasarkan Tauhid, semuanya karena Allah, makannya kalau secara filosofis, apapun bentuk usahanya maka yang penting *bismillah, lillah*, itu berangkat dari tauhid, *nah* sedangkan penelitian anda ini kan ranahnya praktik, maka jangan lupa bahwa dasar filosofisnya juga mempengaruhi praktik, kayak tadi yang saya ceritakan itu. *Nah* kemudian, mungkin *gak* semua perusahaan bisa seperti itu, *kan* semakin



perusahaan besar dia membutuhkan sistem, untuk pengendaliannya kan ketika *owner (principal)* dan *agent (manager)* harus dipisahkan maka ini butuh satu sistem untuk mengendalikan. Nah sistemnya ini seharusnya berangkat dari tauhid dan berakhir dengan tauhid juga, kan kalau teori *principal-agent* itu kan -mohon maaf- mirip sama teori audit, basisnya kan agak-agak curiga, nah kalau berdasarkan *theory principal-agent*, dari sisi *principal* diusahakan untuk selalu waspada dari sifat-sifat *agent* yang oportunistis dan keterbatasannya dalam mengakses informasi. Kalau dalam islam basisnya kan *mudharabah*, yang menyebabkan tidak adanya satu bagian lebih unggul dari yang lain, dan masing-masing yang berusaha akan menanggung risikonya, yang satunya menanggung risiko harta dan yang satunya menanggung risiko karena usaha (*entrepreneur*) nya. Nah disini terciptalah adil. Gak perlu *dismoothing* tadi itu. *Impactnya* apa untuk akuntansi dengan sistem ini? Tidak ada *double entry* lagi, tapi *single entry book keeping*, misal Saya menyumbang, kalau berdasarkan *double entry* itu gandengannya apa? Pahala? Masak pahala ditulis? Kan tidak, kita emang mengharapkan imbalan dari menyumbang? Kan tidak seperti itu. Kemudian juga penting ini diketahui bahwa *income smoothing* ini kan muncul karena *accrual basis*, sehingga kita bisa merencanakan pengeluaran untuk berapa tahun kemudian, yang belum kejadian. Misal beban penyusutan, kan tidak ada aliran kas keluar di situ tapi dicatat kan? Dan mengurangi pendapatan. Itu kan problemnya”.



Peneliti : “Bagaimana pandangan informan terhadap fatwa DSN yang mengatur mengenai *Income smoothing*?”

Informan : “Iya, kalau kita membahas tentang DSN maka beda lagi, di DSN itu ada lo yang mengatur mengenai anuitas, padahal itu bunga lo yang dihitung.

Karena apa? Karena memang akuntansi yang sudah ada kemudian dipasanga ke yang syariah, bukan filosofi syariahnya dulu kemudiah diturunkan ke akuntansinya seperti apa”.

Peneliti : “*Statement ‘Income smoothing* mengandung *tadlis* dan *gharar*’ Setuju/Tidak Setuju?”

Informan : “Ya setuju, mau tidak mau ya *mbak*, kita kalau berusaha itu *kan* tidak tahu bakal untung ya, sedangkan *smoothing* ini memastikan, atau dengan kata lain memberikan kepastian laba itu akan begini dan begitu ya supaya terlihat *smooth*. Tapi memang kemudian jangan diartikan seperti orang *jabbariyah* ya yang memandang ‘bahwa sesuatu yang terjadi terjadilah’ namun tetap harus *prepare* misalkan membentuk cadangan, itu harus ada perhitungan, dalam artian *expected risk* dan *expected risk* ini harus dihitung tapi tidak untuk *smoothing*, tapi untuk *prepare*, dan berjaga-jaga”.

Peneliti : “Kalau misalkan cadangan yang dibentuk itu sesuai dengan fatwa DSN No. 87 untuk berjaga-jaga seperti kata Ibu barusan itu bagaimana tanggapan ibu?”

Informan : “Jadi contoh begini ya, ini yang terjadi di praktik yang saya lakukan di sini, di koperasi ini, di masa lalu pembiayaan yang dilakukan oleh

anggota itu diikutkan asuransi tertentu, *nah* kita bayar premi, ternyata meskipun syariah –ya mohon maaf- masih mirip-mirip juga sama konvensional, *nah* kemudian jika ada klaim dampaknya adalah klaimnya tidak mudah untuk dicairkan dan ada saja kekurangan data dan lain-lain, padahal ini jumlahnya kecil dibandingkan dengan premi yang kita bayarkan, terus mereka memberikan *cashback* sebagai hadiah, inikan akadnya apa? Tidak jelas. Akhirnya kesepakatan dari anggota, kita membentuk dana cadangan sendiri, yang jumlahnya tidak terlalu besar yaitu 0,05% dari setiap pembiayaan itu. Kita jadikan akun tersendiri yang namanya cadangan, kemudian ketika ada anggota yang baru 2-3 kali mengangsur kemudian meninggal, *nah* untuk kerugian ini kalau tidak ada asuransi biasanya dialihkan kepada ahli waris, *nah* disini letak saling membantunya, *ta'awun 'alal birri wattaqwa*, jadi diminta untuk para anggota tadi sebagai wujud pertanggungjawaban bersama sesama anggota, sehingga kalau ada anggota yang meninggal maka kerugiannya diambilkan dari dana cadangan tadi. Ya tentunya sudah tidak dipisahkan ini cadangannya siapa-siapa, *kan* itu punya seluruh anggota yang ditujukan untuk menolong sesama anggota dan bahkan kalau perlu ahli warisnya itu mendapatkan santunan dari kita. Itu *kan* juga kita hitung, maksudnya hitung disini *kan* begini, mati itu *kan* pasti, dan waktunya hanya Allah yang tahu, kita sebagai manusia melakukan hal sesuai kapasitas kita, misal kita *kan* punya statistik mengenai pembiayaan sekian kalau di asuransi berapa ya risikonya, *nah*



tapi ini kita apa adanya dan diharapkan anggota-anggota yang mencadangkannya itu ikhlas, angsurannya sudah selesai tapi risiko tidak terjadi maka ya sudah harus diikhhlaskan untuk berjaga-jaga”.

Peneliti : “Bagaimana pandangan Ibu mengenai penjaminan pengembalian modal khususnya pada akad investasi dalam hal ini *mudharabah*?”

Informan : “Kalau mengenai penjaminan pengembalian modal tentu ada legalitasnya, silakan *mbaknya* mengacu pada DSN MUI no.105/DSN-MUI/X/2016, namun perlu dipahami ya, *habit* dari masyarakat kita yang memang sebagai pelaku ekonomi rasional tidak akan mau uang tabungannya berkurang, itu wajar sekali, sehingga akan menjadi masuk akal jika dari pihak LKS memberikan kepastian kepada nasabah untuk pengembalian modalnya secara utuh, *toh* dalam fatwa dibolehkan *kok*, ini di luar konteks substansi akad *mudharabah*nya ya.”

Peneliti : “Selain mengenai premi asuransi seperti penjelasan sebelumnya adakah yang masih tidak bisa lepas dari bayang-bayang praktik konvensional?”

Informan : “Saya rasa itu ya menurut saya, misalnya ada hadiah diberikan oleh bank kami tidak mau diberikan dalam bentuk uang harus dengan barang, kemudian nisbah bagi hasil dengan bank misalkan kami menyimpan uang tersebut di bank syariah maka kita harus menyadari bahwa nisbah pada awal akad itu berdasarkan *expected return* bukan *realnya*, *kan* pasti bank menyodorkan proyeksi yang berhubungan dengan *expected return* tadi, maka kita harus sadar itu hanya proyeksi saja, tapi bagi hasilnya ya sesuai dengan *realnya* nanti. Terkadang

kesadaran itu *kan* tidak ada di masing-masing orang dan berharap apa yang ditabung/disimpan itu tidak berkurang, padahal *kan* logikanya, siapa yang menjamin bank itu selalu untung? Nah Kemudian masalah nisbah bagi hasil, nisbahnya itu dibandingkan dengan *equivalent rate*, nanti *kan* ketahuan hari-harinya itu bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Biasanya memang kalau dalam perbankan melakukan ini (analisis *Equivalent Rate*). Informasi imbal hasil *equivalent rate* perorang kemudian dibandingkan dengan imbal hasil yang diproyeksikan sebelumnya. Ketika nilai *equivalent rate* per orang lebih rendah dari imbal hasil yang diproyeksikan dengan mengacu (*benchmarking*) pada tingkat suku bunga pasar, maka bank syariah akan melakukan penyesuaian atas imbal hasil yang akan didistribusikan dengan memberikan bagian hak bank syariah untuk nasabah. Kemudian kalau saya memandang proyeksi ini boleh ya karena ini orientasinya masa lalu yang sudah terjadi dijadikan acuan untuk mengira-ngira, tapi nanti ketika eksekusi bagi hasil ya tetap mengacu pada hasil *realnya*, *kan* kalau konvensional proyeksi ini dijadikan sebagai acuan yang pasti ketika bagi hasil nanti beda sama syariah ini berdasarkan *realnya*”.

Peneliti : “*Statement ‘Income smoothing: Asal hukum adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya’ Setuju/Tidak Setuju?*”

Informan : “Jadi begini ya, sejauh yang saya tahu DSN itu *kan* isinya para Ulama’ dan praktisi, kenyataan, di kita itu *kan* praktik itu lebih dulu ada daripada fatwa, sehingga praktik itu akan disajikan dulu sama praktisi



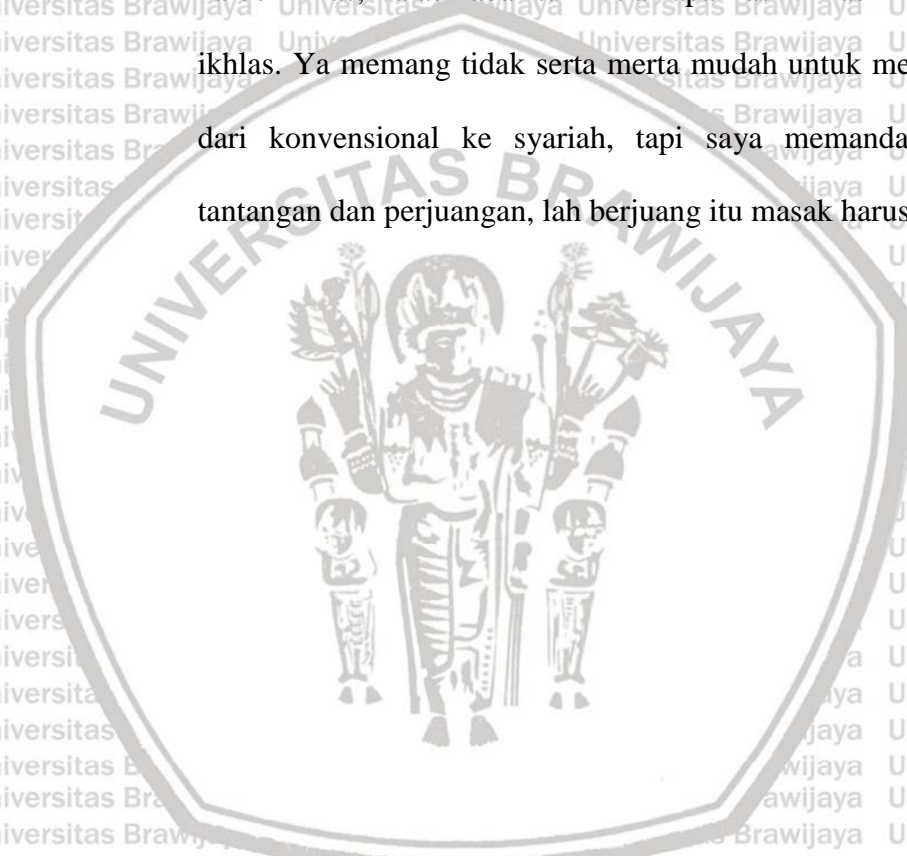
kemudian jika dilihat sama para Ulama' itu tidak ada praktik yang melanggar, maka dibuatlah fatwa untuk melegalkannya, tapi jika pada akhirnya di tengah jalan ada praktik yang menimbulkan pelanggaran, maka itu bisa dianulir, seperti dulu ada tentang gadai emas di bank itu awalnya ada fatwanya kemudian dianulir. Maka kalau kita lihat ya *mbak* baiknya Allah itu *kan* kalau hukum mengenai mu'amalah itu sangat luas sekali dan *general* seperti kaidah itu, yang detail itu *kan* masalah bagi-bagi misalnya waris. Rasul saja ketika diminta menentukan harga maka rasul menjawab '*jangan biarkan saya ikut campur masalah penentuan harga*' 'kan begitu."

Peneliti : "Statement '*Income smoothing*: menghindari kerusakan diutamakan daripada mengambil manfaat' Setuju/Tidak Setuju?"

Informan : " ya saya setuju, jadi memang hal ini harus dihindari atai diminimalisir ya, kalau menurut pandangan saya ya memang pahit tapi harus dikatakan, bahwa hal ini membuka jalan kemadharatan, jadi kalau berani memang harus merubah sistem, itu sangat mungkin dilakukan, tinggal mau atau tidak, buktinya saya di koperasi ini, kalau masalah kecepatan penerapannya itu beda ya, pasti ada proses di situ, ada pendidikan, kemudian diterapkan sedikit demi sedikit, itu bukan hal yang mustahil dilakukan kok. Ini menjadi tantangan ya, tidak semudah mebalik telapak tangan ya".

Peneliti : "Bagaimana desain penerapan *Income smoothing* yang ideal dan sesuai syariah?"

Informan : “Gini ya *mbak*, *income smoothing* ini *kan* manajemen laba, lah saya itu gak ngerti kenapa laba yang harus *dimanage* yang *dimanage kan* harusnya usahanya, yang saya tahu *kan* kalau dalam islam kita diajari untuk ikhtiar, tawakkal, dan ikhlas, ikhtiarnya ini *kan* berusaha, kerja keras, dan lain-lain, kemudian ketika hasilnya sudah ada maka kita harus ikhlas, kalau laba itu ikhtiar apa hasil? Hasil *kan*? Jadi harus ikhlas. Ya memang tidak serta merta mudah untuk merubah *mind set* dari konvensional ke syariah, tapi saya memandangnya sebagai tantangan dan perjuangan, lah berjuang itu masak harus enak-enakan”





**Lampiran 5****Draf Wawancara Praktisi di Bidang Akuntansi yang Berprofesi sebagai Staff Akuntansi Keuangan di PT Bumi Asri Situbondo**

Peneliti : “Bagaimana pandangan informan terhadap *income smoothing* secara umum?”

Informan : “Kalau dihubungkan dengan perilaku manajer maka praktik *income smoothing* ini secara garis besar di bagi dua yaitu pertama, *income smoothing* merupakan perilaku oportunistik jika dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dan memanipulasi laporan keuangan, Kedua, *income smoothing* merupakan perilaku realistis jika dilakukan untuk kepentingan keberlangsungan perusahaan, praktik *income smoothing* ini menurut saya sah-sah saja dilakukan selama itu tidak menyebabkan kesalahan informasi bagi pengguna laporan keuangan dan tetap patuh terhadap regulasi dan PSAK yang berlaku di Indonesia”.

Peneliti : “Jadi menurut anda praktik *income smoothing* ini termasuk realistis ya?”

Informan : “ya, begini saja ya *mbak*, bayangkan saja ketika kegiatan operasi perusahaan dari tahun ke tahun yang cenderung berfluktuasi dengan sangat tajam tanpa adanya pertaaan laba. Harga saham akan berfluktuasi secara tajam sejalan dengan kinerja yang berfluktuasi tajam, akhirnya hal tersebut berdampak pada IPO (Initial Public Offering) sahamnya tidak laku/kurang menarik. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat perataan laba ini jadi realistis jika dipraktikkan”.

Peneliti : “Apakah anda mengetahui mengenai jenis-jenis *income smoothing*?”

Informan : “Jenis *income smoothing* sendiri ada banyak jenisnya tergantung dari dimensi mana kita melihatnya, secara garis besar menurut Dascher dan Malcom, nanti bisa dibaca ya di situ, ada yang namanya *real smoothing* dan *artificial smoothing*”.

Peneliti : “Aturan dan dasar hukum mengenai *income smoothing*? bagaimana dan jelaskan?”

Informan : “Praktik ini bisa merujuk pada PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, disitu bisa dilihat bahwa penacatatan akuntansi di Indonesia menggunakan accrual basis. Implikasi dari adanya accrual basis ini ya tadi, perusahaan bisa mengakui apa yang belum terjadi *realnya*, atau menanggukkan apa yang seharusnya sudah terjadi. *Kan* dalam PSAK 1 disebutkan bahwa basis pencatatan akuntansi menggunakan *accrual basis* yang kemudian hal ini menjadi rasional jika manajemen menanggukkan beban-beban yang sebenarnya sudah terjadi, mengganti metode pencatatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan waktu pengakuan dan metode-metode pencatatan dalam akuntansi yang nantinya akan berdampak pada tingkat laba yang dilaporkan sesuai dengan yang diinginkan, nanti mengenai teknik nya, dalam hal ini apa saja yang ditanggukkan atau segera diakui ini berhubungan langsung dengan motivasi manajemen melakukannya. Bisa saja karena motivasi bonus, politik, atau pajak.”

Peneliti : “Apakah perusahaan anda menerapkan *income smoothing*?”

Informan : “Pada dasarnya saya tidak bisa mengatakan bahwa kami menggunakan



perataan laba ya, yang jelas dan dapat saya pastikan bahwa pihak manajemen membuat beban-beban sepanjang tahun tidak berfluktuasi dan cenderung *flat* dengan cara mengalokasikan (beban) ke bulan/tahun berikutnya jika memang terlalu tinggi, dan sebaliknya”.

Peneliti : “Apakah perusahaan anda membentuk suatu cadangan untuk memitigasi risiko usaha?”

Informan : “ Ya memang ada kemungkinan (perusahaan membentuk cadangan) untuk mitigasi ketika terjadi kerugian. Rasionalitas dari pemegang saham *kan* dia akan menyimpan/investasi uang di perusahaan yang kinerjanya bagus, dari mana tercerminnya? Yang paling gampang dari laba mengenai ini (pembentukan cadangan) bisa merujuk pada PSAK 55 Mengenai Instrument Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (revisi 2014) dan peraturan perbankan mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.”

Peneliti : “Bagaimana tekniknya?”

Informan : “ Mengenai Teknik ini merupakan wewenang dari pusat dan kami tidak ada wewenang di ranah itu”

Peneliti : “Bagaimana Desain penerapan *income smoothing* atau manajemen laba yang tidak akan menimbulkan asimetri informasi?”

Informan : “Transparansi yang diutamakan dan mengendalikan manajemen agar berperilaku sesuai etika ekonomi”.

**Lampiran 6****Draf Wawancara Praktisi di Bidang Akuntansi, yang Berprofesi sebagai FAT (Finance, Accounting, Tax) Manager di PT Budi Karya Raharja**

Peneliti : “Apakah entitas anda menerapkan manajemen laba? Jelaskan jenis manajemen laba yang diterapkan?”

Informan : “Ya, kami menerapkan *Income minimization* (penurunan laba), ini merupakan proses rekayasa laporan keuangan agar laba tidak terlihat besar sebagaimana mestinya, bahkan cenderung dibuat merugi. Berbeda dengan *Taking A Bath* yang memiliki tujuan untuk *melverage* KPI manajemen di masa yang akan datang”.

Peneliti : “Bagaimana teknisnya?”

Informan : “Ada tiga yang menjadi perhatian kami (1) memaksimalkan sektor pendapatan yang merupakan objek PPh Final (2) memaksimalkan beban CSR, penyusutan akan aset tidak berwujud, beban piutang tak tertagih, *entertainment*, Zakat, shodaqoh. (3) konversi laba ditahan menjadi deviden”.

Peneliti : “Apakah entitas anda menerapkan *income smoothing*? Jelaskan jenis *income smoothing* yang diterapkan dan Bagaimana teknisnya?”

Informan : “Tidak (menggunakan perataan laba), namun memang secara tidak langsung mengenai praktik *income minimization* ini berdampak pada pelaporan laba yang cenderung tidak berfluktuatif, karena tidak mungkin kami melaporkan laba pada tahun ini sekian, tinggi misalnya, kemudian tahun depan turun, untuk mengurangi pajak misalnya, ini bahaya sekali, ketika ada pemeriksaan dari pihak pemerintah mengenai



kepatuhan pajak, mereka juga pasti bertanya-tanya, ada apa *nih*? jangan-jangan ada indikasi mangkir pajak? Jadi secara tidak langsung ya saya katakan itu berpengaruh pada perataan laba juga.”

Peneliti : “Apakah entitas anda menganut prinsip-prinsip syariah/konvensional dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya? Bagaimana dan Jelaskan penerapan *income smoothing* dalam entitas syariah dan konvensional?”

Informan : “Menganut prinsip konvensional, mengenai teknis *income smoothing* karena itu tadi PT kami secara langsung tidak mempraktikkan hal tersebut tapi secara kepentingan pajak kami menggunakan manajemen laba, *kan* kami juga menggunakan *setting* pengeluaran juga”.

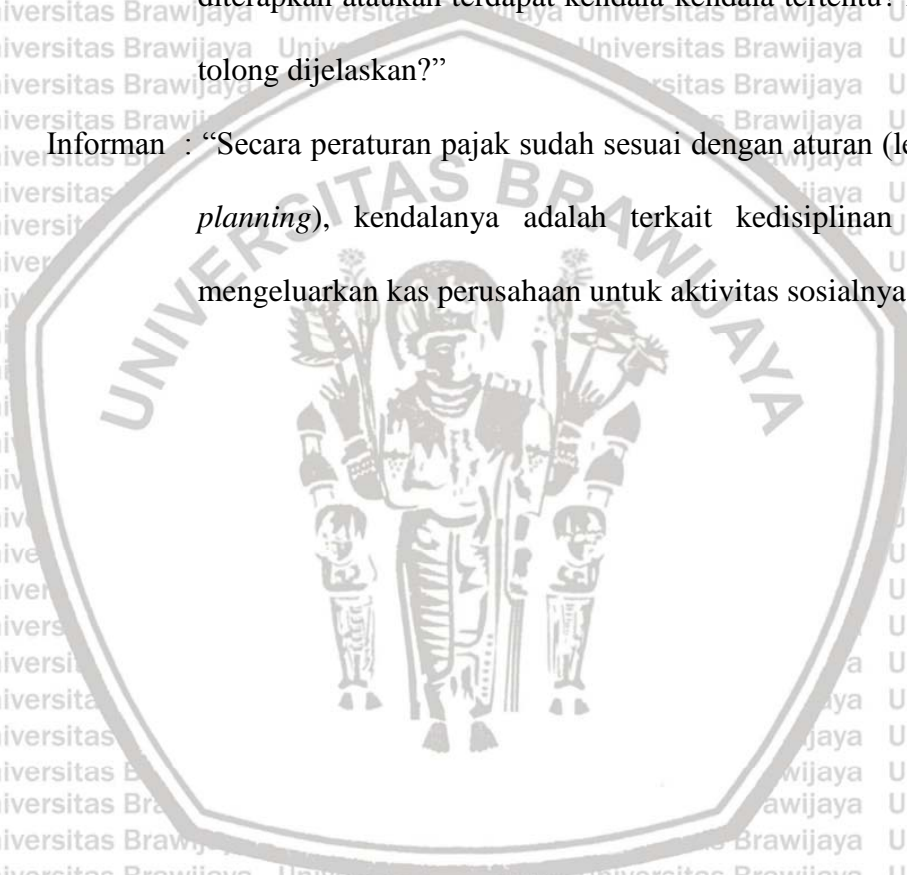
Peneliti : “Dasar hukum apa yang diterapkan oleh entitas anda dalam penerapan *income smoothing*? (Fatwa/PSAK/Aturan Internal dll.) Bagaimana peraturan dan teknisnya?”

Informan : “Secara langsung kami tidak bisa mengatakan kami menerapkan PSAK tentang *income smoothing* ya, tapi kami mematuhi PSAK yang berhubungan dengan perpajakan dan tentu Peraturan pajak oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak. Ada 2 poin penting ya: (1) dalam peraturan pajak, ada beban-beban yang tidak terkait dengan operasional namun dapat mengurangi *income* sehingga *net income* menjadi kecil seperti: Beban kerugian piutang, zakat, hibah, CSR dll. Perusahaan memang mengeluarkan uang untuk kegiatan sosial lebih besar daripada operasional (2) selain itu penghasilan yang merupakan objek PPH Final

tidak lagi dikenakan PPH Badan. Laba atas PPH final dijadikan sebagai laba ditahan terlebih dahulu kemudian dikonversi menjadi deviden agar tidak terkena pajak deviden”.

Peneliti : “Menurut anda apakah praktik yang dilakukan dalam entitas anda sudah sesuai peraturan yang berlaku? Apakah sudah ideal dan cocok untuk diterapkan ataukah terdapat kendala-kendala tertentu? Bagaimana dan tolong dijelaskan?”

Informan : “Secara peraturan pajak sudah sesuai dengan aturan (lebih kepada *tax planning*), kendalanya adalah terkait kedisiplinan *Owner* dalam mengeluarkan kas perusahaan untuk aktivitas sosialnya”.





**Lampiran 7****Draf Wawancara Praktisi di Bidang Akuntansi/Perbankan Syariah, yang Berprofesi sebagai *Marketing Funding Manager* Bank Muamalat Indonesia (BMD)**

Peneliti : “Pada dasarnya apa yang dijadikan basis bagi hasil dalam akad *mudharabah*?”

Informan : “Sebenarnya *kan* nasabah itu *pengennya* kalau nyimpan uang itu tidak berkurang, jadi pihak kami sampai saat ini masih menggunakan *revenue sharing*, bukan *profit sharing*. *Profit sharing* itu terlalu berisiko karena *shahibul maal* ikut menanggung biaya operasional juga, jadi disini kami ingin melindungi hak nasabah mengenai terjaminnya bagi hasilnya dengan tanpa perlu menanggung biaya operasional tadi”

Peneliti : “Dalam hal ini yaitu akad *mudharabah*, apakah lembaga anda memberikan jaminan pengembalian modal pada deposan sesuai dengan fatwa DSN MUI no.105/DSN-MUI/X/2016?”

Informan : “Sudah tentu karena kami merupakan lembaga yang berlabel syariah wajib dan harus patuh terhadap peraturan DSN MUI (DSN MUI no.105/DSN-MUI/X/2016), tapi yang menjadi perhatian utama dari penerapan fatwa ini adalah tujuan dari lembaga kami untuk menghindari risiko investasi akibat *Displaced Commercial Risk* (DCR)”

Peneliti : “Apakah LKS anda menerapkan *income smoothing* terhadap DPK? Dan jenis *income smoothing* apakah yang diterapkan? Bagaimana pengukuran dan pengungkapannya?”

Informan : “Pertama, mengenai pengukuran ya, jadi begini, total distribusi bagi

hasil untuk nasabah dan juga pola perataannya dalam hal ini nisbah, waktu eksekusi pencadangan, dan bagaimana penginformasian terhadap nasabah itu bukan wewenang dari kantor cabang, sebagai pihak yang menduduki bank cabang tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, karena semua data terpusat, ya. Wewenang kami di cabang ini hanya memasukkan data ke sistem terpusat dan kami menerima nilai bersih yang akan dibagihasilkan kepada nasabah. Kedua yang perlu diperhatikan, tepatnya regulator dalam hal ini BI dan OJK meminta dan memeriksa kesesuaian bagi hasil yang dilakukan bank, dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 65/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.

Peneliti : “Berdasarkan POJK tersebut berarti LKS anda menerapkan manajemen risiko investasi? Jelaskan dan bagaimana teknisnya?”

Informan : “Kalau untuk mitigasi risiko investasi, ya kami melakukan itu, apalagi OJK mengharuskan untuk membuat profil risiko melalui peraturan POJK No. 65/ POJK.03/2016 tentang penilaian risiko tadi, dengan IRR. Cuma memang saya tidak bisa memastikan format pengisiannya apakah memang sesuai dengan format baku regulator atau hanya dari manajemen, tapi yang pasti kami mengisi itu sesuai sistem yang harus kami isi dari kantor pusat”.

Peneliti : “Jadi pada dasarnya apa tujuan dari LKS membentuk IRR ini apakah



murni menghindari risiko investasi?”

Informan : “ya, selain itu memang untuk saat ini isu-isu politik juga wajib menjadi perhatian, terutama yang menurut manajemen bisa menurunkan gairah investasi masyarakat, cara menyikapinya yaitu kami membidik nasabah prioritas dan memberikannya *special nisbah* untuk menarik gairah investasi mereka”.

Peneliti : “Bagaimana kriteria nasabah yang memperoleh *special nisbah* ini?”

Informan : “Diatas 100 juta, kami memberikan spesial nisbah”.

Peneliti : “Apakah ketentuan ini sudah ditetapkan regulator?”

Informan : “Setahu saya memang untuk menyikapi isu-isu sensitif ini kami menjaga persentase nisbah agar sesuai dengan harapan nasabah/deposan. Bukan tanpa dasar memang dari OJK mengharuskan minimum modal yang harus kita jaga, makanya kami membidik nasabah prioritas tadi”.

Peneliti : “Apakah LKS anda membuat proyeksi atas kinerja yang berguna untuk memberikan gambaran bagi hasil ketika awal akad?”

Informan : “Kalau mengenai proyeksi sendiri ya kami membuat, dan kami harus menyetorkannya kepada pusat plus isu-isu yang terjadi di wilayah kami, soalnya *kan* proyeksi yang kami buat ini akan dijadikan pertimbangan bagi manajemen pusat untuk menentukan tingkat nisbah bagi hasil nanti agar kompetitif”.

Peneliti : “Berdasarkan laporan tahunan tahun 2019 ini saya menemukan bahwa realita kinerja Bank Muamalat berada di bawah proyeksi yang dibuat, lantas langkah-langkah apa saja yang dibuat LKS untuk memberikan

kepercayaan dalam tanda kuti ‘perusahaan baik-baik saja’ ? Apakah LKS membuat cadangan untuk menyesuaikan dengan *equivalent rate* tadi?”

Informan : “Ya, kami membuat cadangan yang semacam itu, hal ini murni karena meminimalisir risiko investasi tadi agar kami bisa mempertahankan tingkat bagi hasil untuk nasabah agar kompetitif dengan konvensional dan mencegah aliran modal keluar dari beberapa nasabah tadi. Ini juga seperti masuk dalam profil risiko yang harus dibuat menurut peraturan OJK tadi, Cuma penyebutannya tidak PER seingat saya”.

Peneliti : “Bagaimana LKS mengungkapkan praktik ini dalam Laporan Keuangan sebagai bentuk transparansi?”

Informan : “Kalau untuk transparansi sendiri, kami berusaha untuk secara gamblang menginformasikan apa saja yang diperlukan untuk pemegang kepentingan, investor pada khususnya, kami tidak mungkin mengingkari apa-apa yang sudah disepakati di awal akad ya mbak. Kami sebisa mungkin mengikuti aturan yang telah ditetapkan regulator dan dewan pengawas”.

Peneliti : “Kalau di Laporan Keuangan itu dilaporkan dimana ya pak kalau boleh tahu?”

Informan : “Kalau secara khusus mengenai pencadangan tadi kami memang *pure* “tidak tahu” harus melaporkan dimana, tidak tahu ini dalam tanda kutip ya mbk, dalam artian memang regulator tidak mewajibkan pengungkapan pencadangan ini, tapi yang pasti kami mengambil



cadangan ini dari laba bersih bukan dari pendapatan yang harus dibagihasilkan, jadi sama sekali hal ini tidak mengurangi haknya nasabah”.



**Lampiran 8**

**Draf Wawancara Praktisi di Bidang Akuntansi/Perbankan Syariah, yang Berprofesi sebagai *Market Risk and Model Validation Head Bank CIMB NIAGA***

Peneliti : “Apakah Entitas anda menerapkan *income smoothing*?”

Informan : “Jika yang dimaksud disini adalah perataan laba maka kami tidak melakukannya, tapi kalau hubungannya dengan memitigasi risiko investasi ya kami melakukan itu”.

Peneliti : “Bagaimana teknis memitigasi risiko investasi yang anda maksud?

Apakah anda membentuk dana cadangan?”

Informan : “ Ya, di kami memang ada itu, atau biasa kami menyebutnya CKPN, dan wajib kami laporkan ke pusat, fungsinya memang untuk menghindari masalah kerugian akibat kredit yang gagal bayar, yang menyebabkan pada menurunnya kinerja keuangan kita di laporan keuangan”.

Peneliti : “Bagaimana pencatatan dalam akuntansinya?”

Informan : “Akun kontra dari cadangan ini *kan* beban penurunan nilai asset, jadi otomatis semakin besar cadangan yang kita bentuk maka beban juga semakin besar, hubungannya sama laba jadi semakin kecil karena bersifat beban ini mengurangi laba ya”.

Peneliti : “Berapa besaran yang dicadangkan?”

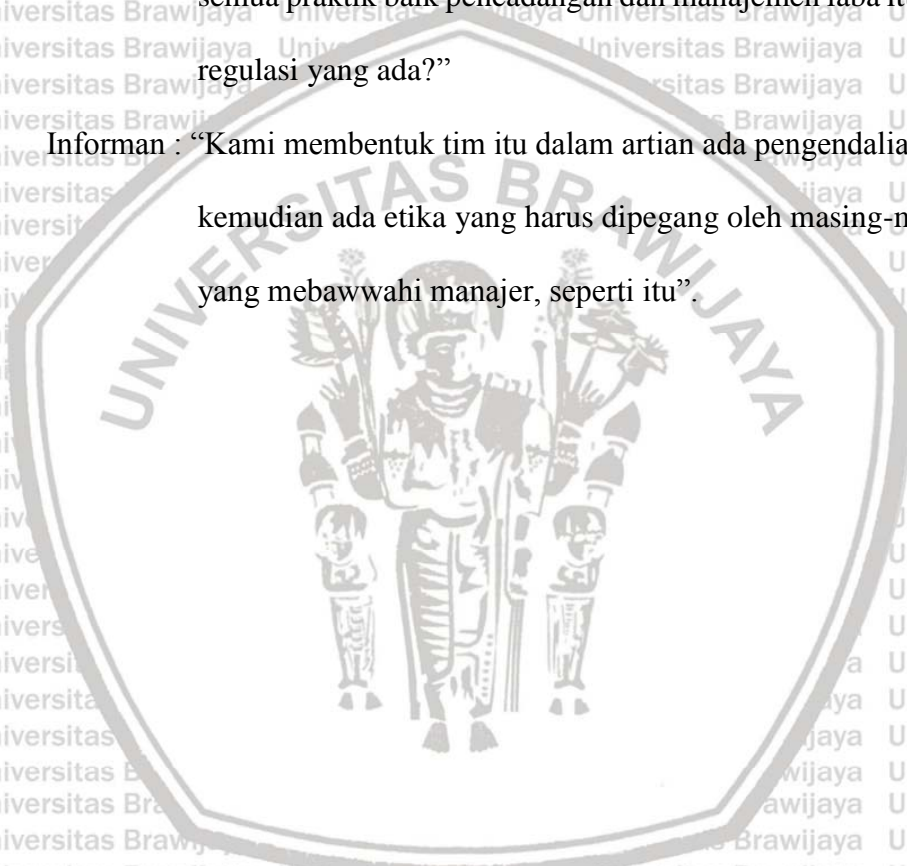
Informan : “Mengenai besarnya (pencadangan) ini pada dasarnya murni keakuratan estimasi dan catatan *historical loss experience*. Namun secara umum kami juga menggunakan aturan baku seperti ini, nilai tercatat asset keuangan dikurangi dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang



yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari asset keuangan tersebut. Nanti kan ketemu *tuh* jumlah yang harus kita cadangkan, baru jumlah asetnya dikurangi dengan cadangan tersebut, dan kita laporkan sebagai laba/rugi”.

Peneliti : “Bagaimana ketentuan yang dibuat oleh entitas anda untuk menjaga agar semua praktik baik pencadangan dan manajemen laba itu sesuai dengan regulasi yang ada?”

Informan : “Kami membentuk tim itu dalam artian ada pengendalian internal juga, kemudian ada etika yang harus dipegang oleh masing-masing advisor yang mebawwahi manajer, seperti itu”.



**Lampiran 9**

**Draf Wawancara Ulama' di Bidang Fikih, Dr. Habib Segaf Bin Hasan Baharun, M.H.I., Pengasuh Pondok Pesantren Banat DALWA (Darullughah Wadda'wah) dan Rektor Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah**

Peneliti : “Secara umum pandangan fikih terhadap *Income smoothing*?  
Bagaimana dasar hukum dari sisi fikih mu'amalah?”

Informan : “Jadi sebelum masuk kesitu ya, *Ana* masuk dulu ke akad *syarikah* dan *qiradh* (beliau menggunakan istilah *qiradh* untuk akad *mudharabah*, Red). Kalau *syarikah* itu kedua orang yang berusaha ikut bekerja keduanya, sedangkan kalau *qiradh* yang satu hanya sebagai investor dan tidak kerja sama sekali dan yang kedua yang bekerja. Salah satu yang menjadi syarat *qiradh* itu diantaranya, kesepakatan awal mengenai bagi hasil, misal 40:60 atau berapa-berapa, disini mungkin nanti yang menjadi faktor permasalahan dari tema yang *Anti* tulis, *nah* jadi yang ditahan itu tujuannya dari manajemen itu untuk misal tahun depan rugi dia masih tetap mengakui keuntungan, cuma *kan* masalahnya tanpa sepengetahuan investor padahal disini *kan* harus ada transparansi yang harus dikedepankan, *nah* kemudian dalam sebuah bagi hasil di awal akad itu tidak boleh disebutkan nominal tapi dengan persentase, misal bagi hasil 5% atau 20% dari keuntungan, *nah* ini *kan* nanti fluktuatif, *nah* ketika dibentuk cadangan dan menimbulkan ketidakjelasan ini *kan* berarti menyembunyikan informasi jika tidak dijelaskan kepada investor, *nah* hal semacam ini tidak diperbolehkan dalam islam karena dilakukan tanpa sepengetahuan investor. Kecuali kalau memang disepakati di awal misal ‘dari 40% keuntungan ini akan kami simpan



sekian persen dengan tujuan missal terjadi kerugian maka kita ambilkan dari cadangan itu'. Tapi tetap keuntungan yang dicadangkan itu harus terdata”.

Peneliti : “Bagaimana pandangan informan terhadap pencadangan yang dilakukan dengan persentase yang mengikuti pasar dalam artian berfluktuasi setiap tahun dalam penerapan *income smooting*?”

Informan : “ Ini perlu dicermati apakah ini disepakatinya di awal atau tidak, jadi *kan* ada kaidah mu’amalah إنما البيع عن تراض *nah an-taradin* disini *kan* berarti harus jelas, transparansi itu harus dikedepankan, karena dalam islam itu *kan* tidak diperbolehkan memberikan jalan yang merugikan orang lain, coba *Anti* cari itu di mana saja tidak akan ada celah itu, jadi kalau memang kaidahnya seperti itu maka jangan sampai ada sesuatu yang tidak tampak. Tapi ada kaidah lain yang perlu *Anti* ketahui bahwasannya semua mu’amalah, apapun macamnya, selama bukan riba, selama bagiannya masing-masing itu sudah sampai kepada yang berhak, itu tidak dosa dan tidak ada tuntutan di akhirat nanti. Semua muamalat ya. Seperti jual beli online itu *kan* tidak ada serah terima tidak, ada tatap muka, tapi jika nanti dia sepakat dengan harga dan jenis barang yang dipampang di online tadi, maka dia hanya berdosa di awal saja karena melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tapi menggunakan barang yang dibeli dan menggunakan uang yang didapat dari penjualan online itu tidak apa-apa, tapi memang jual beli yang semacam itu ya pasti ada konsekuensi yang ditanggung misal tidak

sesuai dengan di gambar atau ada penipuan dan lain-lain maka ya seperti itu kalau dilakukan tidak sesuai dengan syariah. Tapi *kan* dengan kondisi zaman yang seperti ini mau *gak* mau memang kita digiring kesana. Kalau sesuai islam pasti tidak konsekuensi yang ditanggung seperti tadi itu”.

Peneliti : “*Statement ‘Income smoothing*: menghindari kerusakan diutamakan daripada mengambil manfaat’ Setuju/Tidak Setuju?”

Informan : “Kalau dalam pandangan *Ana* itu lebih banyak madharatnya, karena itu *kan* kaitan dengan haknya orang lain, *kan* salah satu permasalahan dalam penelitian *Anti* ini *kan* menyimpan haknya orang lain, yang berkemungkinan ke depannya ini, kalau dia tidak amanah bisa menggunakannya tanpa sepengetahuan si pemilik dana, membuka celah gitu ya, itu ya yang harus jadi sorotan dari tema ini. Ini sudah termasuk *mafisid*, karena yang menjalankan (mengelola) dana ada kemungkinan berdosa jika ada peluang (untuk menyalahgunakannya), kalau dari sisi investornya mungkin tidak menjadi masalah ya mungkin, tapi kalau kemudian dia tahu haknya digunakan (untuk dicadangkan tadi) maka akan sama-sama merasa dirugikan, jadi lebih baik praktik semacam itu ditinggalkan untuk menghindari kerusakan”.

Peneliti : “*Statement ‘Income smoothing*: Asal hukum adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya’ Setuju/Tidak Setuju?”

Informan : “*Nah* kalau untuk urusan ini yang dijadikan dasar adalah haram itu jelas, halal itu jelas, dan diantara keduanya itu syubhat, *nah* kalau di sini itu



jelas tidak haramnya? Jelas tidak halalhnya? Kalau tidak jelas maka syubhat, makanya disini itu harus disebutkan di awal akad dan diperjelas mengenai kesepakatan bagaimana, nah diperjelasnya di sini harus disebutkan itu berapa yang dicadangkan harus dengan nominal menurut saya tidak cukup hanya dengan persentase, tapi kalau keuntungan itu harus dengan persentase karena *kan* sifatnya tidak jelas dan tidak pasti, sedangkan pencadangan ini *kan* sudah jelas diambilkan dari laba yang didapatkan saat itu maka harus disebutkan nominal. Ini yang perlu digarisbawahi jika memang mau diekspansi dengan cara islam”.

Peneliti : “Bagaimana desain penerapan *Income smoothing* yang ideal dan sesuai syariah?”

Informan : “Harus Transparan dan disepakati di awal akad ya antara orang-orang yang berakad, kemudian tadi itu jumlah yang dicadangkan disepakati antara investor dengan pengelola dana dalam bentuk nominal soalnya sudah bersifat jelas dalam artian sudah terjadi keuntungannya, berbeda dengan nisbah bagi hasil itu harus dengan persentase”.

**Lampiran 10**

**Draf Wawancara Ulama' di Bidang Fikih, K. Muhammad Abdullah Syukri, S. IP, MA, Pengasuh Ma'had As-Syakiroh 2 YLPI Buntet Pesantren dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren**

Peneliti : “Bagaimana aturan dan dasar hukum akuntansi syariah terhadap *Income smoothing*?”

Informan : “ Kalau dari kacamata syariah sudah tentu kita diwajibkan berpegang teguh pada hukum Allah dengan kata lain dalam bermu'amalah harus berpegang teguh pada Alqur'an dan Hadits. Menurut saya dan pengetahuan saya ya, *Income smoothing* ini berarti memainkan pendapatan/laba, nah laba yang seharusnya diakui sebagai keuntungan yang harus dibagi tapi malah ditahan tanpa seizin dari pemilik dana/nasabah, sudah jelas disini berarti ada ketidakjujuran, sedangkan dalam islam kejujuran dalam bermu'amalah itu adalah wajib. Jadi menurut saya hal tersebut tidak diperbolehkan jika nilai-nilai syariahnya dikesampingkan.”

Peneliti : “Secara umum pandangan fikih terhadap *Income smoothing*? Bagaimana dasar hukum dari sisi fikih mu'amalah?”

Informan : “Secara umum memang tidak ada dalil yang jelas menyebutkan bahwa *Income smoothing* itu haram, Allah dalam Alqur'an hanya berfirman bahwa sesuatu yang Halal itu Jelas dan sesuatu yang Haram itu Jelas, yang berada di antaranya maka Syubhat. Namun kita harus bijaksana dalam mengambil suatu hukum dari suatu praktik yang tidak ada di zaman nabi, seperti *income smoothing* ini, jika di dalamnya dirasa banyak mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, dan kemadhorotan



sudah pasti Haram.”

Peneliti : “*Statement ‘Income smoothing’* mengandung *tadlis* dan *gharar*’ Setuju/Tidak Setuju?”

Informan : “Sangat setuju, *tadlis* ini kan menutup-nutupi sedangkan *gharar* ini kan berarti samar atau tidak jelas transaksinya. Kalau dihubungkan dengan *income smoothing* ini jelas menutup-nutupi informasi yang sebenarnya, nah ini bisa dikategorikan *tadlis*. Mengenai penahanan laba untuk pencadangan ini diukur berdasarkan apa dan akad sama nasabahnya bagaimana? Kan tidak jelas, maka menurut saya pribadi setuju *income smoothing* ini mengandung *gharar*”.

Peneliti : “*Statement ‘Income smoothing: Asal hukum adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya’* Setuju/Tidak Setuju?”

Informan : “Ini bersifat ‘*aam ya*, Dik kaidahnya. Jadi menurut saya pribadi, kembali kepada dalil bahwa yang Halal itu Jelas dan Haram itu Jelas, diantara keduanya adalah syubhat. Syubhat ini kan samar-samar, tidak jelas”.

Peneliti : “*Statement ‘Income smoothing: menghindari kerusakan diutamakan daripada mengambil manfaat’* Setuju/Tidak Setuju?”

Informan : “Sangat setuju”.

Peneliti : “Bagaimana pandangan informan terhadap dilema pengambilan hukum tentang *Income smoothing*?”

Informan : “Secara umum saya melihat banyak madharat di dalamnya jadi saya setuju jika pelaporan keuangan perusahaan mencerminkan keadaan sebenarnya baik itu rugi atau untung, tidak ada yang ditutup-tutupi

apakah keuntungan/kerugian itu besar atau kecil. Jika semua saling transparan sudah tentu pihak-pihak yang terlibat akan saling ridho dan tercapai keberkahan dalam bisnis”.

Peneliti : “Melihat fenomena yang ada apakah penerapan *Income smoothing* dalam praktik sudah sesuai syariah?”

Informan : “Untuk saat ini jujur Saya belum survei banyak dilakukan dalam praktik sekarang bagaimana. Yang jelas jika hak-hak dari nasabah/pemilik dana dan manajemen ada yang tidak terpenuhi dan menimbulkan ketidakridhaan didalamnya sudah tentu *Income smoothing* dalam hal ini masuk dalam kategori yang tidak boleh”.

Peneliti : “Bagaimana desain penerapan *Income smoothing* yang ideal dan sesuai syariah?”

Informan : “Kejujuran, amanah, transparansi, dan perbaiki niat dalam diri untuk bermu’amalah dengan Allah. Itu yang paling diutamakan. *Self upgrading* dengan cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah untuk menjalankan bisnis dan bermu’amalah”.



Lampiran 11  
PSAK 105: Akuntansi Mudharabah

154

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PSAK No. 105

27 Juni 2007

PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI  
*MUDHARABAH*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**PSAK No.  
105**

**PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI  
MUDHARABAH**

Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang  
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982  
tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Graha Akuntan  
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310  
Telp. : (021) 3190-4232  
Fax. : (021) 724-5078  
email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)  
website: <http://www.iaiglobal.or.id>

*Cetakan Pertama*  
*Juni 2007*



**Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi Mudharabah** telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007.

**Jakarta, 27 Juni 2007**

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>M. Jusuf Wibisana</b>    | <b>Ketua</b>   |
| <b>Dudi M. Kurniawan</b>    | <b>Anggota</b> |
| <b>Jan Hoesada</b>          | <b>Anggota</b> |
| <b>Siddharta Utama</b>      | <b>Anggota</b> |
| <b>Agus Edy Siregar</b>     | <b>Anggota</b> |
| <b>Hekinus Manao</b>        | <b>Anggota</b> |
| <b>Etty Retno Wulandari</b> | <b>Anggota</b> |
| <b>Jumadi</b>               | <b>Anggota</b> |
| <b>Roy Iman Wirahardja</b>  | <b>Anggota</b> |
| <b>Riza Noor Karim</b>      | <b>Anggota</b> |
| <b>Merliyana Syamsul</b>    | <b>Anggota</b> |
| <b>Meidyah Indreswari</b>   | <b>Anggota</b> |
| <b>Jogiyanto Hartono</b>    | <b>Anggota</b> |

## DAFTAR ISI

|   | Paragraf       |
|---|----------------|
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>01 - 11</b> |
| Tujuan .....                                | 01             |
| Ruang Lingkup .....                         | 02 - 03        |
| Definisi .....                              | 04             |
| Karakteristik .....                         | 05 - 10        |
| Prinsip Pembagian Hasil Usaha .....         | 11             |
| <b>PENGAKUAN DAN PENGUKURAN .....</b>       | <b>12 - 35</b> |
| <b>AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA .....</b>   | <b>12 - 24</b> |
| Penghasilan Usaha .....                     | 20 - 24        |
| <b>AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA .....</b> | <b>25 - 35</b> |
| Mudharabah Musytarakah .....                | 31 - 35        |
| <b>PENYAJIAN .....</b>                      | <b>36 - 37</b> |
| <b>PENGUNGKAPAN .....</b>                   | <b>38 - 39</b> |
| <b>KETENTUAN TRANSISI .....</b>             | <b>40</b>      |
| <b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>                | <b>41</b>      |
| <b>PENARIKAN .....</b>                      | <b>42</b>      |





# 1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 2 NO. 105

## 4 AKUNTANSI MUDHARABAH

6 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*  
7 *adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca*  
8 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*  
9 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*  
10 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*  
11 *(immaterial items).*

## 14 PENDAHULUAN

### 16 Tujuan

18 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,  
19 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi  
20 *mudharabah.*

### 22 Ruang Lingkup

24 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang*  
25 *melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik*  
26 *dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).*

28 3. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan*  
29 *perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang*  
30 *menggunakan akad mudharabah.*

### 32 Definisi

34 4. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang*  
35 *digunakan dalam Pernyataan ini:*

37 *Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua*  
38 *pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan*

1 *seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)*  
2 *bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di*  
3 *antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian*  
4 *finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.*

5  
6 *Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana*  
7 *pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola*  
8 *dana dalam pengelolaan investasinya.*

9  
10 *Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana*  
11 *pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana,*  
12 *antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek*  
13 *investasi.*

14  
15 *Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah*  
16 *dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya*  
17 *dalam kerjasama investasi.*

## 18 Karakteristik

19  
20  
21 5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau  
22 pengelola dana.

23  
24 6. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah,*  
25 *mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah.*  
26 Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang  
27 diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.

28  
29 7. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan  
30 antara lain:

- 31 (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana
- 32 lainnya;
- 33 (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan
- 34 cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
- 35 (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi
- 36 sendiri tanpa melalui pihak ketiga.



8. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

9. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

10. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

### Prinsip Pembagian Hasil Usaha

11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

### Contoh

| Uraian                | Jumlah | Metode Bagi Hasil          |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Penjualan             | 100    |                            |
| Harga Pokok Penjualan | 65     |                            |
| Laba Kotor            | 35     | <i>Gross Profit Margin</i> |
| Beban                 | 25     |                            |
| Laba rugi bersih      | 10     | <i>Profit Sharing</i>      |

# 1 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

2

## 3 AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA

4

5 *12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik*  
6 *dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat*  
7 *pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada*  
8 *pengelola dana.*

9

10 *13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai*  
11 *berikut:*

12 *(a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur*  
13 *sebesar jumlah yang dibayarkan;*

14 *(b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas*  
15 *diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat*  
16 *penyerahan:*

17 *(i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai*  
18  *tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui*  
19 *sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi*  
20 *sesuai jangka waktu akad mudharabah.*

21 *(ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai*  
22  *tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai*  
23 *kerugian;*

24

25 *14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum*  
26 *usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain*  
27 *yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola*  
28 *dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai*  
29 *kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.*

30

31 *15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah*  
32 *dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan*  
33 *pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan*  
34 *pada saat bagi hasil.*

35

36 *16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak*  
37 *dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola*  
38 *dana.*



17. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

- (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
- (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

19. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

## Penghasilan Usaha

20. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:

- (a) investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
  - (b) pengembalian investasi *mudharabah*;
- diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

22. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

1 **23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan**  
2 **pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak**  
3 **mengurangi investasi mudharabah.**

4  
5 **24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh**  
6 **pengelola dana diakui sebagai piutang.**

## 7 **AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA**

8  
9  
10 **25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad**  
11 **mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer**  
12 **sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang**  
13 **diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah**  
14 **temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.**

15  
16 **26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah**  
17 **temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui**  
18 **sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.**

19  
20 **27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran**  
21 **dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan**  
22 **bagian hak pemilik dana.**

23  
24 **28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan**  
25 **menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti**  
26 **yang dijelaskan pada paragraf 11.**

27  
28 **29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah**  
29 **temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum**  
30 **dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban**  
31 **sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.**

32  
33 **30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau**  
34 **kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola**  
35 **dana.**



# 1 *Mudharabah Musytarakah*

2

3 *31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana*  
4 *dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana*  
5 *milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi*  
6 *mudharabah.*

7

8 *32. Akad mudharabah musytarakah merupakan*  
9 *perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.*

10

11 *33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana*  
12 *(berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya*  
13 *dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah).*  
14 *Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian*  
15 *hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil*  
16 *usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam*  
17 *mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah*  
18 *dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.*

19

20 *34. Pembagian hasil investasi mudharabah*  
21 *musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:*

22 *(a) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai*  
23 *mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah*  
24 *yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi*  
25 *setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai*  
26 *mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana*  
27 *(sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai*  
28 *dengan porsi modal masing-masing; atau*

29 *(b) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai*  
30 *musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi*  
31 *modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil*  
32 *investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana*  
33 *(sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola*  
34 *dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai*  
35 *dengan nisbah yang disepakati.*

36

37 *35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian*  
38 *dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.*

## 1 PENYAJIAN

36. *Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.*

37. *Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:*

- (a) *dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;*
- (b) *bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban*

## 16 PENGUNGKAPAN

38. *Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:*

- (a) *isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;*
- (b) *rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;*
- (c) *penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan*
- (d) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

39. *Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:*

- (a) *isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;*
- (b) *rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;*



- 1 (c) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah
- 2 muqayadah; dan
- 3 (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:
- 4 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## 6 KETENTUAN TRANSISI

7

8 *40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk*

9 *transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif.*

10 *Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan*

11 *maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini*

12 *secara retrospektif.*

## 14 TANGGAL EFEKTIF

15

16 *41. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan*

17 *penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada*

18 *atau setelah tanggal 1 Januari 2008.*

## 20 PENARIKAN

21

22 *42. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi*

23 *Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan,*

24 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.*

**Lampiran 12**  
**Fatwa DSN No. 87: Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga**



**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**

NO: 87/DSN-MUI/XII/2012

Tentang

**METODE PERATAAN PENGHASILAN (*INCOME SMOOTHING*)**

**DANA PIHAK KETIGA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kondisi tertentu yang diduga kuat akan menimbulkan risiko pengalihan/penarikan dana nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akibat tingkat imbalan yang tidak kompetitif dan wajar (*displaced commercial risk*), LKS membuat kebijakan yang dikenal dengan metode perataan pendapatan yang antara lain berupa: 1) perataan pendapatan tanpa membentuk cadangan penyesuaian keuntungan, dan 2) perataan pendapatan dengan membentuk cadangan penyesuaian keuntungan (*Profit Equalization Reserve/PER*);
  - b. bahwa praktik perataan pendapatan dengan atau tanpa pembentukan cadangan penyesuaian keuntungan dalam bagi hasil dana pihak ketiga yang dilakukan oleh LKS memerlukan ketentuan syariah yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan operasionalnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Metode Perataan Pendapatan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- a. Q.S. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."

- b. Q.S. al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia



87. Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga 2

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban ..."

c. Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

d. Q.S. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."

e. Q.S. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ..."

f. Q.S. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

g. Q.S. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ..."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
(أُخْرِجَهُ ابْنُ مَاجَهٍ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي سُنَنِهِ، الْكِتَابُ:  
الْأَحْكَامُ، الْبَابُ : مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِيَعَارَهُ، رَقْمُ الْحَدِيثِ :  
٢٣٣١، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى)

"Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/  
merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya  
(kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya  
(perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ibnu Majah)

b. Hadis Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ  
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ  
ذَابَّةً ذَاتَ حِمْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَعَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن  
عباس)

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai  
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak  
mengarungi lautan dan tidak memuruni lembah, serta tidak  
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia  
(mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan  
yang ditetapkan Abbas itu sampai pada Rasulullah, beliau  
membolehkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى  
أَخِيٍّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَغُلُطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه  
عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual  
beli tidak secara tunai, muqaradiah (mudharabah), dan  
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah  
tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

d. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Kitab Ahkam,  
bab: "ma dzukira 'an Rasulillah", No: 1272:



الصِّلَحَ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُتَصِلِينَ إِلَّا صَلَاحًا حَرَّمَ خِلَالَهُ أَوْ أَخْلَ حَرَامًا  
وَالْمُتَصِلُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خِلَالَهُ أَوْ أَخْلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

e. Atsar dari Sayyidina 'Ali karramallahu wajhah (al-Mushannaf, Abdurrazzaq, 8/238, al-Maktab al-Islami 1403 H cet. II):

الرَّيْبُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَالْوُضْعَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ

"Keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemilik modal."

### 3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب. أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمُصْلَحَةَ فَلْتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

ت. الْمُضْرَعُ لَا يُجْبَرُ

"Orang yang berderma tidak boleh dipaksa." (Durar al-Hukam fi Syarh al-Majallah al-Ahkam, pasal 761, hlm. 216)

ث. تَصَرُّفُ الْإِنَامِ عَلَى الرَّيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى

مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ الْعَابِدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَيْمٍ،  
القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه، ١٩٦٨، ص. ١٢٣، الأشباه  
والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن  
أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٧، ص.

(٢٣٣)





"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mempertimbangkan mashlahat." (*al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, Zain al-Abidin Ibnu Ibrahim Ibnu Nujaim, Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa Syirkah. 1968, hlm. 123; dan *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987, hlm. 233)

ج. الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَازِلَ الضَّرُورَةِ (الْأَشْبَاه وَالنِّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ لَزَيْنِ الْعَابِدِينَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ لُجَيْمٍ، الْقَاهِرَةِ: مُؤَسَّسَةُ الْحَلِيِّ وَشُرَكَاهُ، ١٩٦٨، ص. ٩١؛ الْأَشْبَاه وَالنِّظَائِرُ فِي قَوَاعِدِ وَفُرُوعِ فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ لَجَلَالِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوثِيِّ، بَيْرُوت: دَارُ الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، ١٩٨٧، ص. ١٧٩)

"Hajat menempati tempat darurat." (Dalam pengertian, hajat dapat berstatus sama dengan darurat). (*al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, Zain al-Abidin Ibnu Ibrahim Ibnu Nujaim, Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa Syirkah. 1968, hlm. 91; *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987, hlm. 179)

ح. الْحَاجَةُ لَا تُحَقِّقُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِمَا لَيْسَ عَنْهُ (القَوَاعِدُ الْفَقْهِيَّةُ مَفْهُومُهَا، نَشْأَتُهَا، تَطَوُّرُهَا، دِرَاسَةٌ مُؤَلَّفَاتُهَا، أَدْلَتُهَا، مَهْمَتُهَا، تَطْبِيقَاتُهَا، عَلِيٌّ أَحْمَدُ النَّدَوِيُّ، دِمَشْق: دَارُ الْقَلَمِ، ١٩٩٤، ص. ١٠٢)

"Hajat tidak menyebabkan bagi seseorang boleh mengambil harta milik pihak lain." (*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* ..., 'Ali Ahmad al-Nadwi, Damaskus: Dar al-Qalam. 1994, hlm. 102)

خ. لَا يُجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِمَا لَيْسَ عَنْهُ بِإِلَّا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤٦٥)

"Seseorang/pihak tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara'." (*Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989, hlm. 465).



Memperhatikan : a. Keputusan AAOIFI dalam *Mi'yar Syar'i*, nomor: 12 (angka 3/1/5/14) yang menyatakan bahwa:

يُجْزَى الثَّصُّ بِالإِسْتِنَادِ إِلَى نِظَامِ الشَّرْكَةِ أَوْ إِلَى قَرَارٍ مِنَ الشَّرْكَاءِ عَلَى  
الإِحْطَاطِ بِأَرْزَاقِ الشَّرْكَةِ دُونَ تَوَزُّعٍ، أَوْ حَسْمٍ نِسْبَةً مُعَيَّنَةً مِنَ الْأَرْزَاقِ  
بِشَكْلِ ذَوْرِيٍّ ثَقْوَةٍ لِمَلَأَةِ الشَّرْكَةِ، أَوْ لِتَكُونِ احْتِيَاظِيٍّ عَاصٍ لِتَوَاجِهَةِ  
مَخَاطِرِ غَسَاوَةِ رَأْسِ الْعَمَالِ، أَوْ لِلْمَحَافَظَةِ عَلَى مُعْدَلِ تَوَزُّعِ الْأَرْزَاقِ.

"Berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau keputusan dari para pemegang saham, perusahaan boleh menahan keuntungan perusahaan tanpa dibagikan, atau menyisihkan keuntungan dalam jumlah tertentu secara periodik untuk memperkuat kinerja perusahaan (*solvency reserve*), atau membentuk cadangan khusus untuk menanggulangi risiko kerugian modal (*investment risk reserve*), atau untuk menjaga kestabilan pembagian keuntungan (*profit equalization reserve*)."

b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (juz V, hlm. 3939):

وَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يُشْتَرَطَ لِأَحَدِ الْعَاقِلَيْنِ ذَرَاهِمَ مُعْلُومَةٍ مُعْلُومَةٍ إِنْ زَادَ  
الرَّيْحُ عَلَى مَقْدَارِ كَذَا مِنَ الذَّرَاهِمِ، فَذَلِكَ شَرْطٌ صَحِيحٌ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ  
الْمُضَارَبَةِ، لِأَنَّهُ لَا يُلْزَمُ إِلَى عَهْدِهِ الرِّبْحَ.

"Ulama Hanafiah membolehkan untuk membuat syarat bahwa salah satu pihak yang berakad memperoleh dinar dengan jumlah tertentu yang diketahui dalam hal keuntungan usaha melebihi nilai tertentu; syarat tersebut dipandang sah dan tidak berdampak pada sahnya akad mudharabah, karena hal tersebut tidak menyebabkan ketidakjelasan (bagian) keuntungan."

c. Kesimpulan dan Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia) tentang Pengaturan Pendapatan dan Pembentukan Cadangan dalam Rangka Penyesuaian Keuntungan (*Profit Equalization Reserve*), tanggal 20 Desember 2012;

d. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012.

# MEMUTUSKAN

**Menetapkan : Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Metode Perataan Penghasilan/Laba (*Income Smoothing Method*) adalah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba atau penghasilan dari waktu ke waktu dengan cara menahan sebagian laba/penghasilan dalam satu periode dan dialihkan pada periode lain dengan tujuan mengurangi fluktuasi yang berlebihan atas bagi hasil antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah penyimpan dana (Dana Pihak Ketiga/DPK);
2. Metode Perataan Penghasilan dengan Membentuk Dana Cadangan adalah pengaturan distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atas bagi hasil antara LKS dan Nasabah Penyimpan Dana dengan cara membentuk cadangan perataan laba/penghasilan (*Profit Equalization Reserve*);
3. *Profit Equalization Reserve* (PER) adalah dana cadangan yang dibentuk oleh LKS yang berasal dari penyisihan selisih laba LKS yang melebihi tingkat imbalan/hasil yang diproyeksikan untuk penyesuaian bagi hasil dana mudharabah (*mudharabah*); dan dalam hal simpanan dana Nasabah menggunakan akad *mudharabah mufawadah*, jika disepakati para pihak, pembentukan cadangan penyesuaian bagi hasil dapat pula berasal dari penyisihan keuntungan Nasabah yang melebihi tingkat bagi hasil yang diproyeksikan;
4. Metode Perataan Penghasilan Tanpa Membentuk Cadangan adalah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba dari waktu ke waktu untuk tujuan pengaturan bagi hasil antara LKS dan Nasabah tanpa pembentukan cadangan.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Metode Perataan Penghasilan dengan atau tanpa membentuk cadangan boleh dilakukan dalam Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

**Ketiga : Ketentuan terkait Pembentukan Dana Cadangan**

1. LKS boleh membentuk Dana Cadangan (PER) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya realisasi bagi hasil untuk Nasabah penyimpan dana di bawah tingkat imbalan yang diproyeksikan;



2. Dana Cadangan (PER) secara prinsip boleh dibentuk melalui penyisihan keuntungan sebelum dibagikan dengan syarat:
  - a. bagi hasil aktual melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan, dan
  - b. dengan izin Nasabah DPK;
3. Dana Cadangan (PER) tidak boleh dibentuk dengan mengurangi bagi hasil yang merupakan hak nasabah DPK apabila bagi hasil aktual lebih kecil dari tingkat imbalan yang diproyeksikan;
4. Dalam hal akad *Mudharabah Muqayyadah*, Dana Cadangan (PER) boleh juga dibentuk melalui penyisihan keuntungan hak Nasabah yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan setelah dibagikan dengan izin Nasabah DPK;
5. Dana Cadangan (PER) yang dibentuk LKS dari penyisihan keuntungan sebelum dibagikan yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan merupakan hak Nasabah DPK secara kolektif yang harus dikelola secara terpisah oleh LKS untuk proses pengaturan pendapatan dan tingkat imbalan bagi Nasabah DPK;
6. Pengaturan dan pengawasan lebih lanjut terhadap kebijakan dan pelaksanaan LKS dalam Pembentukan Dana Cadangan (PER) dan penggunaannya merupakan kewenangan pihak otoritas.

**Keempat**

**: Ketentuan terkait Perataan Penghasilan dengan atau tanpa Pembentukan Cadangan**

1. Metode Perataan Penghasilan yang dibolehkan adalah: dengan membentuk cadangan atau tanpa membentuk cadangan;
2. Perataan Penghasilan hanya boleh digunakan LKS dalam kondisi yang diduga kuat berpotensi menimbulkan risiko penarikan dana nasabah akibat tingkat imbalan dari LKS yang tidak kompetitif (*displaced commercial risk*);
3. Kondisi sebagai dimaksud pada angka 2 di atas harus ditentukan oleh pengurus LKS berdasarkan pedoman operasional/*standard operating procedure* (SOP) LKS dengan memperhatikan opini Dewan Pengawas Syariah;
4. Kebijakan Perataan Penghasilan hanya boleh diberlakukan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menggunakan akad *mudharabah*;
5. Kebijakan Metode Perataan Penghasilan tidak boleh dilakukan apabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung di mana imbalan diberikan tanpa memperhatikan hasil nyata; dan

87 Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga 9

6. Dalam penggunaan Metode Perataan Penghasilan Tanpa Cadangan yang dilakukan dalam hasil usaha yang dibagikan lebih rendah dari proyeksi, LKS boleh melepaskan haknya (*isqath al-haqq/attanzul 'an al-haqq*) untuk menyesuaikan imbalan bagi nasabah DPK agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada nasabah.

Kelima

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Shafar 1434 H  
21 Desember 2012 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

DRS. H.M. ICHWAN SAM

